

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997 - 1999

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 1999

PROSIDING LOKAKARYA HASIL PENDOKUMENTASIAN
KEGIATAN PROYEK PESISIR

EDITOR :

M. FEDI A. SONDITA

NEVIATY P. ZAMANI

BURHANUDDIN

AMIRUDDIN TAHIR

BAMBANG HARYANTO



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar lampiran	ii
Daftar gambar	iii
Daftar istilah	iv
Ucapan terimakasih	vii
Ringkasan eksekutif	viii
<i>Executive summary</i>	xiv
Pidato sambutan Kepala PKSPL-IPB	xix
Pidato penutupan <i>Project Leader</i> of Proyek Pesisir	xxi
1. Proses kerja <i>Learning Team</i> pada tahun 1998/1999 dalam kegiatan pendokumentasian Proyek Pesisir	1
2. Kajian terhadap konsep <i>early actions</i> Proyek Pesisir Sulawesi Utara	5
3. <i>Provincial Working Group</i> : suatu upaya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan	28
4. Kegiatan <i>monitoring</i> Proyek Pesisir Sulawesi Utara	38
5. Diskusi	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kerangka kerja <i>monitoring</i> dan rencana kerja <i>Learning Team</i> -IPB	56
2. Acuan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian yang dilaksanakan oleh <i>Learning Team</i> - IPB 1998/1999	61
3. Daftar obyek pendokumentasian Proyek Pesisir 1998/1999	69
4. Usulan kegiatan pendokumentasian <i>Learning Team</i> IPB 1998/1999	72
5. Kerangka acuan lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir 1 Maret 1999 di Bogor	83
6. Daftar peserta yang hadir dalam lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Tahap kegiatan <i>Learning Team</i> dalam rangka pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir	4
2. Kegiatan pengambilan bintang laut berduri (<i>Crown of Thorns</i> [CoT]) oleh masyarakat desa Bentenan dan Tumbak	15
3. Pengukuran bintang laut berduri (<i>Crown of Thorns</i>) untuk mendapatkan komposisi ukurannya di desa Bentenan dan Tumbak	16
4. Pelatihan teknik <i>snorkeling</i> dalam rangka kegiatan <i>monitoring</i> terumbu karang yang melibatkan masyarakat	18
5. Pelatihan pengamatan garis pantai dalam rangka <i>monitoring</i> erosi pantai yang berbasis masyarakat di desa Bentenan	20
6. Penanaman bibit mangrove di kawasan yang sudah diberi pagar untuk mencegah gangguan binatang	24

DAFTAR ISTILAH

- | | |
|---|---|
| <p>1. Chief of Party : Pimpinan Proyek CRMP; lihat ‘CRMP’ dan ‘Proyek Pesisir’
<i>Project Leader of CRMP; see ‘CRMP’ and ‘Proyek Pesisir’</i></p> | <p>dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sebagai percobaan pelaksanaan kegiatan utama dalam skala kecil.
<i>A type of activity prior to the implementation of CRMP main activities.</i></p> |
| <p>2. Consultant : Lihat ‘Konsultan’.
<i>See ‘Konsultan’.</i></p> | <p><i>Early actions objectives can be to introduce the CRMP and its programs to community to develop their support and to encourage them to participate in its activities, as an experiment in implementation at small scale.</i></p> |
| <p>3. CoT : Lihat ‘Crown of Thorns’.
<i>See ‘Crown of Thorns’.</i></p> | <p>9. Field Extension Officer: Staf Proyek Pesisir yang bertugas sebagai penyuluh masyarakat di lapang, menghubungkan Proyek Pesisir dan masyarakat di desa lokasi proyek; umumnya disebut penyuluh lapangan atau <i>Field Extension Officer</i> atau FEO.
<i>CRMP staffer responsible for community extension program in the field, as a bridge between CRMP and the communities of project villages; often called extension officer or EO.</i></p> |
| <p>4. CCMRS-IPB : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor atau Center for Coastal and Marine Resources Studies - Bogor Agricultural University; lihat ‘Proyek Pesisir’.
<i>Center for Coastal and Marine Resources Studies - Bogor Agricultural University; see ‘Proyek Pesisir’.</i></p> | <p>10. Field Program Manager - FPM: Seorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer Proyek Pesisir di propinsi lokasi proyek.
<i>A person who acts as a CRMP manager at provincial level.</i></p> |
| <p>5. CRC-URI : Coastal Resources Center - University of Rhode Island; lihat ‘Proyek Pesisir’.
<i>Coastal Resources Center - University of Rhode Island; see ‘Proyek Pesisir’.</i></p> | <p>11. ICM : Lihat ‘Integrated Coastal Management’.
<i>See ‘Integrated Coastal Management’.</i></p> |
| <p>6. CRMP : Coastal Resources Management Project ; lihat ‘Proyek Pesisir’.
<i>Coastal Resources Management Project ; see ‘Proyek Pesisir’.</i></p> | <p>12. Integrated Coastal Management: Pengelolaan pesisir terpadu; memadukan kepentingan berbagai <i>stakeholder</i>, kepentingan ekonomi dan ekologi, keterkaitan daratan dan pesisir, dll.
<i>Management of coastal area by integrating needs of various stakeholders, economic and ecological importance, as well as linkage between terrestrial and coastal ecosystem, etc.</i></p> |
| <p>7. Crown of Thorns : Jenis bintang laut (family Asteroidae) yang berwarna biru atau ungu, banyak duri di permukaan atas tubuhnya. Binatang ini memakan polip karang dan dapat merusak terumbu karang; nama ilmiah: <i>Acanthaster planci</i>; nama lokal di Bantenan/Tumbak: sasany.
<i>A blue or purple starfish (family: Asteroidae) with a large number of spines or thorns on the upper surface of its body. This organism eats hard coral polyps and can destroy coral reefs; scientific name: acanthaster planci; local name in Bantenan/Tumbak: sasany.</i></p> | <p>13. Kabupaten Task Force: Kelompok kerja di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir, sekaligus menerapkan praktek koordinasi yang baik di antara instansi pemerintah dan <i>stakeholder</i> pesisir dan lautan;
<i>A working group at kabupaten level which facilitates the implementation of CRMP, and ensures the practice of good coordination among government agencies and coastal and marine resource stakeholders.</i></p> |
| <p>8. Early actions : Jenis kegiatan yang mengawali kegiatan utama Proyek Pesisir dengan tujuan untuk memperkenalkan proyek dan program-programnya kepada masyarakat sehingga mendapat dukungan</p> | |

14. Daerah perlindungan laut: Daerah laut yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan yang dikelola untuk keperluan konservasi serta keperluan lainnya. <i>Marine waters assigned as protected area and managed for conservation use and other permitted purposes.</i>	23. MREP : Marine Resources Evaluation Project <i>Marine Resources Evaluation Project</i>
15. Kegiatan pembelajaran:Proses atau kegiatan untuk menggali pelajaran (lessons) dari pengalaman (experience); hasilnya adalah lessons learned <i>The process or activity to identify lessons from experience; the outputs are lessons learned.</i>	24. Pelaksanaan awal : Lihat ‘Early actions’. <i>See ‘Early action’.</i>
16. Konsultan : Perorangan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dikontrak untuk memberi konsultasi teknis dalam pelaksanaan Proyek Pesisir. <i>Persons, from Indonesia or outside, contracted to provide technical consultation for the implementation of CRMP.</i>	25. Pendokumentasian : Proses atau kegiatan pencatatan terhadap pelaksanaan Proyek Pesisir untuk mengidentifikasi pengalaman proyek secara sistematis. <i>The process of recording the implementation of CRMP which enables systematic identification of project experience.</i>
17. Konsultan lokal : Lihat ‘Konsultan’. <i>See ‘Konsultan’.</i>	26. PKSPL-IPB : Lihat ‘CCMRS-IPB’ <i>See ‘CCMRS-IPB’.</i>
18. KTF : Lihat ‘Kabupaten Task Force’. <i>See ‘Kabupaten Task Force’.</i>	27. Penyuluh Lapangan : Lihat ‘Field Extension Officer’. <i>See ‘Field Extension Officer’.</i>
19. Learning activity : Lihat ‘Kegiatan pembelajaran’. <i>See ‘Kegiatan pembelajaran’.</i>	28. Performance Monitoring Plan - PMP: Kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh USAID terhadap pelaksanaan Proyek Pesisir. <i>Monitoring program designed by US AID on the implementation of CRMP.</i>
20. Learning Team : Sebuah tim yang dibentuk dalam koordinasi PKSPL-IPB dan ditugaskan oleh Proyek Pesisir untuk melakukan pendokumentasian terhadap aktifitas proyek dalam rangka mengangkat pelajaran dari pengalaman yang dapat dijadikan bahan pelajaran berguna bagi berbagai pihak; lihat ‘learning activity’. <i>A team established under the coordination of CCMRS-IPB and as signed by CRMP to document project activities to identify lessons from experience for various stakeholders; see ‘learning activity’.</i>	29. Provincial Working Group: Kelompok kerja di tingkat propinsi yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir, sekaligus menerapkan praktek koordinasi yang baik di antara instansi pemerintah dan <i>stakeholder</i> pesisir dan lautan; kelompok kerja ini dapat dalam bentuk PWG (Provincial Working Group), PAC (Provincial Advisory Committee), PSC (Provincial Steering Committee), PTF (Provincial Task Force). <i>A working group at provincial level which facilitates the implementation of CRMP, and ensures the practice of good coordination among government agencies and coastal and marine resource stakeholders; it can be in a format of PWG (Provincial Working Group), PAC (Provincial Advisory Committee), PSC (Provincial Steering Committee), PTF (Provincial Task Force).</i>
21. Local consultant : Lihat ‘Konsultan’. <i>See ‘Konsultan’.</i>	30. Proyek Pesisir : Sebuah proyek bantuan Amerika Serikat kepada negara Indonesia sebagai bagian dari program Natural Resource Management II Program, yang diselenggarakan oleh Coastal Resources Center-University of Rhode Island (CRC-URI) bekerjasama
22. Marine sanctuary : Lihat ‘daerah perlindungan laut’. <i>See ‘daerah perlindungan laut’.</i>	

- dengan Ditjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan PKSPL-IPB.
A USAID supported project to Indonesia as a part of Natural Resource Management II Program, coordinated by the Coastal Resources Center - University of Rhode Island (CRC-URI) in cooperation with the Directorate General of Regional Development, Department of Home Affairs and the Center for Coastal and Marine Resources Center-Bogor Agricultural University.
31. Proyek Pesisir Kalimantan Timur - PP KALTIM: Satuan pengelola (*management unit*) Proyek Pesisir di propinsi Kalimantan Timur; kantor di Balikpapan;
Management unit of CRMP in Kalimantan Timur province; its office is in Balikpapan.
32. Proyek Pesisir Lampung - PP Lampung: Satuan pengelola (*management unit*) Proyek Pesisir di propinsi Lampung; kantor di Bandarlampung;
Management unit of CRMP in Lampung province; its office is in Bandarlampung.
33. Proyek Pesisir Sulawesi Utara - PP SULUT: Satuan pengelola (*management unit*) Proyek Pesisir di propinsi Sulawesi Utara, berkantor di Manado;
Management unit of CRMP in Sulawesi Utara province; its office is in Manado.
34. Senior Extension Officer - SEO: Staf Proyek Pesisir yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan para EO membantu Field Program Manager dalam pelaksanaan kegiatan lapang; lihat 'field extension officer'.
Project staffer responsible for coordinating extension officer activities; supports Field Program Manager in the execution of field activities; see 'field extension officer'.
35. Technical Advisor - TA: Konsultan atau pakar yang ditugaskan oleh Proyek Pesisir untuk memberikan bantuan teknis terhadap pelaksanaan Proyek Pesisir; lihat 'consultant'.
A consultant or expert contracted by Proyek Pesisir to provide technical support for the implementation of Proyek Pesisir; see 'consultant'
36. Technical Extension Officer - TEO: Staf Proyek pesisir yang bertugas mengkoordinir dukungan teknis membantu Field Program Manager dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pesisir; lihat 'Field Program Manager'.
Project staffer responsible for coordinating technical support to Field Program Manager in the implementation of CRMP activities; see 'Field Program Manager'.
37. USAID : Badan Bantuan Internasional Amerika Serikat
United States Agency for International Development

UCAPAN TERIMAKASIH

Learning Team Proyek Pesisir PKSPL-IPB menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak sejak dari penyusunan proposal pendokumentasian hingga tersusunnya prosiding ini kepada:

- ❑ *Chief of Party* dan para staf Proyek Pesisir di Jakarta;
- ❑ Kepala PKSPL-IPB dan *Project Coordinator* Proyek Pesisir PKSPL-IPB serta seluruh staf Proyek Pesisir PKSPL-IPB;
- ❑ Manajer dan seluruh staf Proyek Pesisir Sulawesi Utara atas bantuan dan kerjasamanya kegiatan pendokumentasian dilaksanakan, baik saat tim berada di lapangan maupun dalam proses penulisan prosiding;
- ❑ Manajer dan para staf Proyek Pesisir Lampung;
- ❑ Manajer dan para staf Proyek Pesisir Kalimantan Timur;
- ❑ Graham F. Usher, staf khusus yang ditunjuk Proyek Pesisir untuk membantu editorial dan pengalihbahasaan bagian prosiding kedalam teks bahasa Inggris;
- ❑ Dr Kem Lowry dari University of Hawaii atas pembinaan teknis yang diberikan kepada *Learning Team* dalam kunjungannya ke Bogor;
- ❑ Brian Needham dan Brian Crawford dari CRC-URI atas pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Learning Team* IPB;
- ❑ Darmawan dari PKSPL-IPB atas pembinaan *Learning Team* IPB saat menjadi koordinator tim ini selama enam bulan pertama tahun kerja 1998/1999;
- ❑ Para peserta Lokakarya Hasil Pendokumentasian tanggal 1 Maret 1999 di Bogor.

Kami berharap bahwa prosiding ini akan bermanfaat bagi Proyek Pesisir dan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia dan di luar negeri.

Bogor 30 Juni 1999

M. Fedi A. Sondita
Koordinator *Learning Team*
Proyek Pesisir PKSPL-IPB

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project*, suatu kegiatan yang diprakarsai oleh USAID dan Pemerintah Indonesia serta dikelola oleh Coastal Resources Center of the University of Rhode Island (CRC-URI), sedang menyusun proyek-proyek percontohan pengelolaan pesisir di tiga propinsi di Indonesia. Di Propinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini diawali di tiga yang proyek sudah dimulai pada tahun 1997. Di Kalimantan Timur dan Lampung, kegiatan proyek baru dimulai pada tahun 1998.

Pada tahun 1998, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), sesuai dengan kontraknya dengan Proyek Pesisir, melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman perencanaan dan pengelolaan Proyek Pesisir di tiga propinsi lokasi proyek. Kegiatan pendokumentasian ini merupakan upaya untuk membuat dasar pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk mengangkat pelajaran bagus yang dapat diterapkan secara luas dalam rangka pengelolaan pesisir di seluruh Indonesia dan di tempat lain.

Staf dari Divisi Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL-IPB membentuk *Learning Team* untuk kegiatan pendokumentasian ini. Dari daftar kegiatan perencanaan dan pengelolaan pesisir yang mungkin dikaji, setelah berkonsultasi dengan para staf lapangan dan Pimpinan Proyek (*Chief of Party*), tim tersebut memilih 3 (tiga) topik, yaitu: *early actions* atau pelaksanaan awal, *provincial working group* atau kelompok kerja propinsi, dan monitoring kegiatan proyek. Untuk setiap topik tersebut, *Learning Team* menyusun sebuah makalah yang merangkum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan masalah yang dihadapinya. Khusus untuk *early actions*, tiga makalah telah disiapkan karena ada tiga jenis kegiatan *early actions* berbeda yang didokumentasikan. Makalah-makalah tersebut disusun berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh para staf lapangan dan wawancara serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh anggota tim. Draft awal dari makalah yang disusun oleh *Learning Team* sudah disajikan dalam sebuah lokakarya pada tanggal 1 Maret 1999. Berdasarkan komentar-komentar yang diperoleh selama dan setelah lokakarya, makalah-

makalah tersebut kemudian diperbaiki. Makalah-makalah yang sudah diperbaiki tersebut disertakan dalam prosiding ini.

Pada bulan Mei 1999, para anggota *Learning Team* bertemu dengan Brian Crawford dan Brian Needham (keduanya dari CRC-URI), Dr Kem Lowry (Department of Urban and Regional Planning, University of Hawai) dan Graham Usher (konsultan Proyek Pesisir, Jakarta) untuk merevisi makalah-makalah tersebut dan mengidentifikasi pengalaman Proyek Pesisir yang dapat dijadikan bahan pelajaran sebagaimana telah dijelaskan dalam makalah-makalah tersebut. Pengalaman dan pelajaran untuk ketiga topik tersebut secara garis besar disajikan di bawah ini.

EARLY ACTIONS ~ PELAKSANAAN AWAL DI SULAWESI UTARA

1. Apakah yang dimaksud dengan *early actions* atau pelaksanaan awal?

Early actions adalah kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan sebelum tersusunnya suatu rencana pengelolaan (*management plan*). Pada umumnya, *early actions* merupakan aktivitas yang bersifat sederhana dalam jangka waktu pendek yang diupayakan mengarah pada penanganan masalah atau isu sederhana tapi penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.

2. Mengapa *early actions* dilakukan? *Early actions* dilakukan untuk: a) memperkenalkan proyek pengelolaan wilayah pesisir kepada masyarakat; b) membangun dukungan masyarakat terhadap proyek dan program pengelolaan jangka panjang; dan c) mencoba/menguji pelaksanaan kegiatan pengelolaan dalam skala kecil.

3. Siapa yang merencanakan dan memprakarsai *early actions*? *Early actions* dapat diprakarsai baik oleh masyarakat maupun proyek. Proses pemilihan *early actions* yang diprakarsai oleh anggota masyarakat biasanya

memerlukan waktu yang lebih lama. Siapa pencetus prakarsa *early actions* tidak menjadi penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang lebih penting adalah bahwa masyarakat merasa memiliki kegiatan tersebut. Hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu *early actions*.

4. **Bagaimana *early actions* dipilih atau ditentukan?** *Early actions* dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan dengan jelas. Di Sulawesi Utara, kriteria *early actions* adalah kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah setempat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir; kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek (beberapa bulan); kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dimana masyarakat memberikan kontribusi, baik tenaga, waktu, material maupun finansial; kegiatan yang melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu saja. Di Sulawesi Utara, semua kegiatan *early actions*, baik yang diprakarsai oleh masyarakat maupun oleh proyek, usulannya selalu dikonsultasikan dengan masyarakat setempat.

5. **Kegiatan *early actions* apa saja yang dipilih?** Di Sulawesi Utara, kegiatan *early actions* yang dilaksanakan adalah penanaman mangrove, pengambilan bintang laut berduri atau *Crown of Thorns* (CoT), pelatihan pengawasan terumbu karang, pelatihan pengawasan garis pantai, pembangunan pusat informasi masyarakat dan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) pada lokasi-lokasi tertentu.

6. **Bagaimana kegiatan *early actions* dilaksanakan?** Bagaimana kegiatan tersebut didanai? Masyarakat setempat atau Proyek Pesisir melalui petugas lapangnya (*field extension officer*) bekerjasama dengan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan *early actions*. Masyarakat mempunyai kontribusi besar dalam semua kegiatan *early actions*, terutama dalam bentuk curahan tenaga kerja, penyediaan bahan/material atau penggunaan peralatan yang diperlukan bagi kegiatan *early actions*, misalnya perahu. Pada saat sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan *early actions* tidak tersedia di tengah masyarakat atau lokasi setempat, maka pengadaan sumberdaya tersebut

sebagian besar diupayakan oleh Proyek Pesisir. Pada akhir-akhir ini, Bappeda Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi berupa dana yang diperlukan untuk kegiatan *early actions*. Dana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan digunakan masyarakat dalam pelaksanaan *early actions*. Penggunaan dana tersebut dilaporkan masyarakat kepada Proyek Pesisir.

7. **Bagaimana keberhasilan *early actions* dinilai?** Walaupun saat ini terlalu dini untuk menilai efektivitas dan mengkaji keberlanjutan kegiatan *early actions*, hasil antara (*intermediate results*) yang ingin diperoleh dari kegiatan *early actions* sudah tercapai. Misalnya dengan terbentuknya kelompok-kelompok pemonitor lingkungan. Penilaian efektivitas kegiatan *early actions* terutama harus dilihat dari tujuan khususnya, seberapa jauh masyarakat mengetahui atau mengenal Proyek Pesisir, seberapa jauh masyarakat memberikan dukungan kepada pelaksanaan Proyek Pesisir, dan seberapa jauh *early actions* berfungsi sebagai cara untuk menguji-coba strategi pengelolaan pesisir yang akan diterapkan oleh Proyek Pesisir. Namun, kriteria keberhasilan tersebut sangat sulit diukur.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman pelaksanaan kegiatan *early actions*:

8. Walaupun *early actions* telah terbukti sebagai suatu cara yang bermanfaat dalam memulai proyek pengelolaan wilayah pesisir di Sulawesi Utara, namun terlalu banyak kegiatan *early actions* dapat mengalihkan perhatian dari upaya perencanaan dan pengelolaan yang utama dan komprehensif.

9. *Early actions* telah menunjukkan hasil-hasil nyata dan telah mendorong masyarakat setempat dalam mendukung kegiatan-kegiatan jangka panjang, walaupun masyarakat belum atau tidak dapat melihat hasil *early actions* dalam waktu yang singkat.

10. Keberhasilan *early actions* ditentukan oleh dua hal, yaitu dukungan masyarakat dan kelayakan teknis kegiatan yang diajukan. Salah satu contoh adalah kegagalan upaya penanaman mangrove yang diprakarsai oleh masyarakat di Bentenan.
11. Beberapa jenis kegiatan *early actions*, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti sarana MCK, pusat informasi dan pengadaan air bersih, memerlukan tatanan penyelenggaraan yang dapat memastikan kelangsungan kerjasama masyarakat dalam penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun tersebut. (Ada kumpulan pengalaman dan teori yang luas tentang cara merancang suatu lembaga yang dapat menjamin kelangsungan kerjasama masyarakat secara kolektif, seperti penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat).
12. Beberapa kegiatan *early actions* harus didahului dengan kegiatan pendidikan umum bagi masyarakat luas untuk memastikan mereka memahami proyek dan kemudian memberikan dukungan.

PROVINCIAL WORKING GROUPS

1. **Apakah yang dimaksud dengan *provincial working group*?** *Provincial working group* (PWG) adalah kelompok atau panitia khusus yang para anggotanya umumnya adalah staf instansi-instansi pemerintahan yang memiliki tanggungjawab hukum di wilayah pesisir.
2. **Apa peran dan tanggungjawab PWG?** PWG dibentuk dalam rangka:
 - a) memberikan arahan kebijakan dan membantu kelancaran pelaksanaan Proyek Pesisir;
 - b) mengkoordinasikan proyek dan membantu pemerintah daerah melalui proyek di tingkat propinsi;
 - c) meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu (*integrated coastal management*) di kalangan instansi-instansi pemerintahan, dan dalam beberapa kasus mencakup juga kalangan pengusaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
 - dan d) membina komunikasi dan pemahaman antar staf instansi

pemerintahan dan para *stakeholder* lainnya. Nama lembaga PWG ini berbeda-beda di setiap propinsi lokasi proyek: *Provincial Working Group* (PWG - Sulawesi Utara), *Provincial Task Force* dan *Provincial Steering Committee* (PTF dan PSC - Kalimantan Timur) dan *Provincial Advisory Committee/Provincial Steering Committee* (PAC/PSC-Lampung).

3. **Bagaimana anggota PWG dipilih?** Komposisi anggota PWG berbeda di antara masing-masing propinsi lokasi Proyek Pesisir, tetapi di setiap lokasi ada wakil-wakil dari instansi-instansi pemerintahan terkait dan setiap PWG diketuai oleh perwakilan dari Bappeda Tingkat I Propinsi. Di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, para Manajer Program Lapangan (*Field Program Manager*-FPM) dan/atau para penasihat teknis (*Technical Advisor*-TA) dan perwakilan BAPPEDA menentukan anggota PWG berdasarkan instansi-instansi yang mereka anggap perlu atau relevan untuk terlibat dalam kelompok ini. Sementara itu, di Lampung FPM bekerjasama dengan wakil-wakil *stakeholder* untuk menentukan siapa yang seharusnya dilibatkan.
4. **Kegiatan apa yang telah dilakukan oleh PWG?** PWG telah terlibat dalam sejumlah kegiatan Proyek Pesisir. Di Sulawesi Utara, PWG terlibat dalam proses pemilihan desa lokasi proyek, studi tour untuk perbandingan, pelatihan lokakarya, penyusunan profil desa lokasi proyek, dan juga peninjauan terhadap kegiatan tahun pertama dan anggaran Proyek Pesisir. Kelompok ini juga membantu Proyek Pesisir dalam penyusunan laporan Proyek Pesisir kepada Gubernur dan Bupati. Di Kalimantan Timur, PWG berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Sedangkan di Lampung, walaupun kelompok ini secara formal baru akan mulai melakukan pertemuan, anggotanya sudah terlibat dalam beberapa kegiatan Proyek Pesisir, seperti pelatihan, pembuatan *profile* pesisir Propinsi Lampung dan proses pembentukan PWG.
5. **Sejauh mana PWG berperan efektif?** Di Sulawesi Utara kelompok ini melakukan pertemuan bulanan dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan

proyek yang spesifik, seperti pemilihan desa lokasi proyek. Akhir-akhir ini pertemuan rutin PWG menjadi sekali setiap 3 bulan dan partisipasinya cenderung bersifat pasif. Meskipun peran kelompok ini dalam koordinasi pelaksanaan proyek di tahun pertama (1997/1998) sangat penting, namun ternyata sulit untuk menemukan bagaimana caranya agar kelompok ini dapat terlibat lebih aktif dan efektif di tahun selanjutnya. Sementara itu, pada tahun ke 2 (1998/1999) di Sulawesi Utara *Kabupaten Task Force* (KTF) dibentuk. Tugas KTF ditekankan pada pengkajian dan peninjauan usulan rencana pengelolaan pesisir di tingkat desa. Saat ini PWG berubah menjadi *Provincial Advisory Group* (PAG), dengan tugas utama menyangkut kegiatan-kegiatan pengarahan, seperti diskusi-diskusi kebijakan untuk penerapan strategi pengelolaan pesisir tingkat desa secara lebih luas (*scaling up*) dan kegiatan lain lebih sesuai dengan kapasitas dan peranannya sebagai tim pengarah. Di Kalimantan Timur, *Provincial Steering Committee* (PSC) dan *Provincial Task Force* (PTF) baru saja dibentuk dan mereka telah mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknis dan pelatihan. Di Lampung, para calon anggota *Provincial Steering Committee* (PSC) telah mulai membantu dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan program Proyek Pesisir setempat.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman *provincial working group*:

6. Tim penasihat atau tim pengarah seharusnya dibentuk dalam waktu yang tepat agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kegiatan utama proyek, seperti pemilihan lokasi lapang dan lokasi contoh. Namun tidak cukup jelas apakah tim semacam ini selalu diperlukan. Jika tim ini diperlukan maka tim ini harus dibentuk.
7. Sebuah surat keputusan (SK) dari Gubernur diperlukan untuk memberi legitimasi atau kewenangan bagi lembaga koordinasi propinsi semacam PWG. Namun SK tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas instansi pemerintahan.

8. Jika pengusaha swasta dan LSM diinginkan untuk berpartisipasi dalam kelompok ini, Surat Keputusan Gubernur mungkin tidak selalu sesuai. Suatu kelompok lain yang sifatnya informal dimana anggotanya mencakup berbagai macam *stakeholder* mungkin lebih diminati. Namun aturan main dan pengambilan keputusan dalam kelompok lain ini mungkin harus dirancang berbeda. Pemilihan wakil-wakil dari lembaga-lembaga yang bukan instansi pemerintahan membutuhkan suatu pemikiran yang hati-hati mengingat satu lembaga belum tentu dianggap mewakili lembaga-lembaga lainnya.

KEGIATAN *MONITORING*

1. **Apa yang dimaksud dengan kegiatan *monitoring*?** Kegiatan *monitoring* adalah kegiatan yang secara sistematis melakukan pendokumentasian terhadap upaya-upaya yang dilakukan Proyek Pesisir, baik pada skala proyek secara keseluruhan maupun pada skala program di setiap skala geografi yang relevan.
2. **Apa tujuan kegiatan *monitoring*?** Tujuan kegiatan *monitoring* adalah:
 - a) mengidentifikasi perubahan-perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan yang memiliki kemungkinan berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir;
 - b) untuk memastikan kegiatan-kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
 - c) untuk mendokumentasikan kegiatan yang menyangkut penyusunan peraturan-peraturan (*governance activities*), termasuk persiapan rencana-rencana dan peraturan lokal, upaya penegakan hukum atau aturan dan kepatuhan terhadap hukum atau aturan tersebut;
 - d) mengumpulkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi keperluan para Program Manajer Lapang dan pemberi dana; dan
 - e) mengumpulkan informasi untuk keperluan kegiatan pembelajaran (*learning activity*), penyesuaian atau adaptasi rancangan proyek dan pengangkatan model-model yang potensial diterapkan di tempat lain.

3. **Jenis kegiatan monitoring apa saja yang sudah dilakukan oleh Proyek Pesisir?** Seperti sudah dilakukan oleh Proyek Pesisir, kegiatan monitoring mencakup: a) kegiatan monitoring jangka panjang terhadap perubahan kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan tingkat desa; b) perbandingan hasil awal, hasil antara (*intermediate output*) dan *output* akhir dari kegiatan-kegiatan khusus dengan tingkat pencapaian yang diharapkan (*benchmarking*); c) ringkasan kegiatan Proyek Pesisir untuk setiap lokasi proyek dan kantor pusat proyek (seperti diperintahkan oleh USAID/*Project Monitoring Performance*). Kegiatan *monitoring* di tingkat desa mencakup pelaksanaan survey-survey dan pengamatan sistematis yang dilakukan oleh Proyek Pesisir serta kegiatan *monitoring* yang melibatkan anggota masyarakat.

4. **Bagaimana status kegiatan monitoring?** Saat ini: a) kegiatan *monitoring* masyarakat secara sistematis tengah berlangsung di desa-desa lokasi proyek di Sulawesi Utara; b) kegiatan *monitoring* yang melibatkan masyarakat desa telah berlangsung di empat desa lokasi proyek; c) sebuah sistem telah dirancang dan tersedia untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang semua kegiatan proyek (*Performance Monitoring Plan - PMP*). Tidak ada rencana sistematis untuk memonitor setiap kegiatan proyek di tingkat propinsi. Namun terdapat banyak informasi sudah dikumpulkan atau didokumentasikan di Sulawesi Utara dalam bentuk laporan bulanan para petugas penyuluh lapangan, selain dokumen-dokumen proyek lainnya. Dalam tahun kedua (1998/1999), *Learning Team* telah memusatkan perhatiannya untuk memonitor kegiatan-kegiatan tingkat desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Informasi untuk kegiatan pembelajaran ini diperoleh dari laporan-laporan lokakarya, wawancara dengan para staf lapangan dan laporan-laporan yang disusun oleh *Learning Team*.

5. **Bagaimana variabel-variabel yang dimonitor tersebut ditentukan?** Di Sulawesi Utara, staf proyek dan konsultan teknis menentukan variabel-variabel yang akan untuk *baseline survey* dan *monitoring*. Mereka juga menentukan variabel-variabel untuk kegiatan *monitoring* lingkungan yang

dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Variabel-variabel PMP ditentukan oleh USAID dengan konsultasi kepada *Chief of Party*. Namun, data untuk PMP dikumpulkan oleh staf proyek dan disatukan oleh staf *Learning Team*. Staf Proyek Pesisir menemukan sejumlah variabel-variabel PMP, seperti jumlah orang yang berpartisipasi, sangat berguna.

6. **Prosedur apa yang diterapkan untuk memastikan kebenaran data?** Di Sulawesi Utara, prosedur yang jelas telah dibuat untuk mengumpulkan dan pengolahan data dari kegiatan monitoring. Beberapa prosedur untuk memonitor aspek sosio-ekonomi dan kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat sudah diuji-coba di desa lokasi proyek di Sulawesi Utara. Prosedur-prosedur ini telah diterapkan dengan hati-hati. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengolahan data memerlukan waktu yang cukup banyak.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman pelaksanaan kegiatan *monitoring*:

7. Kegiatan *monitoring* terbukti merupakan kegiatan penting dalam hal meningkatkan nilai pertanggungjawaban (*accountability*) dan kinerja Proyek Pesisir serta mendukung proses pembelajaran. Namun, pentingnya kegiatan monitoring ini kadang tidak disadari oleh staf Proyek Pesisir. Di Sulawesi, pengalaman Proyek Pesisir menunjukkan bahwa kegiatan monitoring ini memerlukan waktu yang relatif besar dan sumberdaya untuk merancang sistem monitoring, prosedur, melaksanakan kegiatan pelatihan staf, pengumpulan dan pengolahan data.

8. Di Sulawesi Utara, informasi baseline terbukti berguna bagi penyusunan profil setiap lokasi proyek.

9. Dalam penyusunan dan perbaikan program *monitoring* untuk kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir di desa penekanan perlu dilakukan dalam hal penilaian pencapaian tujuan-tujuan antara (*intermediate objectives*). Maksud

dari *monitoring* ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana dan setiap langkah telah dilakukan secara efektif. Sebagai contoh, dalam kegiatan penanaman mangrove, apakah lokasi penanaman adalah tepat, apakah spesies yang ditanam cocok, apakah mangrove ditanam dengan tepat, apakah mangrove yang ditanam tumbuh dengan baik atau mati, dan lain-lain?

10. Kegiatan *monitoring* yang efisien memerlukan diketahuinya indikator kunci yang dapat dimonitor secara intensif. Namun untuk memonitor pengelolaan pesisir di tingkat desa, hingga kini belum ada kesepakatan tentang apa indikator kunci ini.

TAHAP SELANJUTNYA

Pada tahun ketiga (1999/2000), *Learning Team* akan melanjutkan kegiatan pendokumentasian di lokasi-lokasi proyek. Rancangan yang ada sekarang adalah setiap anggota tertentu *Learning Team* akan memusatkan perhatiannya untuk mendokumentasikan kegiatan Proyek Pesisir di salah satu

dari tiga lokasi proyek. Hingga saat ini, topik isu yang akan didokumentasikan belum ditentukan. Namun ada keinginan untuk mendokumentasikan satu topik yang umum bagi semua tiga lokasi proyek dan beberapa topik lain yang dapat umum ataupun tidak umum di masing-masing lokasi-lokasi proyek. Dalam *Annual Staff Meeting* yang diadakan di awal Mei 1999, para staf lapang dan anggota *Learning Team* melihat bahwa kegiatan pembelajaran (*learning activity*) adalah tanggungjawab proyek secara keseluruhan yang perlu melibatkan kerjasama staf lapangan dan staf IPB dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, staf lapang akan terlibat merupakan rekan kerja utama (*partner*) dalam proses pendokumentasian dan verifikasi pengalaman lapang, pengangkatan pengalaman dan penyebarluasan pengalaman dari pengalaman lapang. Sekali lagi, suatu lokakarya direncanakan akan diselenggarakan pada awal tahun 2000. Namun, tim 'besar' pembelajaran (*large learning group*) ini, yang terdiri dari para staf lapangan dan PKSPL IPB, terlebih dahulu akan menyusun dokumentasi pengalaman Proyek Pesisir dan melakukan verifikasinya lalu menggali pelajaran dari pengalaman tersebut sebelum menyebarkannya kepada kelompok yang lebih besar (para *partner* proyek dan *stakeholder*).

EXECUTIVE SUMMARY

The Coastal Resources Management Project (Proyek Pesisir), an initiative of USAID and the Government of Indonesia, and managed by the Coastal Resources Center of the University of Rhode Island, is developing pilot coastal management projects at three provincial locations in Indonesia. In Sulawesi Utara, three community-level field sites were established in 1997. Pilot projects were initiated in Balikpapan and Lampung in 1998.

In 1998, Proyek Pesisir contracted with the Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS), Bogor Agricultural University to document planning and management experiences at the three provincial field locations. These documentation efforts are part of establishing a base of knowledge and experience that can be used for creating lessons that might be more broadly applicable to coastal management throughout the country and for community coastal management endeavors elsewhere. Staff from the Division of Coastal and Marine Management at CCMRS formed a 'Learning Team' to document coastal management and planning activities at the three pilot provincial sites. From a list of possible planning and management activities to investigate, they chose three main topics in consultation with project field staff and the Chief of Party: early actions, project monitoring, and provincial working groups. For each of these topics, a paper was prepared summarizing activities undertaken and problems encountered. (Three papers were prepared on early actions in order to document three different initiatives). These accounts were based on reports generated by field staff as well as interviews and observations conducted by members of the Learning Team. Preliminary drafts of the Learning Team papers were presented at a workshop in March 1999. Based on comments received during and after the workshop, the papers were revised. These revised papers are included in this report.

In May, 1999, members of the Learning Team met with Brian Crawford and Brian Needham of the Coastal Resources Center, University of Rhode Island; Kem Lowry of the Department of Urban and Regional Planning, University of Hawai'i and Graham Usher, consultant to Proyek Pesisir, Jakarta

to review the papers and to identify findings and possible 'lessons' from the experiences described in these papers. These findings and lessons are outlined below for each of the three topics.

EARLY ACTIONS IN SULAWESI UTARA

1. **What are 'early actions'?** 'Early actions' are coastal management activities that are undertaken prior to the development of a management plan. Typically, they are simple short-term actions which attempt to address a simple but important coastal management issue.
2. **Why do 'early actions'?** 'Early actions' are undertaken in order to: a) introduce the management project to the community; b) build support for the project and long-term planning and management; and c) test implementation on a small scale.
3. **Who designs and initiates 'early actions'?** The community or the project may initiate 'early actions'. Communities may choose initiatives, but the process of selection usually takes longer. Whether chosen by project staff or community residents, community ownership of the actions is essential for success.
4. **How are 'early actions' chosen?** 'Early actions' are selected on the basis of explicit criteria. In Sulawesi Utara those criteria included: activities needed to resolve local problems of coastal management; short term actions which could be completed in a matter of a few months; actions which had community in-kind or financial contributions; and actions involving widespread community participation and support. In Sulawesi Utara, all early actions were chosen by the community, or by the project in consultation with the community.

5. **What actions were chosen?** In Sulawesi Utara, ‘early actions’ at specific sites included mangrove-replanting, crown of thorns clean-ups, training of coral reef and beach monitors, construction of community centers and MCK (communal toilet and sanitary facilities).
6. **How were ‘early actions’ implemented? How were they funded?** Communities or project Field Extension Officers working with communities implemented ‘early actions’. All early actions had community contributions, usually in the form of labor, provision of materials, or use of equipment such as boats. To the extent that new resources were required, most were provided by the project. More recently, BAPPEDA has also made contributions of resources. When project grants were made to communities, they managed funds and reported on expenditures to the project.
7. **How is the success of ‘early actions’ assessed?** While it is too early to assess the effectiveness and sustainability of all ‘early actions’, intermediate implementation benchmarks (e.g. forming monitoring groups) are being met. The ultimate effectiveness of early actions should be assessed in terms of their specific goals, the extent to which they successfully introduce the project and build community support, and allow for tests of implementation strategies. These criteria are difficult to measure.

Some Possible Lessons:

8. While ‘early actions’ have proven to be a useful way to initiate coastal management projects in Sulawesi Utara, too much attention to ‘early actions’ can distract from more comprehensive planning efforts.
9. ‘Early actions’ demonstrated concrete achievements and encouraged community residents to support longer-term projects, the results of which will not be immediately visible.
10. Successful ‘early actions’ require both community support and assessment of technical feasibility, as evidenced by the failure of the community-initiated mangrove replanting in Bentenan.
11. Some types of ‘early actions’, particularly those involving construction of infrastructure (e.g. MCK, information center and water systems) require carefully designed community organizational arrangements to insure continuing high quality operation and maintenance. (There is extensive experience and theory regarding how to design institutions to insure sustainable collective community activities such as the operation and maintenance of community infrastructure.)
12. Some ‘early actions’ must be preceded by extensive public education to ensure community understanding and support.

PROVINCIAL WORKING GROUPS

1. **What are provincial working groups?** Provincial working groups are ad hoc committees composed primarily of staffs of government agencies which have jurisdictional responsibilities in coastal areas.
2. **What were the roles and responsibilities of provincial working groups?** Provincial working groups were formed in order to: a) provide policy guidance to Project Pesisir; b) coordinate and assist with project activities within the province, c) increase understanding of integrated coastal management project activities among government organizations and, in some cases, private and NGO stakeholders; and d) facilitate communication and understanding among agency staff and other stakeholders. This provincial institution has different names in each of the three provinces of Project Pesisir: Provincial Working Group (PWG - Sulawesi Utara), Provincial Task Force and Provincial Steering Committee (PTF and PSC - Kalimantan Timur) and Provincial Steering Committee (PSC - Lampung).

3. **How were members of provincial working groups selected?** The composition of groups is different at each site, but all groups include government representatives and all are chaired by BAPPEDA representatives. In Sulawesi Utara and Kalimantan Timur, the Field Project Manager and/or technical advisor, and BAPPEDA representatives decided membership by designating the agencies they wanted included in the groups. At Lampung, the Field Project Management worked with stakeholder representatives to decide who should be included.
4. **What activities have been undertaken by the PWG?** Provincial Working Groups have been involved in a number of activities. In Sulawesi Utara, the PWG was involved in site selection, participated in study tours, workshop training, regular profiling, as well as review of year 1 activities and budgeting. They also assisted with reports to the governor and bupati. In the Kalimantan Timur site, the group has participated in training. At Lampung, the group has just begun to meet.
5. **How effective have the PWG been?** In Sulawesi Utara the group met monthly and was active in specific project activities such as site selection. Recently the group has started to meet quarterly and participation has been more passive. While the group has been helpful in coordination in the first year (1997/1998), finding an effective way for them to be more actively involved has been difficult. In year 2, a Kabupaten Task Force (KTF) was formed. The emphasis of the KTF will be in reviewing draft village management plans. The PWG, now a Provincial Advisory Group (PAG), will be involved in more of an advisory capacity, such as discussions of policies for scaling up, a role more consistent with the availability of members. In Kalimantan Timur, PSC and PTF activities are just beginning and they have been involved in some technical activities and training. In Lampung, individuals who will be members of the PSC have assisted in program activities.

Some Possible Lessons

6. Advisory groups should be formed in time to participate in major project decisions such as field or demonstration site selection. It is not clear that PWG are essential. However, if they are required they should be formed.
7. An Surat Keputusan-SK (decree) from the governor is needed to give legitimacy or authority to a provincial group. However, it should not constrain responsibilities and tasks of government agencies.
8. If private sector and NGO participation is wanted in the group, then an S.K. from the governor may not always be appropriate. An informal group with broader participation may be preferable, but roles and decision-making may have to be different. Selection of non-governmental representatives needs to be given careful thought since any one organization cannot necessarily represent the others.

MONITORING

1. **What is monitoring?** Monitoring is the systematic documentation of project efforts at both the project and program scale and at all relevant spatial scales.
2. **What are the objectives of monitoring?** The objectives of monitoring are to: a) identify changes in community social, economic and environmental conditions which may relate to project activities; b) insure that project activities are implemented as designed; c) document governance activities including preparation of plans and ordinances as well as enforcement and compliance; d) provide accountability information to program managers and funders; and e) provide information for learning, project re-design and potential project replication.

3. **What types of monitoring activities have been undertaken in Proyek Pesisir?** As used in Proyek Pesisir, monitoring activities include studies of: a) long-term socio-economic and environmental trends at the village level; b) benchmarking early, intermediate and final outputs of specific projects; and c) summaries of project activities at each of the pilot sites and in the national office (as prescribed by USAID/PMP). Village level monitoring includes both systematic surveys and observations and participatory monitoring by residents.
4. **What is the current status of monitoring activities?** At present: a) systematic community monitoring is occurring at the Sulawesi Utara field sites; b) participatory monitoring is occurring in four villages within the three Sulawesi Utara field sites; and c) a system has been designed and is in place to identify, collect and disseminate information on all Proyek Pesisir activities (Performance Monitoring Plan - PMP). No systematic plan is in place for monitoring all the individual project activities at the provincial level, but in Sulawesi Utara, a great deal of information is documented in Field Extension Officer monthly reports, and other project documents. In Year 2, the Learning Team focused on village level monitoring activities in Sulawesi Utara. Information for learning is provided in periodic workshop reports, field staff interviews and reports by the IPB Learning Team.
5. **How were variables to be monitored identified?** In Sulawesi Utara, team members and technical consultants selected the variables for the baseline survey and monitoring. They also chose the variables for participatory environmental assessment by village residents. PMP variables were selected by USAID in consultation with Chief of Party. However, PMP data, such as participation rates, are collected by project staff and collated by Learning Team staff. Project staff find some but not all PMP variables useful.
6. **What procedures have been established for insuring data reliability?** In Sulawesi Utara, explicit protocols have been developed for the collection and management of monitoring data. Some of the protocols for socio-economic and participatory monitoring were first tested in Sulawesi Utara pilot projects. These protocols have been carefully followed. Data collection and management has proved to be a very time-consuming activity for staff.
- Some Possible Lessons:**
7. Monitoring is proving to be an important activity contributing to greater accountability, performance assessment and learning. However, the value of monitoring is often not immediately obvious to staff. In Sulawesi Utara, the monitoring experiences shows that a substantial amount of time and resources needs to be allocated to designing a monitoring system, developing protocols, staff training, data collection and management.
8. In Sulawesi Utara, baseline information has proved to be useful in designing issue-based profiles for sites.
9. In developing and refining monitoring programs for field sites, more emphasis needs to be placed on assessing intermediate project objectives. The purpose of such monitoring is to insure that projects are implemented appropriately and each step was carried out effectively. For example, in a mangrove replanting project, is the site chosen for replanting appropriate, has the right species of mangrove been selected, are plants planted correctly, do they survive, etc.?
10. Efficient monitoring requires the development of a few key indicators, which can be vigorously monitored. With regard to community level coastal management, there is little consensus about what these key indicators are.

NEXT STEPS

In 1999, the Learning Team will continue its documentation activities at the project sites. The current design is for specific members of the Learning Team to each concentrate on one of the three sites. The research topics have not yet been chosen, but the intention is to have at least one topic that is common to all three sites, and several others which may or may not be common between the sites.

At the Proyek Pesisir all staff meeting held in early May, 1999, field staff and members of the Learning Team recognized that project 'learning' is a project wide responsibility which needs to involve field staff as well as IPB staff in a cooperative working relationship. Hence, field staff will be involved as full partners in the process of documenting and verifying field experiences and generating and disseminating 'lessons' from field experience. Once again, a learning workshop is proposed for early 2000. However, the expanded learning team (field staff and CCMRS personnel) will develop and verify documentation of experience and generate lessons learned first, which will then be shared with a larger group of project partners and stakeholders.

PIDATO SAMBUTAN
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor

Assalamu'alaikum wr. wb.

Lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir ini merupakan peristiwa penting dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia. Disiplin ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu (*Integrated Coastal Management - ICM*) termasuk cabang pengetahuan yang masih relatif baru pada tataran global. Ilmu ini secara formal baru diakui atau ditetapkan pada tahun 1972 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, ilmu ini diperkenalkan pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya sebuah dokumen panduan (*guideline*) setebal 50 halaman, hasil kerjasama BAPPENAS, LIPI dan IPB.

Dalam 10 tahun terakhir ini di Indonesia telah ada 19 proyek pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dengan produk kebanyakan berupa konsep pengelolaan yang penerapan praktisnya masih relatif sulit ditemukan di lapangan. Dengan produk yang nyata di lapangan (*tangible*), masyarakat akan dapat melihat bahwa pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu (ICM) adalah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan sektoral (*sectoral approach*). Untuk mewujudkan penerapan konsep tersebut, Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Project*) yang diorganisir oleh Coastal Resources Center-University of Rhode Island (CRC-URI) bermitra dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) menerapkan pendekatan dua jalur (*two-track approach*), yaitu antara tataran nasional/global dengan tataran lokal di lapangan.

Pada tataran lokal, Proyek Pesisir diharapkan dapat menghasilkan teladan (*working model*) pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi daerah-daerah lain. Proyek Pesisir sedang melaksanakan program-program aksi lapangan di tiga propinsi, yaitu Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai kegiatan proyek-proyek pengelolaan terdahulu jarang ditindak-lanjuti setelah proyek-proyek tersebut

berakhir. Oleh karena itu, Proyek Pesisir mengupayakan agar program-program yang disusunnya dapat dilanjutkan atau ditindak-lanjuti oleh pemerintah dan masyarakat lokal setelah proyek ini berakhir.

Pada tataran nasional, Proyek Pesisir telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti: (1) peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) agar program-programnya dapat diterapkan sampai pada tingkat lokal; (2) kegiatan Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan pada tahun 1998; (3) kegiatan publikasi melalui website, penerbitan jurnal dan perpustakaan; (4) pembentukan jaringan kerja INCUNE (*The Indonesian Coastal University Network*) sebagai tim sinergis yang terbuka dan terkoordinasi dalam rangka penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu di Indonesia, serta (5) kegiatan pembelajaran (*learning*) melalui pendokumentasian, monitoring, evaluasi dan diseminasi pengalaman yang diperoleh dari penyelenggaraan Proyek Pesisir.

Kegiatan publikasi diarahkan untuk menciptakan suatu rujukan nasional tentang informasi yang berkaitan dengan *Integrated Coastal Management* dengan fokus utama kegiatan tidak hanya pengumpulan pustaka yang sudah dipublikasikan tetapi juga pustaka yang belum dipublikasikan (*gray literatures*), seperti laporan proyek yang serikali amat penting untuk pengkajian dan analisis pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Program INCUNE adalah sangat penting mengingat selama ini ada kecenderungan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam persoalan pengelolaan pesisir. Padahal jika ada sebuah tim kerja (*team work*) yang bekerja secara sinergis, persoalan pengelolaan pesisir akan dapat dihadapi secara lebih baik sekali. Melalui INCUNE ini diharapkan terbina keterbukaan antar para anggotanya untuk saling belajar dan melengkapi karena tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Suatu institusi pasti memiliki kelemahan (*weakness*) dan kekuatan (*strength*) sehingga kerjasama strategis perlu

dibuat untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Semoga dengan inisiatif Proyek Pesisir ini, INCUNE benar-benar merupakan terobosan (*break through*) untuk dapat mencairkan gunung es yang cenderung tertutup atau sedikit terbuka untuk dicairkan dengan baik sehingga mendukung kemajuan pengelolaan pesisir di tanah air.

Komponen yang tidak kalah pentingnya dalam Proyek Pesisir adalah kegiatan pembelajaran melalui pendokumentasian yang dikoordinasikan oleh *Learning Team*. Selama ini proyek-proyek pengelolaan berjangka 5 tahun atau bahkan 10 tahun masih belum dipelajari secara intensif apa sesungguhnya yang telah dilakukan oleh proyek-proyek tersebut. Padahal penggalian pengalaman melalui proses pembelajaran dapat dijadikan landasan untuk perbaikan pengelolaan pesisir di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut saya lokakarya pada hari ini sangat penting. Sepanjang pengetahuan saya komponen mengenai pendokumentasian kegiatan proyek baru kali ini dilakukan. Dengan latar belakang semacam itu, *Learning Team* diharapkan

dapat menyampaikan hasil kegiatannya atau saling tukar menukar pengalamannya dengan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Dari lokakarya ini dimana terjadi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pesisir di tanah air, saya juga berharap di masa yang akan datang tidak perlu lagi terjadi tumpang tindih kegiatan di antara proyek-proyek pengelolaan pesisir. Misalnya, suatu proyek baru akan merencanakan penyusunan sebuah pedoman untuk menganalisis aspek sosial-ekonomi masyarakat pantai padahal Proyek Pesisir sudah secara serius mengeluarkan waktu dan dana yang cukup banyak untuk penulisan buku serupa yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh proyek-proyek lain. Menurut hemat saya, dana dari proyek lain itu sebaiknya digunakan untuk pelaksanaan program-program lain yang dipandang relevan.

Demikian sambutan ini saya akhiri dan mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana hingga lokakarya ini terselenggara dengan baik.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bogor, 1 Maret 1999

Dr. Ir.H. Rokhmin Dahuri, MS
Kepala PKSPL-IPB

PIDATO PENUTUPAN *Project Leader of Proyek Pesisir*

Para hadirin dan rekan-rekan yang terhormat,

Adalah merupakan kebanggaan bagi saya untuk dapat menghadiri lokakarya hari ini. Saya sangat terkesan dengan materi yang dipresentasikan oleh rekan-rekan dari *Learning Team* dan juga dengan diskusi yang berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada Dr. Dietrich Bengen - Koordinator Proyek Pesisir di IPB, kepada Dr. Fedi Sondita - Koordinator *Learning Team* dan kepada para pembina *Learning Team*: Dr. Kem Lowry dan Brian Needham dan kepada pembina teknis lokal, Graham Usher, atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam mendukung program pembelajaran ini (*learning program*). Saya juga sangat berterimakasih kepada para staf program lapangan kami, kepada masyarakat luas dan kepada rekan kerja dari Pemerintah Indonesia yang telah memberikan masukan dan ide-ide yang sampai saat ini sangat berperan besar dalam pelaksanaan kerja Proyek Pesisir.

Lokakarya yang diadakan hari ini merupakan kesempatan yang sangat tepat dan penting untuk merenungkan pengalaman dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Proyek Pesisir selama 2 tahun yang telah lalu dan untuk mengetahui apakah hasil kerja *Learning Team* yang telah kita dukung dengan usaha yang tidak sedikit telah mencapai hasil yang baik. Sebelum menyimpulkan informasi yang kita peroleh hari ini, secara singkat saya ingin sekali lagi mengajak kita semua untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan program pembelajaran dan mengapa program ini sangat penting dalam kerangka kerja Proyek Pesisir.

Pada tahun 1995, saat USAID tertarik untuk mendukung *Coastal Resources Management Project* (CRMP), tim pembentuk yang antara lain terdiri dari, Lynne Hale, Brian Crawford, Kem Lowry, Alan White dan Rokhmin Dahuri dari IPB, membuat komitmen yang sangat penting. Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir atau Proyek Pesisir (CRMP) Indonesia, tidak seperti proyek pengelolaan sumberdaya lainnya, akan memberikan komitmen yang jelas untuk

pembelajaran dan mendokumentasikan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan program.

Secara konsep, komitmen tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang sangat mudah dilakukan, tapi pada saat kita membahas apa yang kita maksud dengan pembelajaran dan bagaimana cara kita untuk melakukannya, banyak sekali masalah yang tidak terpecahkan yang ditemui. *Learning Team* menghabiskan sebagian besar waktu dalam tahun kerja kedua untuk membahas masalah-masalah tersebut, membaca dan membaca ulang literatur yang seringkali tidak tersedia mengenai permasalahan yang ada dan berulang kali membahas apa yang seharusnya menjadi tujuan dari program pembelajaran. Dalam kunjungan Kem Lowry dan Brian Needham pada pertengahan tahun 1998, diperoleh suatu tujuan dan metode yang akan dipergunakan dan dimulailah pemilihan dari topik yang disajikan hari ini. Selama 6 bulan terakhir, upaya yang dilakukan untuk pembelajaran merupakan hasil kerjasama yang baik antara staf PKSPL-IPB dan staf lapangan Proyek Pesisir serta mitra kerja lokal.

Secara jelas, sebagaimana telah diungkapkan dalam presentasi hari ini, kita telah mengetahui banyak mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia. sedikit lebih banyak dari proyek-proyek yang sedang dilaksanakan akhir-akhir ini, termasuk inisiatif yang lebih besar, seperti *Marine Resources Evaluation Project* (MREP), kita mengerti sekarang metode apa yang dapat berhasil, dan yang gagal serta apa yang menjadi penyebabnya dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Saya tidak menganut ajaran tertentu, tapi saya lebih menekankan pada pentingnya pengetahuan baru yang kita dapatkan tersebut; dari hasil seminar yang kita peroleh hari ini, kita sekarang menjadi seorang pengelola pesisir yang lebih terampil dan handal. Kemajuan seperti ini - dalam kapasitas kita sebagai orang profesional - sangat penting bila kita menghendaki pengelolaan pesisir dapat diterima sebagai alat yang tepat untuk pembangunan wilayah

pesisir Indonesia yang sangat luas. Peranan Proyek Pesisir sebagai pemimpin dalam membangun kapasitas profesional telah menjadi jelas hari ini, namun hanya akan terbukti bila konsep tersebut diimplementasikan dengan baik. Terlalu banyak inisiatif pengelolaan pesisir di Indonesia gagal untuk belajar dari pengalaman/gagal untuk menerapkan apa yang telah dipelajari.

Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh *Learning Team* di masa yang akan datang. Seperti yang anda semua ketahui, dukungan yang berarti dari USAID untuk Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB akan berlanjut di tahun yang akan datang. Seperti telah diketahui dalam seminar hari ini, kita sedang menangani banyak sekali krisis kapasitas di dalam PKSPL-IPB yang pada akhirnya akan tersebar pada institusi lainnya. Sebagai salah satu contoh, dalam dua minggu yang akan datang, kami akan mengadakan peresmian INCUNE (*The Indonesian Coastal Universities Network*) dimana kami akan mengundang 10 universitas di Indonesia untuk bergabung dengan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB guna mempelajari lebih lanjut mengenai manajemen dan mulai mendukung inisiatif lokal menggunakan model dan pengalaman yang diperoleh dari Proyek Pesisir.

Dukungan kami untuk *Learning Team* dalam Tahun Ketiga akan dapat meningkatkan kapasitas pembelajaran dan menggabungkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh diwaktu yang lalu. Yang terpenting, kami akan mendorong *Learning Team* untuk menjangkau mitra kerja yang baru (khususnya inisiatif COREMAP) dan untuk mempersiapkan perangkat dan garis pedoman yang diperlukan oleh staf lapangan dan mitra kerja Proyek Pesisir untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran mereka. Secara khusus saya berharap para staf lapangan kami dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk bekerjasama dengan *Learning Team* dalam menilai dan mendokumentasikan pengalaman yang mereka peroleh dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan cara mereka sendiri.

Belajar adalah suatu sikap manusia yang dimiliki sejak lahir. Sejak lahir kita belajar untuk melakukan banyak hal, umumnya dengan melakukan percobaan-percobaan. Ketika USAID meminta saya untuk menjelaskan mengapa kami menekankan kepada program pembelajaran dimana pada saat yang sama, dukungan ekonomi, reformasi pemerintahan dan aktivitas jaringan pengamanan sosial lainnya juga membutuhkan dukungan yang tidak sedikit, jawaban sederhana saya adalah bila Indonesia gagal untuk belajar, maka akan gagal pula untuk memulihkan situasi kembali seperti keadaan semula.

Ada pepatah mengatakan ‘Siapa yang melupakan masa lalu akan dikutuk untuk mengulangnya kembali’. Dalam pengelolaan pesisir kita tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama - lingkungan pesisir dan masyarakat pesisir kita berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dengan belajar bersama, kami berharap dapat membantu mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama dan belajar untuk mengembangkan metode yang tepat untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi anda hari ini. Saya akan memastikan bahwa semua dokumen dan hasil dari pembicaraan kita hari ini terdokumentasi dengan baik dan dapat diperoleh dengan mudah.

Bogor, 1 Maret 1999

Ian M. Dutton
CRC-URI CRMP Project Leader

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997-1999

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997-1999

**Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian
Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 1 Maret 1999**

Editor:

**M. Fedi A. Sondita
Neviaty P. Zamani
Burhanuddin
Amiruddin Tahir
Bambang Haryanto**

Diterbitkan oleh:

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

dan

**PROYEK PESISIR - COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
COASTAL RESOURCES CENTER - UNIVERSITY OF RHODE ISLAND**

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997-1999

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997-1999

**Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian
Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor
1 Maret 1999**

Citation:

M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL- Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island

CREDITS

All Cover Photos : Tanyo Bangun

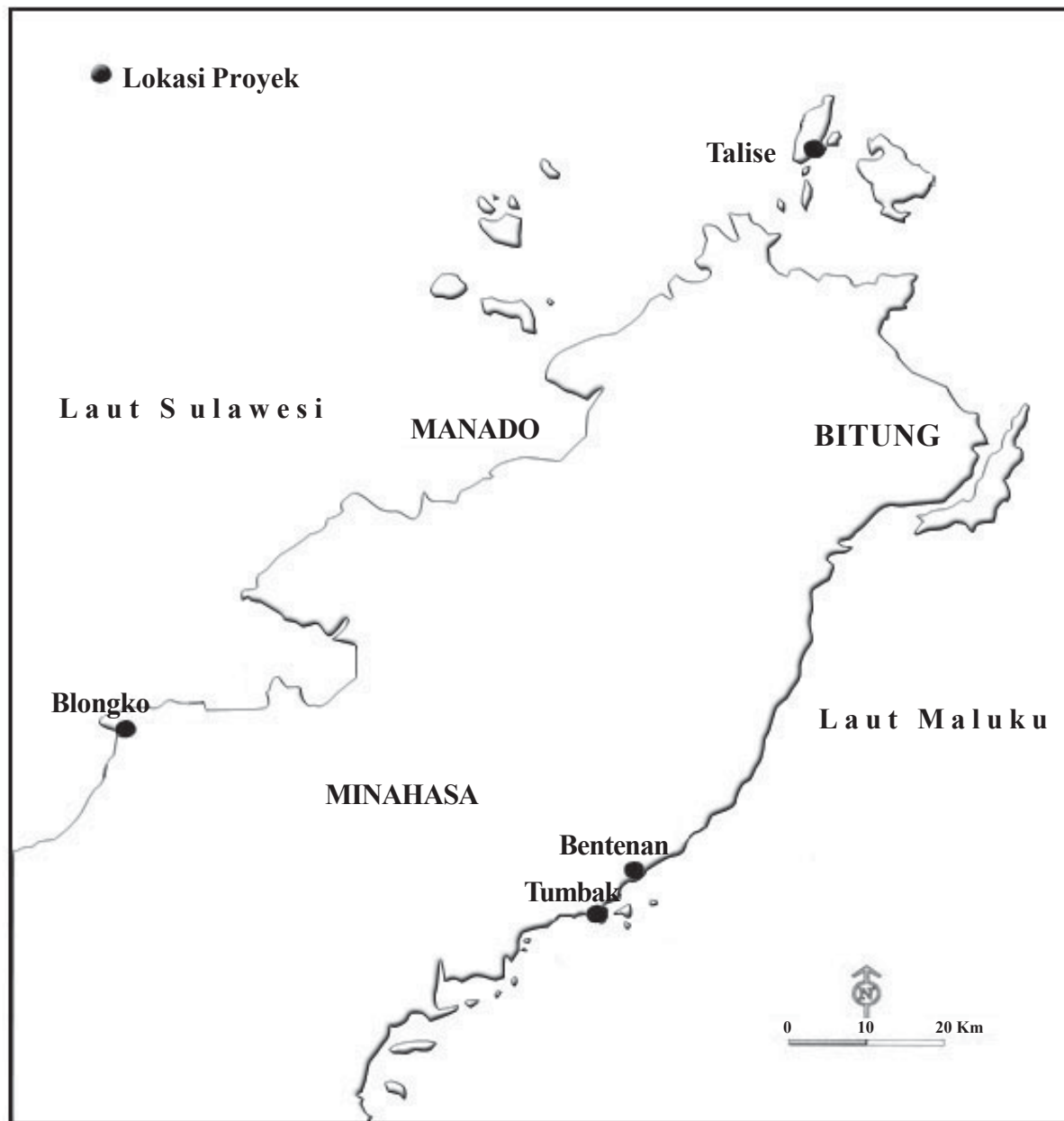
Map : Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

Layout : Patus Legowo, Pepen S. Abdullah

Style Editor : Learning Team

ISBN : 979-95617-52

Funding for preparation and printing of this document was provided by USAID as part of the USAID/BAPPENAS Natural Resources Management Program and the USAID-CRC/URI Coastal Resources Management (CRM) Program



Peta desa lokasi Proyek Pesisir di Sulawesi Utara

PROSES KERJA LEARNING TEAM PADA TAHUN 1998/1999 DALAM KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PROYEK PESISIR

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani,
Bambang Haryanto, Amiruddin Tahir, Burhanuddin

PENGANTAR

Dalam rangka pendokumentasian dan juga penyebarluasan kegiatan Proyek Pesisir, sebuah tim yang disebut *Learning Team* dibentuk untuk bekerja di bawah kendali Koordinator Proyek Pesisir PKSPL-IPB. Pembentukan tim ini didasari oleh kebutuhan akan perlunya berbagai pengalaman dalam pengelolaan pesisir secara terpadu. Sampai sejauh ini pengalaman proyek proyek pesisir yang ada atau yang pernah ada di Indonesia dirasakan masih kurang didokumentasikan dan disebarluaskan secara luas padahal pengalaman tersebut sangat penting bagi penyusunan proyek baru guna menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek sebelumnya. Dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan tersebut, Proyek Pesisir melalui tim tersebut melakukan kegiatan pendokumentasian dalam rangka mengambil pelajaran atau pengalaman yang bermanfaat untuk kemudian disebarluaskan ke berbagai kalangan, mulai dari Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha dan para *stakeholder* kawasan pesisir lainnya. Dari pendokumentasian yang dilakukan oleh *Learning Team* ini diharapkan akan diperoleh bahan masukan dan pengalaman berharga (*lessons learned*) bagi proyek-proyek serupa sehingga tercipta kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien.

Secara umum proses dan alur kerja *Learning Team* sebagai pelaksana pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir dapat dibagi menjadi tiga tahap kegiatan utama, yaitu persiapan, implementasi dan diseminasi serta evaluasi (Gambar-1). Di dalam masing-masing tahap tersebut terdapat juga rangkaian kerja atau tahapan lain. Tahap persiapan dilakukan selama 4 bulan, mulai

dari Mei hingga Agustus 1998; tahap implementasi berlangsung sekitar 6 bulan, mulai dari September 1998 hingga Februari 1999; tahap diseminasi dan evaluasi berlangsung sekitar 2 bulan, mulai Maret hingga April 1999.

1. TAHAP PERSIAPAN

Dalam tahap persiapan, urutan kegiatan yang dilakukan selama persiapan adalah (1) pemahaman konsep pembelajaran (*learning*) secara mandiri oleh *Learning Team*, (2) konsultasi dan bimbingan dari para *Technical Advisor - TA*), (3) penawaran pilihan topik isu yang akan dipelajari atau didokumentasikan, (4) pelingkupan (*scoping*) dan (5) pemilihan topik isu yang akan dipelajari atau didokumentasikan.

1.1. Pemahaman konsep pembelajaran

Pada tahap ini *Learning Team* melakukan pengkajian terhadap sejumlah dokumen Proyek Pesisir, seperti *Workplan Year 1*, *Workplan Year 2* dan *Self Assessment Manual*, untuk meningkatkan kemampuan dan penyamaan persepsi para anggota tim tentang konsep pembelajaran. Hal ini dilakukan karena konsep pembelajaran, khususnya untuk kegiatan seperti Proyek Pesisir di Indonesia, masih relatif baru dan juga penerapan konsep pembelajaran ini di Indonesia baru dilakukan oleh Proyek Pesisir. Pengkajian dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan diskusi-diskusi internal secara rutin setiap minggu. Berdasarkan hasil kajian dan diskusi tersebut, *Learning Team* mencoba menyusun kerangka kerja *monitoring (monitoring framework)* dan rencana kerja (*action plan*) yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan *Learning*

Team (Lampiran-1). Kerangka kerja ini telah disajikan dalam Pertemuan Staf Tahunan Proyek Pesisir (*Annual Staff Meeting*) yang diadakan di Lampung pada tanggal 14-18 Juli 1998.

1.2. Konsultasi dan bimbingan dari *Technical advisor*

Setelah pertemuan staf di Lampung, selanjutnya *Learning Team* berkonsultasi dengan 2 orang *technical advisor*, yaitu Dr. Kem Lowry dan Brian Needham, pada tanggal 13-18 Agustus 1998. Materi yang didiskusikan difokuskan pada metode yang akan digunakan oleh *Learning Team* dalam melakukan pendokumentasian, mempertegas tugas dan fungsi *Learning Team*, dan berbagai pilihan topik isu yang perlu didokumentasikan. Hasil konsultasi ini kemudian dijadikan acuan pelaksanaan tugas *Learning Team* pada tahun kedua (Lampiran-2).

1.3. Identifikasi obyek

Pada tahap ini, *Learning Team* mencoba mengidentifikasi dan menyusun topik isu pendokumentasian. Topik-topik isu ini berupa jenis kegiatan atau kasus-kasus yang dipandang penting untuk didokumentasikan. Penentuan pilihan obyek ini sangat terkait erat dengan isu, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir di masing-masing propinsi lokasi proyek. Dari tahap ini, *Learning Team* berhasil mengidentifikasi 10 topik isu pendokumentasian (Lampiran-3).

1.4. Pelingkupan dan penetapan obyek pendokumentasian

Kesepuluh topik isu yang diidentifikasi di atas, kemudian disebarluaskan kepada seluruh staf Proyek Pesisir melalui mekanisme yang tersedia. Mereka diminta untuk memberikan tanggapan dan membuat rekomendasi atau pilihan topik isu mana yang perlu didokumentasikan. Pemilihan topik isu ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh *Learning Team*.

Berdasarkan masukan atau usulan dari manajemen Proyek Pesisir (para *Field Project Manager*, *Chief of Party* dan *Technical Advisor*), tiga topik dipilih untuk didokumentasikan. Ketiga topik tersebut adalah *early actions* dengan

studi kasus (penanaman mangrove di desa Bentenan dan Tumbak, pendidikan lingkungan hidup, pengambilan bintang laut serta pelatihan *monitoring* garis pantai dan terumbu karang, Kelompok Kerja Propinsi (*Provincial Working Group*) dan pemantauan (*Monitoring*).

2. TAHAP IMPLEMENTASI

Dalam tahap implementasi, kegiatan *Learning Team* secara berurutan adalah: (1) penyusunan proposal, (2) kajian pustaka, (3) kunjungan lapang, (4) pengiriman draft laporan, dan (5) penulisan makalah lokakarya. Dalam tahap ini proses konsultasi dan komunikasi dengan staf di lapang sudah diupayakan secara intensif untuk mendapatkan masukan, baik untuk penyusunan proposal maupun penulisan makalah.

2.1. Penyusunan proposal

Setelah Proyek Pesisir menetapkan topik isu dari kegiatan atau kasus yang akan didokumentasikan, *Learning Team* menyusun usulan atau proposal pendokumentasian. Proposal ini pada intinya memuat tujuan dan alasan dilakukannya pendokumentasian suatu obyek, periode atau lama waktu pendokumentasian, rencana kerja *Learning Team*, responden yang akan dihubungi dan daftar dokumen yang akan dikaji atau dipelajari. Proposal ini dilengkapi dengan sejumlah pertanyaan spesifik untuk setiap topik isu yang akan didokumentasikan. Proposal tersebut selanjutnya disebarluaskan kepada para *Field Project Manager* dan *Chief of Party* melalui mekanisme yang ada. Tujuan penyebarluasan ini adalah untuk mendapatkan komentar, saran dan masukan sekaligus memperkenalkan kegiatan pendokumentasian. Pengenalan kegiatan ini dirasa sangat perlu mengingat keterlibatan para staf Proyek Pesisir akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini. Proposal kegiatan *Learning Team* untuk mendokumentasikan ketiga topik isu terpilih dapat dilihat pada Lampiran-4.

2.2. Kajian pustaka

Pada tahap ini, *Learning Team* mempelajari, mengkaji dan membahas setiap dokumen yang telah dihasilkan oleh Proyek Pesisir, khususnya Proyek

Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam proposal. Dokumen-dokumen yang mendapat prioritas untuk dikaji secara intensif adalah laporan bulanan para penyuluh lapangan (*Field Extension Officer* - FEO) dan makalah yang dibuat oleh staf Proyek Pesisir ataupun para *Technical Advisor*. Laporan bulanan FEO memberikan perkembangan setiap program atau kegiatan yang dilakukan di setiap lokasi proyek sebagai basis kegiatan PP SULUT. Sebagai pendahuluan dalam pengkajian ini, *Learning Team* menyusun rangkuman dokumentasi suatu topik isu tanpa struktur tertentu, sebagaimana tertulis dalam setiap laporan bulanan tersebut. Selanjutnya *Learning Team* menyusun dokumentasi berdasarkan alur sesuai dengan daftar pertanyaan yang dimuat dalam proposal. Setelah itu, *Learning Team* menyempurnakan dokumentasi hasil kajian pustaka ini dengan memasukkan informasi berdasarkan jawaban para staf Proyek Pesisir di lokasi proyek terhadap pertanyaan dalam proposal yang telah dikirim sebelumnya.

Hasil kajian pustaka yang telah disempurnakan ini selanjutnya dikirimkan kembali ke *Field Project Manager* (FPM) PP SULUT untuk dibahas lebih lanjut di antara para staf PP SULUT, seperti untuk memeriksa kembali apakah dokumentasi sementara tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, apakah ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Dalam dokumentasi sementara tersebut juga *Learning Team* mencantumkan pertanyaan yang belum terjawab ataupun pertanyaan lanjutan yang timbul dari informasi yang terkumpul.

2.3. Kunjungan lapang

Pada tahap ini, *Learning Team* melakukan kunjungan lapang untuk melakukan verifikasi informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan mengamati langsung serta mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari informasi yang terkumpul. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22-28 November 1998. Kunjungan lapang tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tidak hanya dari para staf Proyek Pesisir, tetapi juga dari anggota masyarakat yang terlibat, staf instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil kunjungan lapang ini kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen hasil kunjungan

lapang, misalnya laporan yang berjudul "Pendokumentasian Kegiatan *Provincial Working Group* (PWG) di Sulawesi Utara: Hasil wawancara dan observasi di lapang". Draft dokumen untuk setiap obyek pendokumentasian ini dikonsultasikan dengan FPM dan staf Proyek Pesisir Sulawesi Utara untuk diperiksa. Kontak melalui telepon dan *electronic mail* senantiasa dilakukan dengan para staf Proyek Pesisir.

2.4. Pengiriman draft

Proses ini merupakan tahap konsultasi ataupun verifikasi *Learning Team* terhadap dokumentasi yang dibuatnya. Setiap dokumen yang dihasilkan oleh *Learning Team*, baik hasil kajian pustaka maupun kunjungan lapang senantiasa dikirimkan kembali ke FPM untuk mendapatkan masukan ataupun komentar. Hal ini dimaksudkan agar isi dari setiap dokumentasi yang dibuat *Learning Team* benar-benar akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2.5. Penulisan makalah

Pada tahap ini, *Learning Team* menulis makalah yang bahannya diambil dari hasil kajian pustaka dan kunjungan lapang yang telah dikonsultasikan dengan para staf Proyek Pesisir yang bersangkutan. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk menyajikan hasil pendokumentasian *Learning Team* dalam format yang lebih mudah dipahami oleh khalayak luas mengingat makalah ini memuat pengalaman Proyek Pesisir, misalnya melalui forum lokakarya. Draft makalah yang dibuat oleh *Learning Team* ini juga dikirimkan kembali ke setiap lokasi proyek untuk mendapatkan masukan dan komentar. Selain itu, draft makalah juga dikirimkan kepada *technical advisor*, seperti Dr. Kem Lowry, Brian Needham dan Brian Crawford, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Masukan dan komentar dari staf Proyek Pesisir dan *technical advisor* selanjutnya digunakan untuk memperbaiki makalah yang akan disajikan dalam suatu lokakarya (*workshop*).

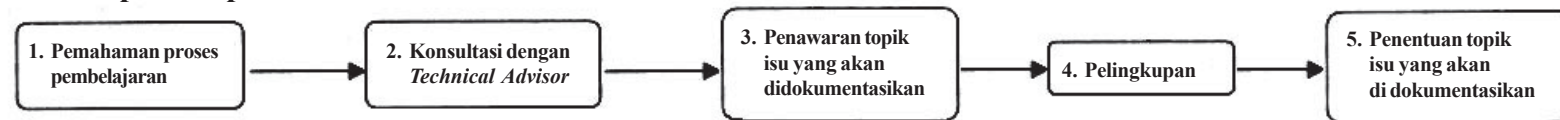
3. TAHAP DISEMINASI DAN EVALUASI

Kegiatan diseminasi dan evaluasi dilakukan pertama kali melalui kegiatan lokakarya. Lokakarya ini bertujuan untuk menyebarluaskan

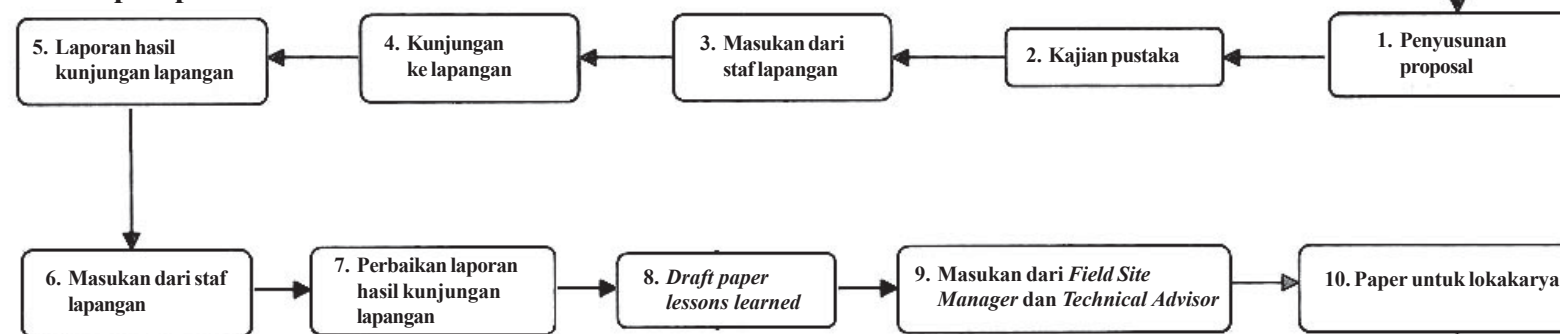
pengalaman Proyek Pesisir dalam dua tahun terakhir, khususnya di Sulawesi Utara, kepada sejumlah pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan pesisir dan membahas serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Pesisir, khususnya kegiatan *early actions*, *monitoring* dan *Provincial Working Group* (Lampiran-5). Dari lokakarya ini diharapkan ada masukan dan kritik serta saran, baik untuk kegiatan yang telah dilakukan maupun kegiatan *Learning*

Team di masa yang akan datang. Lokakarya ini selain diikuti oleh staf Proyek Pesisir juga diikuti oleh staf atau utusan berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut, seperti BAPPENAS, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Departemen Dalam Negeri, COREMAP dan utusan Lembaga Swadaya Masyarakat.

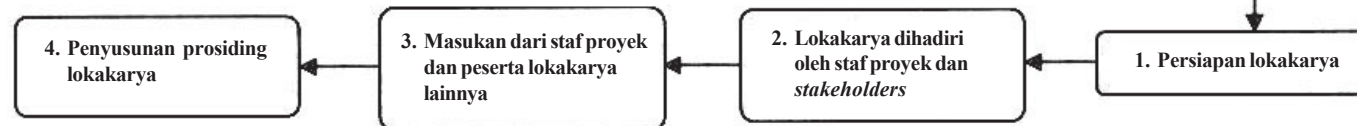
A. Tahap Persiapan



B. Tahap Implementasi



C. Tahap Diseminasi dan Evaluasi



Gambar-1. Tahap Kegiatan Learning Team dalam rangka pendokumentasian kegiatan proyek pesisir

KAJIAN TERHADAP KONSEP *EARLY ACTIONS* PROYEK PESISIR SULAWESI UTARA

Oleh:

Bambang Haryanto, M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani, Amiruddin Tahir, Burhanuddin, Johnnes Tulungen,
Christovel Rotinsulu, Audrie Siahainenia, Meidi Kasmidi, Egmond Ulaen dan Pierre Gosal.

Abstrak

Early actions merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mendukung program jangka panjang sampai tersusunnya *management plan* berbasis masyarakat di tingkat desa. Tujuan diselenggarakannya *early actions* adalah untuk menarik perhatian dan dukungan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pesisir serta menerapkan kegiatan proyek dalam skala kecil di tingkat desa. *Early actions* yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara merupakan kombinasi prakarsa masyarakat desa dan Proyek Pesisir. Prakarsa ini diwujudkan berdasarkan pada isu-isu prioritas dalam pengelolaan wilayah pesisir di desa atau lokasi proyek. Pengalaman penyelenggaraan *early actions* ini masih perlu dikaji secara lebih rinci sebelum diterapkan di lokasi lain di Indonesia.

PENGANTAR

Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project (CRMP)* bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan kondisi sumberdaya dan lingkungan pesisir dimana masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan konsep pendekatan desentralisasi dan penguatan kelembagaan maupun perorangan dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya pesisir dan laut. Secara khusus, Proyek Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT) sedang mencoba menerapkan 3 model pengelolaan wilayah pesisir, yaitu model penyusunan rencana pengelolaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara, berbasis-ekosistem di Kalimantan Timur dan berbasis wilayah administratif (propinsi/kabupaten) di Lampung.

Di Sulawesi Utara, Proyek Pesisir saat ini sedang mengembangkan model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat dan bersifat desentralisasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan mempertahankan kondisi sumberdaya wilayah pesisir serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada

sumberdaya pesisir. Model ini diterapkan di tiga lokasi yang mencakup empat desa di wilayah Kabupaten Minahasa, yaitu Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise. Pengalaman dari penerapan model pengelolaan di ke-empat desa tersebut diharapkan dapat diadopsi di tempat lain, dengan kemungkinan beberapa penyesuaian mengingat adanya keragaman karakteristik antar desa, antar kabupaten dan antar lokasi geografi.

Pelaksanaan program pengembangan yang berbasis masyarakat tersebut sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagai suatu strategi pelaksanaan kegiatannya, PP SULUT telah melaksanakan kegiatan yang dikategorikan *early actions* di desa-desa proyek. Kegiatan *early actions* merupakan suatu kegiatan yang mengawali kegiatan yang lebih besar dan berjangka panjang, yaitu rencana pengelolaan berbasis masyarakat tingkat desa di Sulawesi Utara.

1. KONSEP *EARLY ACTIONS*

1.1. Pengertian

Early actions (EA) dalam arti luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mendukung program jangka panjang sampai tersusunnya rencana pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management plan*) di tingkat desa. EA adalah bentuk pelaksanaan awal proyek di desa, ketika proses perencanaan dan penyusunan rencana pengelolaan di tingkat desa sedang berlangsung. EA yang dilaksanakan masyarakat dapat dianggap sebagai proses pembelajaran, untuk membangkitkan partisipasi dan menggalang kerjasama antar anggota masyarakat, Proyek Pesisir dan lembaga-lembaga di tingkat desa. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa EA merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung setiap tahapan dalam proses peyelenggaraan program/kegiatan proyek, yaitu identifikasi isu, penyusunan *baseline* data dan penyusunan profil desa hingga tersusunnya rencana pengelolaan. Hasil dari kegiatan EA ini tidak selalu harus bermanfaat secara langsung bagi penyusunan program jangka panjang atau tidak harus selalu mengarah kepada program/tujuan tertentu rencana pengelolaan tetapi EA lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan untuk melibatkan dan mengikut-sertakan masyarakat dalam program jangka panjang.

1.2. Tujuan

Para penyuluh lapangan (*Field Extension Officer* - FEO) PP SULUT di desa lokasi proyek mengemukakan bahwa EA adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masa awal pelaksanaan program utama (jangka panjang) proyek pesisir di desa yang bertujuan untuk: a) memperkenalkan dan mensosialisasikan proyek pesisir di desa, b) membangun kepercayaan dan kesadaran sebagian atau semua masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, dan c) membangun/menjalin kerjasama masyarakat dengan Proyek Pesisir. Dari berbagai informasi yang diperoleh, *Learning Team* menyimpulkan bahwa EA bertujuan untuk a) menarik dukungan masyarakat terhadap program-program jangka panjang, b) meningkatkan kesadaran masyarakat, c) meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk institusi, d)

pengalaman dan percobaan kegiatan program jangka panjang dalam skala kecil di tingkat desa.

1.3. Partisipan atau kelompok sasaran

Partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan EA adalah sebagian atau seluruh masyarakat di lokasi proyek yang terdiri dari: (1) berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, petani, pemuda, wanita, tokoh dan pranata-pranata sosial yang ada di desa lokasi proyek, (2) pemerintah desa dan perangkatnya sampai tingkat dusun, dan (3) penyuluh lapangan serta petugas lapangan lainnya di desa.

1.4. Lembaga pendukung

Lembaga-lembaga yang berperan sebagai pendukung yang terlibat dalam EA adalah Pemerintah di tingkat kecamatan hingga propinsi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang diharapkan dapat berfungsi dalam pembinaan, pembentukan sistem informasi, transfer pengetahuan dan teknologi, dan sebagai fasilitator dalam perencanaan dan pelaksanaan EA.

1.5. Dana

Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan EA berasal seluruhnya atau sebagian dari PP SULUT dan sebagian dari masyarakat. Pemberian dana dari PP SULUT kepada masyarakat dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat yang disusun dengan bantuan penyuluh lapangan. EA yang diprakarsai oleh PP SULUT, proposalnya disusun dan diajukan oleh penyuluh lapangan. Sedangkan EA yang diprakarsai oleh masyarakat disusun dan diajukan oleh masyarakat melalui FEO kepada PP SULUT. Kontribusi terbesar dari masyarakat sebagai pelaksana EA dalam proyek pada umumnya adalah tenaga, waktu, moral dan bahan-bahan/peralatan yang tersedia di lokasi setempat dan diperlukan untuk kegiatan EA. Sumber dana kegiatan EA ini juga diharapkan dari pemerintah yang kemungkinan berasal dari APBN/APBD, namun selama ini belum ada realisasi dana dari anggaran APBN/APBD langsung ke masyarakat. Untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam mengelola dana EA, mereka diberi pelatihan pembukuan, proses pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan keuangan sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Proyek Pesisir.

1.6. Bentuk kegiatan

Pelaksanaan EA di lapangan dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, studi banding, dan kegiatan masyarakat di lokasi proyek yang diakomodasi oleh PP SULUT melalui penyuluh lapangan.

1.7. Proses pemilihan dan penetapan *early actions*

Menurut proses pemilihan dan penetapannya, EA yang dilaksanakan oleh PP SULUT dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu EA yang diprakarsai oleh PP SULUT dan EA yang diprakarsai oleh masyarakat. Pemilihan dan penetapan EA dilakukan berdasarkan prioritas kepentingan atau mendesak tidaknya kegiatan ini dan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

2. EARLY ACTIONS YANG DIPRAKARSAI OLEH PP SULUT

EA yang diprakarsai oleh PP SULUT disusun berdasarkan hasil identifikasi isu-isu prioritas yang telah ditetapkan dan untuk ditangani oleh PP SULUT. Setelah prioritas isu ditentukan, PP SULUT menugaskan penyuluh lapangan (*Field Extension Officer*) yang dibantu oleh *Senior Extension Officer* (SEO) untuk membuat usulan kegiatan EA. Proposal tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Field Program Manager PP SULUT hingga disetujui sebagai kegiatan PP SULUT. Selanjutnya, proposal tersebut diperkenalkan ke masyarakat dan pemerintah desa, kecamatan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan LSM untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sebagai dukungan terhadap EA tersebut. Setelah proposal ini mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat desa, PP SULUT akan menindak-lanjuti dengan memberikan dukungan teknis dan biaya pelaksanaannya kepada masyarakat.

Kriteria kegiatan EA yang dapat diusulkan dan disetujui adalah sebagai berikut:

- ♦ Membantu memecahkan masalah mendesak yang berhubungan atau mendukung penyusunan rencana pengelolaan di desa.

- ♦ Pelaksanaan dalam jangka pendek (*short-term*).
- ♦ Membawa hasil yang berarti (bermanfaat) bagi masyarakat.
- ♦ Melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat.
- ♦ Menciptakan perilaku model yang diharapkan bagi pengelolaan sumberdaya.
- ♦ EA dipilih/ditentukan secara demokratis oleh masyarakat.
- ♦ Pengambilan keputusan secara terbuka (transparan).
- ♦ Kelompok yang berpartisipasi dapat “langsung merasakan hasilnya” (*hands-on experience*).
- ♦ Membangun kepercayaan positif masyarakat (publisitas positif) terhadap program.
- ♦ Membawa hasil dengan sedikit lawan (*non-cooperative*).

3. EARLY ACTIONS YANG DIPRAKARSAI OLEH MASYARAKAT DESA

Masyarakat pada lokasi proyek akan berprakarsa untuk merencanakan suatu kegiatan yang dikategorikan EA dan berkaitan dengan isu-isu pengelolaan pesisir, jika mereka telah menyadari dan memahami nilai sumberdaya alam, pemeliharaan dan pelestariannya setelah dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan/pendidikan lingkungan hidup oleh PP SULUT. Prakarsa masyarakat tersebut diajukan kepada PP SULUT berupa proposal yang telah disusun oleh kelompok tertentu atau secara bersama-sama antar anggota masyarakat dengan didampingi dan diarahkan oleh FEO serta diketahui oleh pemerintah desa dan LKMD.

Penilaian kelayakan usulan EA dilakukan oleh PP SULUT bersama anggota PWG (*Provincial Working Group*). Penilaian tentang diterima atau ditolaknya proposal berdasarkan kriteria : a) kegiatan yang berdampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan sumberdaya; b) kegiatan yang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi; c) dana yang dibutuhkan proporsional dengan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan; dan d) kegiatan dapat dilakukan dalam jangka pendek.

Proposal yang disetujui, kemudian ditindaklanjuti oleh PP SULUT berupa penyerahan dana kepada kelompok pengelola dan pendampingan teknis kepada masyarakat oleh FEO. Sedangkan tindaklanjut dari masyarakat adalah

melakukan pembagian tugas, tanggung jawab, rencana kerja rinci dan pentahapan pelaksanaan kegiatan EA.

4. RELEVANSI *EARLY ACTIONS* DENGAN ISU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Pollnac *et al.* (1997a) melaporkan daftar isu pengelolaan sumberdaya pesisir di 20 desa di Kabupaten Minahasa, termasuk desa Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise. Isu pengelolaan sumberdaya pesisir di desa Bentenan adalah penambangan karang, penangkapan ikan dengan bom, penebangan mangrove, potensi wisata, budidaya rumput laut, dan penangkapan ikan yang tidak selektif dengan *gillnet*. Di desa Tumbak, isu yang penting adalah penambangan karang, penangkapan ikan yang destruktif, budidaya rumput laut dan penangkapan ikan yang tidak selektif dengan *gillnet*. Kondisi pantai di desa Blongko cukup sehat dan produktif, demikian pula kondisi terumbu karangnya cukup baik dan tidak terjadi kerusakan seperti desa lainnya. Peningkatan populasi, ekspansi pasar dan meningkatnya pengambilan mangrove dan organisme perairan merupakan fenomena yang perlu segera diantisipasi untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih buruk, terutama dikaitkan dengan teknik penangkapan ikan yang cenderung merusak. Kondisi terumbu karang di desa Talise dikategorikan sangat baik (penutupan karang dan variasi spesies tinggi). Isu yang penting di Talise adalah erosi pantai, penebangan hutan, hak pemilikan tanah (pekarangan dan kebun) dan konflik budidaya mutiara dengan nelayan tradisional setempat.

Perencanaan EA disusun dan dilaksanakan berdasarkan isu-isu prioritas yang terjadi di setiap lokasi (desa) proyek. Hingga saat ini, isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan EA cenderung berorientasi pada isu kondisi alam (lingkungan fisik) wilayah pesisir. Tabel-1 memperlihatkan bahwa isu-isu utama yang terdapat di setiap desa lokasi meliputi penangkapan ikan yang destruktif dengan bom dan racun, erosi pantai, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat pantai. Isu penting lainnya adalah penangkapan/perburuan satwa yang dilindungi (satwa yang hampir punah), penambangan terumbu karang, penebangan/perusakan mangrove/hutan, populasi bintang laut berduri yang melimpah, sanitasi lingkungan dan sarana transportasi yang kurang

baik, serta terjadi konflik dan kecilnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. Isu-isu tersebut merupakan masalah yang memerlukan tindakan segera. Sedangkan isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersifat peluang di desa lokasi proyek adalah potensi nener (Bentenan dan Tumbak) dan potensi eko-wisata (Bentenan, Tumbak dan Talise). Sejalan dengan isu yang diidentifikasi, jenis kegiatan EA terlihat cukup beragam di antara keempat desa lokasi proyek (Tabel-2). Secara umum, kegiatan EA tersebut mempunyai hubungan erat dengan isu yang terdapat pada lokasi proyek (Tabel-3).

5. BEBERAPA CATATAN TENTANG KEGIATAN *EARLY ACTIONS* PROYEK PESISIR DI SULAWESI UTARA

Untuk mengetahui dan mengambil pengalaman dari sejumlah kegiatan EA seperti pada Tabel-2, pendokumentasian telah dilakukan terhadap proses pelaksanaan kegiatan EA di Sulawesi Utara. Namun pendokumentasian rinci hanya dilakukan terhadap kegiatan pendidikan lingkungan hidup terumbu karang dan pembersihan bintang laut berduri (Bentenan dan Tumbak), pelatihan *monitoring* terumbu karang (Tumbak dan Blongko), pelatihan pengukuran garis pantai (Bentenan dan Talise) dan penanaman mangrove (Bentenan dan Tumbak). Keempat kegiatan EA tersebut dapat mewakili informasi dan keterangan mengenai penerapan EA. Data, informasi dan keterangan yang perlu didokumentasikan diperoleh dengan metode survey (observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat) dan pengumpulan data dari laporan-laporan tentang kegiatan EA.

Tabel-1. Daftar isu pengelolaan wilayah pesisir di empat desa lokasi Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

No	Isu pengelolaan pesisir	Bentenan	Tumbak	Blongko	Talise
1.	Penambangan terumbu karang	✓	✓	-	-
2.	Penangkapan ikan yang destruktif (bom/racun)	✓	✓	✓	✓
3.	Pengambilan/penebangan dan konversi mangrove	✓	✓	-	-
4.	Erosi Pantai	✓	✓	✓	✓
5.	Populasi bintang laut berduri (<i>Acanthaster planci</i>) yang melimpah	✓	✓	-	-
6.	Potensi dan budidaya nener	✓	✓	-	-
7.	Penangkapan/perburuan satwa yang dilindungi (dugong, penyu, dll)	✓	✓	-	✓
8.	Penyediaan/sarana air bersih	✓	✓	✓	✓
9.	Sanitasi lingkungan (MCK)	-	-	✓	-
10.	Sarana transportasi	✓	✓	-	-
11.	Perusakan/pemanfaatan hutan (<i>upland forest</i>)	-	-	✓	✓
12.	Potensi Eko-wisata hutan dan Terumbu Karang	✓	✓	-	✓
13.	Konflik daerah pemanfaatan (kawasan budidaya mutiara dan penangkapan ikan oleh masyarakat)	-	-	-	✓
14.	Kecilnya akses masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian	-	-	-	✓

Sumber: *Fact sheet* Proyek Pesisir Sulawesi Utara tentang Desa Bentenan dan Tumbak, Blongko dan Talise.

Keterangan: ✓: ada; -: tidak ada

Tabel-2. Kelompok jenis dan lokasi kegiatan *early actions* Proyek Pesisir di Sulawesi Utara.

No	Isu pengelolaan pesisir	Bentenan	Tumbak	Blongko	Talise
A	Prakarsa Proyek				
1.	Pembersihan bintang laut berduri	✓	✓	-	-
2.	Pelatihan <i>monitoring</i> terumbu karang	-	✓	✓	-
3.	Pelatihan pengukuran garis pantai	✓	-	-	✓
4.	Pusat informasi masyarakat	-	-	✓	✓
5.	Studi banding wisata pantai dan bahari	✓	✓	✓	✓
6.	Pelatihan akuntansi keuangan	✓	✓	✓	✓
B	Prakarsa Masyarakat				
1.	Penanaman mangrove	✓	✓	-	-
2.	Kewirausahaan ekoturisme	-	-	-	✓
3.	Pembuatan MCK	-	-	✓	-
4.	Pengadaan air bersih	-	✓	-	-

Sumber: *Fact sheet* Proyek Pesisir Sulawesi Utara tentang Desa Bentenan dan Tumbak, Blongko dan Talise.

Keterangan: ✓: ada; -: tidak ada

Tabel-3. Hubungan antara isu pengelolaan sumberdaya pesisir dan kegiatan *early actions* di Sulawesi Utara.

No	Isu	Early actions
1.	Kerusakan terumbu karang	* Pendidikan lingkungan hidup dan pembersihan bintang laut berduri * Pelatihan <i>monitoring</i> terumbu karang
2.	Erosi pantai	* Pelatihan pengukuran garis pantai
3.	Kerusakan hutan mangrove	* Penanaman mangrove
4.	Sanitasi lingkungan	* Pembuatan MCK dan penyediaan air bersih

Perbedaan sambutan masyarakat terhadap *early actions*. Pada umumnya proses pelaksanaan EA diawali dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi oleh PP SULUT yang dilakukan oleh penyuluh lapangan. Masyarakat yang tertarik untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan topik penyuluhan kemudian merencanakan kegiatan. Perbedaan pendapat dalam masyarakat pada umumnya terjadi di awal pelaksanaan kegiatan EA, namun bersifat tertutup dan berintensitas rendah. Biasanya persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Alasan masyarakat untuk berpartisipasi. Dari wawancara dalam kunjungan lapang untuk mendokumentasikan kegiatan EA dapat diketahui beberapa alasan masyarakat desa lokasi Proyek Pesisir untuk berpartisipasi dalam kegiatan EA, yaitu:

- ♦ Berpartisipasinya tokoh/pembina masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi;
- ♦ Program yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat melalui perbaikan kondisi lingkungan di masa depan (jangka panjang);
- ♦ Dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dalam kegiatan EA.

Sedangkan alasan sebagian masyarakat yang menyatakan belum berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan EA adalah:

- ♦ Tidak ada kesempatan karena kesibukan mereka mencari nafkah yang bertepatan dengan waktu kegiatan EA;
- ♦ Belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat kegiatan EA;
- ♦ Ingin mengetahui bukti nyata dulu dari kegiatan EA;
- ♦ Sekelompok masyarakat (petani) yang menilai atau menganggap bahwa mereka bukan termasuk kelompok sasaran kegiatan EA yang memfokuskan kegiatan terhadap lingkungan pesisir dan masyarakat pantai.

Persepsi masyarakat terhadap fokus *early actions*. Secara umum, kegiatan EA yang dilaksanakan oleh masyarakat desa lokasi Proyek Pesisir, baik yang diprakarsai oleh PP SULUT maupun masyarakat, cenderung mengarah kepada penanganan isu lingkungan atau ekosistem, seperti erosi, terumbu karang dan mangrove, sementara penanganan masalah sosial-ekonomi masyarakat pesisir masih dirasakan kurang.

Manfaat *early actions* bagi partisipan. Pada umumnya responden yang terlibat dalam kegiatan EA berpendapat bahwa proses pembelajaran masyarakat melalui kegiatan EA ini berjalan baik, terutama dalam hal alih pengetahuan/keterampilan, menarik dukungan dan meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat. Namun dalam proses pembelajaran, mereka menilai penguatan institusi pada tingkat lokal dinilai masih rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat melalui kelompok dan para tokohnya akan merencanakan kelanjutan dari kegiatan EA dengan dampingan PP SULUT melalui penyuluh lapangan sampai mereka mencapai tahap mandiri.

Pembangunan kelembagaan. Penguatan institusi sebagai tindak lanjut kegiatan EA di lokasi proyek diupayakan melalui pembentukan kelompok-kelompok di tingkat desa seperti Kelompok Pengelola Mangrove, Kelompok *Monitoring* Terumbu Karang, Kelompok *Monitoring* Garis Pantai, Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan kelompok lainnya yang anggotanya adalah peserta pelatihan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan EA. Menurut para penyuluh lapangan, kelompok-kelompok tersebut akan diintegrasikan dalam musyawarah desa melalui LMD/LKMD bersama Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pengembangan desa. Pada saat ini kapasitas kelompok-kelompok dan kerjasama antar institusi di desa tersebut dirasakan masih rendah karena masih dalam proses pengembangan fungsi dan peranannya. Keadaan ini menyebabkan kelompok-kelompok tersebut masih memerlukan fasilitator.

***Early actions* sebagai persiapan untuk program jangka panjang.** Kegiatan-kegiatan EA seperti pendidikan lingkungan hidup, pembersihan bintang laut berduri, pelatihan *monitoring* terumbu karang dan pengukuran garis pantai, dan penanaman mangrove, dilaksanakan dalam waktu pendek (kurang dari satu bulan) untuk setiap kegiatan dengan frekuensinya antara 1 - 3 kali penyelenggaraan. Kegiatan EA tersebut akan dan telah dilanjutkan oleh masyarakat guna mendukung program pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai contoh, kegiatan pembersihan bintang laut berduri dan *monitoring* terumbu karang akan sangat mendukung program pembentukan daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*). Sementara kegiatan *monitoring* garis pantai sudah diarahkan untuk mendukung program pencegahan erosi pantai,

pembuatan tanggul pencegah banjir dan rencana pengalihan pemukiman. Sedangkan program penanaman mangrove mengarah pada penghutanan kembali mangrove yang ada.

Kelanjutan kegiatan di masa depan. Untuk mengantisipasi stagnasi perkembangan kelompok-kelompok swadaya setelah Proyek Pesisir tidak lagi memfasilitasi kelompok tersebut, peran dan fungsi fasilitator ini akan diambil alih oleh Kelompok Inti yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur yang mewakili seluruh masyarakat desa. Istilah kelompok ini hanya digunakan untuk kalangan intern PP SULUT. Dengan demikian program-program yang direncanakan dalam rencana pengelolaan tingkat desa dapat ditindaklanjuti oleh Kelompok Inti.

Peran penyuluh lapangan. Kegiatan EA yang dilaksanakan oleh masyarakat mendapat dukungan besar dari para penyuluh lapangan. Namun para penyuluh lapangan ini menyatakan bahwa dampak peran mereka baru akan terlihat di masa yang akan datang. Pengaruh yang jelas terlihat saat ini adalah perubahan persepsi sebagian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan EA terhadap lingkungan dan sumberdaya pesisir, terutama erosi pantai, kerusakan terumbu karang dan mangrove. Walaupun demikian, dukungan dan kontribusi masyarakat akan terus diberikan, terutama dalam bentuk tenaga kerja, pemikiran atau prakarsa, penyediaan waktu untuk kegiatan EA, dukungan moral, dukungan keamanan, dan kesediaan untuk memberikan informasi sosial-ekonomi masyarakat yang bermanfaat bagi survey/penelitian/perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan kontribusi dan dukungan PP SULUT yang masih diharapkan masyarakat adalah dana yang betul-betul diperlukan untuk kegiatan, dampingan manajemen dan alih pengetahuan/ketrampilan yang bermanfaat bagi masyarakat.

6. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengantar. Pendidikan lingkungan hidup (PLH) adalah suatu program yang dilakukan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat melalui pemberian pengetahuan yang akhirnya akan menimbulkan aksi dari masyarakat (Anonimous, 1997). Secara umum, PLH adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dan kepedulian pada

permasalahan lingkungan secara keseluruhan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, kemampuan, motivasi dan komitmen individu ataupun kelompok terhadap pemecahan masalah dan mencegah timbulnya masalah baru. Secara khusus, tujuan PLH adalah mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan setempat, kemampuan dalam memecahkan masalah dan cara berorganisasi untuk menjaga dan merehabilitasi ekosistem dan penguatan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan tujuan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

6.1. Pendidikan Lingkungan Hidup Terumbu Karang bagi masyarakat desa Bentenan dan Tumbak

Perencanaan. Tahapan perencanaan yang dilakukan dalam PLH terumbu karang meliputi penyiapan materi dan pemilihan pembicara (pembawa materi), penentuan calon peserta, konsultasi dengan kantor PP SULUT, koordinasi dengan pemerintahan desa, LKMD dan tokoh masyarakat serta sosialisasi kegiatan. Penyiapan materi dan pembicara dilakukan oleh penyuluh lapangan (*Field Extension Officer*) bersama *Research Extension Officer* (REO) dan *Senior Extension Officer* (SEO). Materi yang diberikan mencakup gambaran umum tentang lingkungan hidup wilayah pesisir dan laut, jenis biota laut yang dilindungi, ekosistem terumbu karang dan bintang laut pemakan terumbu karang (*Crown of Thorns - CoT*) serta sosialisasi kegiatan Proyek Pesisir. Dalam penyiapan materi tersebut, konsultasi dengan kantor PP SULUT selalu dilakukan agar tujuan dari kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Proyek Pesisir. Kegiatan PLH ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta, namun lebih diutamakan kepada masyarakat yang secara langsung memanfaatkan ekosistem terumbu karang, seperti nelayan, penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak ataupun bahan beracun. Tujuannya adalah agar pelatihan ini dapat berdampak langsung terhadap kelompok sasaran pelatihan, yaitu pengguna sumberdaya. Untuk kelancaran dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan agama, lembaga formal maupun non formal senantiasa dilakukan. Selanjutnya program ini disosialisasikan kepada masyarakat dan calon peserta melalui berbagai momen

yang dianggap sesuai dan efektif seperti pada pertemuan dengan kelompok masyarakat, pengajian atau kegiatan ibadah lainnya serta acara pernikahan.

Persiapan. Persiapan PLH ini berlangsung di desa Tumbak sejak tanggal 1 - 28 April 1998. Tahap persiapan meliputi rencana pelaksanaan dengan masyarakat dan koordinasi dengan kantor PP SULUT, penyiapan dan penyusunan materi dan teknis pelaksanaan PLH, rapat koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menentukan waktu pelaksanaan, pengecekan terakhir terhadap peserta yang direncanakan akan diikuti sebanyak 15 orang penambang terumbu karang dan pengguna bom/racun.

Pelaksanaan. Pada tanggal 28 April kegiatan PLH ini berhasil dilaksanakan di Tumbak dengan jumlah peserta yang melebihi dari rencana, yaitu 54 orang. Hal ini menunjukkan tingkat keingintahuan dan antusias masyarakat yang cukup besar terhadap kegiatan PLH. Namun jumlah peserta yang banyak tersebut menyebabkan pelatihan menjadi kurang efektif dan waktu yang digunakan menjadi lebih lama. Selain itu materi yang diberikan terlalu banyak sehingga mempengaruhi daya tangkap peserta. Menurut masyarakat, sebaiknya materi yang diberikan lebih spesifik pada terumbu karang yang merupakan inti dari PLH tersebut. Materi pelatihan disampaikan oleh REO dan konsultan teknis, dilengkapi dengan diskusi kelompok dan tanya jawab. PLH di desa Benteenan dilaksanakan sebelum pelaksanaan di desa Tumbak. Kegiatannya berupa penyuluhan dan diskusi dalam pertemuan antara PP SULUT dengan masyarakat yang bertempat di gedung sekolah. PLH ini difasilitasi oleh FEO dengan materi penyuluhan tentang ekosistem wilayah pesisir.

Hasil yang dicapai. Setelah pelaksanaan PLH, masyarakat menilai kegiatan tersebut cukup penting bagi masyarakat khususnya yang belum mengetahui perlunya perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang. Para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini menyarankan agar PLH terumbu karang diselenggarakan lagi untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang belum sempat mengikuti kegiatan PLH sebelumnya. Pada umumnya masyarakat mengetahui fungsi dari terumbu karang sebagai tempat hidup ikan, namun dalam pemberian materi mengenai hal tersebut, masyarakat mengharapkan lebih banyak diberikan dalam bahasa setempat agar para peserta

lebih cepat dan lebih mudah memahami. Ada tiga hal yang dirasakan perlu diketahui oleh masyarakat yaitu (1) fungsi dan manfaat terumbu karang; (2) faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan (3) tindakan penyelamatan kerusakan terumbu karang. Dampak dari penyelenggaraan PLH diantaranya adalah rencana masyarakat untuk:

- ♦ Menghindari, menghentikan, melarang, mencegah dan memberantas penggunaan bom dan racun dengan dukungan pemerintah daerah setempat;
- ♦ Membuat peraturan-peraturan untuk memelihara dan menjaga terumbu karang yang ada di wilayahnya;
- ♦ Mengurangi pengambilan karang dan menghindari lalu lintas kapal di atas terumbu karang;
- ♦ Penempatan tanda larangan;
- ♦ Membunuh/membersihkan hewan pemakan karang (CoT);
- ♦ Penyuluhan kepada masyarakat yang belum mengerti.

6.2. Pendidikan Lingkungan Hidup Hutan dan Satwa bagi masyarakat desa Talise

Identifikasi permasalahan di desa Talise menemukan bahwa masyarakat desa Talise sering memanfaatkan hutan yang ada di dusun I dan II sebagai sumber bahan untuk membuat perahu dan bangunan. Cara mereka melakukan penebangan yang tidak selektif dikhawatirkan dapat mengakibatkan erosi yang berpotensi memiliki dampak terhadap ekosistem pesisir.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Proyek Pesisir mengadakan program pendidikan lingkungan hidup mengenai hutan dan satwa yang dilindungi. Sebelum program ini dilakukan, sebuah survey telah dilakukan oleh konsultan teknis bersama beberapa masyarakat setempat untuk mengidentifikasi jenis pohon dan satwa yang ada di hutan desa Talise. Survey menunjukkan adanya penurunan luas total hutan dalam lima tahun terakhir dan diketahui adanya beberapa jenis satwa yang dilindungi, termasuk satwa endemik Sulawesi. Hasil survey ini disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan hutan yang berkesinambungan seperti tebang pilih, perlunya penanaman bibit pohon serta pertanian terasering.

Pelaksanaan. PLH Hutan dan Satwa di desa Talise dilaksanakan selama 4 hari yaitu tanggal 24 - 28 November 1998 yang bertempat di dusun I, II dan III. PLH ini disampaikan oleh REO, FEO dan konsultan teknis. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan PLH sejenis yang dilaksanakan oleh FEO pada bulan Mei 1998.

Peserta yang hadir pada PLH ini sesuai dengan kelompok sasaran yaitu para kelompok penebang hutan dan kelompok pemburu rusa. Presentasi hasil survey menunjukkan minat masyarakat untuk menjaga hutan dan memanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa anggota masyarakat telah mengusulkan agar dibuat peraturan mengenai pemanfaatan hutan yang lestari seperti larangan menebang pohon yang masih muda dan penanaman kembali bibit pohon.

6.3. Analisis isu

Tujuan yang diharapkan dari PLH adalah peningkatan partisipasi dari masyarakat terhadap kegiatan Proyek Pesisir. Pengertian partisipasi itu sendiri adalah bagian dari aktifitas masyarakat setempat dalam mengembangkan kehidupan keluarga mereka, aktifitas rumah tangga dan tanggung jawab masyarakat (IIRR, 1998). Partisipasi masyarakat disini berbeda dengan pendidikan masyarakat. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendapatkan informasi dari masalah-masalah dan isu-isu setempat atau lokal, mendapatkan masukan dari isu-isu prioritas dan aspirasi kelompok sasaran, mendapatkan tanggapan dari rekomendasi yang diberikan oleh tim teknis serta menyadarkan masyarakat untuk mendukung tindakan pengelolaan. Sedangkan pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah pengelolaan sumberdaya pesisir, meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi dari masyarakat dan tindakan individual, meningkatkan pemahaman terhadap suatu proyek atau program serta menyediakan informasi, ide-ide dan konsep (Anonymous, 1997).

7. KEGIATAN PENGAMBILAN *CROWN OF THORNS* (CoT) DI PERAIRAN DESA BENTENAN-TUMBAK

Pengantar. Kegiatan pengambilan CoT ini diprakarsai oleh PP SULUT setelah suatu pra-survey yang bertujuan untuk melihat jumlah dan sebaran CoT yang dilakukan oleh Christovel Rotinsulu dan Nicole Fraser pada tanggal 19 Desember 1997. Pra-survey tersebut menghasilkan perkiraan bahwa perkembangan dan penyebaran jumlah CoT relatif lebih tinggi dari jumlah CoT yang dijumpai dalam survey lingkungan untuk keperluan baseline study pada bulan Juni 1997. Perkembangan populasi ini merupakan masalah potensial yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Oleh karena itu, disusun suatu rekomendasi tentang perlunya tindakan untuk pencegahan kerusakan terumbu karang akibat *outbreak* CoT, yaitu pengambilan CoT.

7.1. Pengambilan CoT pertama (Desember 1997 - Maret 1998)

Permasalahan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan PP SULUT dengan perangkat pemerintahan desa dan masyarakat umum, baik melalui kegiatan penyuluhan maupun kesempatan lainnya. Dalam beberapa pertemuan-pertemuan tersebut sekaligus juga dibicarakan tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut. Menjelang kegiatan pembersihan CoT, PP SULUT menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Lingkungan Hidup (PLH) bagi penduduk desa Bentenan dan Tumbak. Secara singkat, masyarakat setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan CoT di perairan desa mereka. Dalam kegiatan ini PP SULUT menyiapkan tenaga ahli dan logistik kegiatan berupa peta lokasi kegiatan, alat-alat kamera video, peralatan selam dan pendukungnya, dan peralatan lainnya, serta konsumsi untuk para partisipan saat pelaksanaan di lapang. Untuk koordinasi penyelenggaraan, penyuluh lapangan PP SULUT melakukan pertemuan dengan pimpinan Pemerintah Kecamatan Belang, Pemerintah Desa Bentenan dan Desa Tumbak, dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain dengan masyarakat desa setempat, rencana pembersihan CoT disebarluaskan PP SULUT kepada kelompok masyarakat di luar desa. Misalnya dalam pertemuan antara PP SULUT (Brian Crawford, Christovel Rotinsulu, Audrie Siahainenia dan Nicole Fraser) dengan opera-

tor rekreasi penyelaman di Manado pada tanggal 14 Januari 1997. Pada tanggal 24-25 Februari 1998, kegiatan ini berhasil mengumpulkan sekitar 766 individu CoT dari 3 lokasi 'perairan' desa Tumbak (Pulau Punten, Pulau Baling-baling, dan Teluk Sompini) dan 1 lokasi 'perairan' Bentenan (Bohanga). Kegiatan ini melibatkan 162 orang, yang terdiri dari 70 penduduk desa Bentenan dan 92 penduduk desa Tumbak, selain unsur pemerintahan lokal maupun propinsi (BAPPEDA), universitas, LSM dan pemerhati lingkungan dari dalam dan luar negeri (Gambar-2).

7.2. Pengambilan CoT kedua (April 1998)

Dalam persiapan kegiatan yang kedua ini, pra-survey kedua dilakukan oleh *Senior Extension Officer*, masyarakat dan seorang ahli dari *International Coral Reef Society* di 3 (tiga) lokasi, yaitu Pulau Punten, Teluk Sompini, dan Bohanga), dengan menambah kegiatan pendidikan lingkungan hidup satu hari sebelum pelaksanaan. Juga koordinasi dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat dan pengaturan strategi serta rencana teknis dilakukan oleh FEO dan seorang asistennya. Pengorganisasian partisipan masyarakat setempat dilakukan bersama dalam koordinasi dengan Kepala Dusun.

Pengambilan CoT kedua ini dilakukan pada tanggal 30 April 1998. Kegiatan ini melibatkan 200 orang dari desa Tumbak. Dari 130 orang yang mengisi daftar hadir, 93 orang adalah laki-laki dan 37 orang adalah perempuan. Selain masyarakat setempat, terlibat juga para staf PP SULUT (*Technical advisor, Technical Extension Officer, Senior Extension Officer, Research Extension Officer, research diver*, peneliti dan sukarelawan (*volunteer*). Lokasi pengambilan CoT

adalah sama dengan lokasi kegiatan pertama, yaitu di sekitar Pulau Punten, Pulau Baling-baling, Teluk Sompini dan Bohanga.



Foto: Nicole Fraser.

Gambar-2. Kegiatan pengambilan bintang laut berduri (*Crown of Thorn*) oleh masyarakat di desa Bentenan dan Tumbak. Baju kaos (*t-shirt*) yang digunakan bergambar simbol binatang tersebut.

7.3. Strategi pengambilan dan perlakuan terhadap CoT

Dalam pelaksanaan pengambilan CoT, terdapat dua kelompok partisipan yang terlibat langsung menangani CoT, yaitu kelompok penyelam yang berada di air dan kelompok penampung yang berada di atas perahu. Kelompok pertama mengambil CoT dengan cara menusuk badan CoT kemudian mengikat dan menggantinya dalam seutas tali yang panjangnya 2 meter. Setiap tali dapat digunakan untuk mengikat 20 buah CoT. Untaian CoT ini kemudian dibawa penyelam ke permukaan air untuk diserahkan kepada kelompok pengumpul di perahu. Seorang mampu mengambil CoT sekitar 30 buah dengan total berat sebesar 5 kg. Seorang penyelam dapat melaksanakan penyelaman selama 2-3 menit setiap kali menyelam. Lokasi tempat ditemukannya CoT pada umumnya adalah pada kedalaman 0.5 m

hingga sekitar 5,0 meter di laut yang tenang. CoT yang terkumpul kemudian diukur dan kemudian dimusnahkan dan dikubur di pantai (Gambar-3). Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, penjelasan hasil pembersihan CoT dan cara mengisi data sheet untuk memonitor jumlah terumbu karang yang dikumpulkan.

7.4. Analisis Isu

CoT ini adalah salah satu hewan laut yang hidup di terumbu karang. Jumlah populasi CoT yang tinggi (*outbreak*) telah mengakibatkan kematian terumbu karang secara besar-besaran. Hal ini pernah terjadi di

Kepulauan Ryukyu (Jepang), Micronesia, Samoa Barat, Cook Islands, Fiji, Society Islands, Laut Merah, Hawaii, Maladewa, Malaysia Timur dan Australia (Moran, 1998). Penyebab timbulnya *outbreak* ini, menurut para ahli, diduga akibat (1) hujan lebat yang panjang, dimana *run off* akan membawa nutrient ke laut sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelimpahan jumlah fitoplankton yang merupakan makanan bagi larva CoT, sehingga memberikan peluang bagi ribuan larva untuk mendapatkan makanan yang cukup dan semakin besar peluangnya untuk tumbuh menjadi hewan dewasa dan mengkonsumsi karang hidup, serta (2) berkurangnya predator atau pemangsa mereka, misalnya *giant triton shell* (*Charonia tritonis*), *puffer fish* (*Arothron hispidus*), *trigger fish* (*Balistoides viridescens* dan *Pseudobalistes flavimarginatus*), udang (*Hymenocera picta*) dan cacing (*Pherecardia striata*). Namun, belum banyak bukti yang cukup untuk menunjukkan penyebab ini.

Dalam konteks pengelolaan pesisir di lokasi proyek, kegiatan ini merupakan media untuk memperkenalkan lingkungan bawah laut. Hal ini lebih lengkap lagi karena sebelum mereka melakukan pengambilan CoT, mereka telah mengikuti program PLH. Program PLH dapat dianggap sebagai forum untuk peningkatan kesadaran akan lingkungan, nilai ekologis lingkungan dan potensi sumberdaya di laut atau pesisir sekitarnya.

Wawancara terhadap sejumlah orang desa setelah kegiatan ini selesai dilakukan mendapatkan gambaran tentang pandangan pragmatis masyarakat terhadap pengambilan CoT ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan kontak manusia dengan CoT yang mengakibatkan rasa sakit luar biasa walaupun tidak mematikan. Pendapat lain adalah untuk menjaga atau memelihara terumbu

karang dari kerusakan akibat predasi CoT. Alasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini cukup beragam, mulai dari ikut-ikutan hingga untuk mendorong kelestarian alam.

Di Bentenan dan Tumbak telah ada kelompok-kelompok masyarakat pemantau terumbu karang. Sebagai salah satu topik yang menarik untuk kelompok-kelompok ini adalah perkembangan populasi dan penyebaran CoT.

Mereka akan terus melanjutkan kegiatan ini secara berkala setiap 3-6 bulan secara massal dengan petunjuk dan fasilitas PP SULUT selama proyek masih berjalan. Jika proyek telah selesai, kegiatan pengambilan CoT ini akan dilakukan oleh perorangan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan. Untuk pengambilan CoT secara massal, keberhasilannya tergantung dari pembinaan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Adanya kelompok-kelompok ini mungkin dapat dianggap merupakan salah satu indikator 'keberhasilan' kegiatan pengambilan CoT.

Perhatian pemerintah terhadap kegiatan ini tercermin selain dari dukungan resmi juga dengan kehadiran para pejabatnya pada saat pengambilan CoT dilakukan. Hadir di antara partisipan adalah Wakil Ketua Bappeda SULUT, Sekretaris Wilayah Kecamatan Belang

dan Kepala Desa. Kehadiran mereka diperkirakan memberikan dorongan moril kepada masyarakat yang berpartisipasi.

Satu hal yang menarik dari pendekatan ini adalah jika kegiatan-kegiatan tersebut menjadi rutin dan sudah memasyarakat di kalangan penduduk desa, maka pemantauan terhadap CoT merupakan suatu kebutuhan penduduk setempat. Bagaimana caranya agar kegiatan tersebut merupakan kebutuhan mereka? Salah satu alternatif adalah dengan menerangkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh penduduk setempat jika kondisi lingkungan dan



Foto: Christovel Rofinsulu

Gambar-3. Pengukuran bintang laut berduri (*Crown of Thorn*) untuk mendapatkan komposisi ukurannya di desa Bentenan dan Tumbak.

sumberdaya alam dalam keadaan baik. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah siapa pengambil manfaat dari kondisi terumbu karang yang bagus.

8. KEGIATAN PELATIHAN *MONITORING* TERUMBU KARANG

Pengantar Teknik *monitoring* terumbu karang yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode manta-tow (English *et al.* 1994). Metode ini dipilih karena relatif lebih sederhana untuk dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan cara sederhana ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi terumbu karang apakah buruk, baik atau tetap sama. Teknik ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hasil pengamatan dapat menghasilkan informasi/data penting dan pengoperasiannya lebih mudah, cepat, murah, sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat (Fraser *et al.* 1998).

Secara singkat, teknik manta-tow adalah suatu teknik pengamatan terumbu karang dimana pengamat ditarik di belakang perahu kecil bermesin dengan menggunakan tali sebagai penghubung antara perahu dengan papan manta tempat berpegangnya pengamat. Kecepatan perahu secara tetap, melintas di atas terumbu karang dengan lama tarikan 2 menit, pengamat akan melihat beberapa obyek (persentase penutupan karang hidup, karang lunak dan karang mati). Data yang diamati dicatat pada tabel data dengan menggunakan nilai kategori atau bilangan bulat. Obyek lain yang dapat diamati dan dicatat dalam *monitoring* ini adalah persentase penutupan pasir dan patahan karang, kima, *Diadema*, *Acanthaster* serta penampilan unik pada saat survey (*coral bleaching*, kumpulan ikan napoleon dan lain-lain).

Pelatihan *monitoring* terumbu karang lebih diarahkan pada praktek langsung di laut, yang sebelumnya diberikan penjelasan tentang manta-tow dan dilakukan simulasi di pinggir pantai untuk mengamati benda-benda yang terlihat sesuai prosedur. Setelah peserta memahami dan mampu melakukan pengamatan melalui simulasi secara benar dan lancar, kemudian praktek pengamatan terumbu karang dilakukan di laut.

Pelatihan ini diselenggarakan di desa Blongko dan desa Tumbak sesuai dengan kondisi terumbu karang yang ada serta mengarah kepada rencana penetapan daerah perlindungan laut atau *marine sanctuary* di kedua desa

tersebut. Sebelum pelaksanaan pelatihan *monitoring* terumbu karang, PP SULUT menyelenggarakan studi banding ke Apo Island di Filipina dengan peserta terdiri dari wakil masyarakat desa-desa proyek, termasuk desa Blongko dan Tumbak. Obyek studi banding tersebut adalah daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat pada tingkat desa. Hasil studi banding ini didiskusikan dan disebarluaskan kepada masyarakat di masing-masing desa melalui berbagai pertemuan di desa.

Menurut Siahainenia (1998), tujuan teknis dari pelatihan terumbu karang adalah: (a) membantu masyarakat untuk mengenal lebih baik tentang lingkungan biota karang laut, yang diharapkan masyarakat sadar dan termotivasi untuk melestarikan dan menjaga kawasan pesisirnya dari degradasi akibat aktivitas manusia, dan (b) mengubah sikap dan perilaku para penangkap ikan sekitar terumbu karang terhadap perusakan terumbu karang.

8.1. Pelatihan *monitoring* terumbu karang bagi masyarakat Desa Blongko

Proses perencanaan dan persiapan pelatihan *monitoring* terumbu karang di Desa Blongko meliputi berbagai tahap kegiatan, seperti: (1) identifikasi dan inventarisasi para pemanfaat terumbu karang, baik dari luar maupun dalam desa Blongko, (2) musyawarah antara para pemanfaat terumbu karang dan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan tentang *monitoring* kondisi terumbu karang yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, (3) *baseline study* terumbu karang untuk mengetahui kondisi awal terumbu karang di desa Blongko, dan (4) mempersiapkan sumberdaya manusia (masyarakat) baik sebagai peserta pelatihan maupun persiapan untuk pembentukan daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*). Pelatihan *monitoring* terumbu karang dilaksanakan sebanyak tiga kali dan menghasilkan 40 orang terlatih (Tabel-4).

Praktek *monitoring* terumbu karang dalam pelatihan ini dilakukan pada 18 titik stasiun obyek pengamatan di sepanjang pantai dari ujung desa ke desa lainnya. Setiap obyek pengamatan, dilakukan satu tarikan manta-tow pada tali sepanjang 18 m di belakang perahu selama dua menit dengan kecepatan tetap dan menggunakan perahu bermotor 40 PK (Gambar-4). Waktu pengamatan dalam pelatihan dibutuhkan tiga jam dan menghabiskan bahan

Tabel-4. Waktu pelaksanaan dan peserta pelatihan *monitoring* terumbu karang di desa Blongko, Sulawesi Utara.

No	Waktu	Lama (Hari)	Asal Peserta	Jumlah Peserta
1.	10 - 15 Nopember 1997	6	Dusun III	13
2.	04 - 10 Maret 1998	7	Dusun I	13
3.	11 - 13 Maret 1998	3	Dusun I dan III	14

Sumber : Kasmidi (1997) dan Kasmidi (1998)

bakar minyak tanah 20-25 liter. Biaya pelatihan ini ditanggung oleh PP SULUT.

Dari hasil *monitoring*, kondisi terumbu karang di Blongko berada pada penutupan karang dengan kategori III (75 % baik) dengan jenis karang terbanyak adalah karang jari (*Acropora sp*, *Montipora sp* dan *Porites sp*). Setelah pelatihan, kegiatan *monitoring* terumbu karang akan dilaksanakan oleh kelompok yang telah terbentuk, yaitu Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.

8.2. Pelatihan *monitoring* terumbu karang di desa Tumbak

Proses pelaksanaan pelatihan berasal dari rencana penetapan *marine sanctuary* atau daerah perlindungan laut di desa Tumbak yang memerlukan tenaga terlatih dalam *monitoring* terumbu karang. Gagasan ini ditindak-lanjuti oleh petugas lapang PP SULUT dengan mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa Tumbak. Kepala Desa, FEO dan asistennya menginformasikan kepada masyarakat dan memilih calon peserta pelatihan dengan kriteria: (1) memiliki minat yang sungguh-sungguh, (2) responsif terhadap program yang ditawarkan oleh FEO, dan (3) tingkat pendidikan SLTP atau dinilai mampu mengikuti materi latihan dengan mudah. Pelatihan *monitoring* terumbu karang dilaksanakan sebanyak tiga kali dan menghasilkan 35 orang terlatih (Tabel-5).

Praktek *monitoring* terumbu karang pada tiga lokasi, yaitu di belakang Pulau Bentenan, Napo Sihabu dan daerah terumbu karang di depan desa Tumbak. Ketiga lokasi tersebut merupakan calon kawasan *marine sanctuary* di

desa Tumbak. Pelatihan ini dibiayai oleh PP SULUT, terutama untuk konsumsi, sewa perahu, bahan bakar dan peralatan *monitoring*. Setiap kali pelatihan, menempuh jarak pengamatan di tiga lokasi tersebut sejauh 3 km yang menghabiskan waktu efektif sekitar 4 jam di setiap lokasi.

Dari peserta pelatihan ini direncanakan akan dipilih sebanyak 12 orang peserta untuk mengikuti pelatihan *monitoring* terumbu karang lanjutan yang disebut pelatihan tingkat mahir. Perbedaan antara pelatihan biasa dengan pelatihan tingkat mahir terletak pada muatan materinya, yaitu selain peserta mengetahui dan memahami persentase penutupan dari berbagai jenis terumbu karang, dibekali

juga ekosistem terumbu karang (biota laut, kehidupan dan jenis-jenis ikan sekitar terumbu karang). Peserta pelatihan tingkat mahir ini dipersiapkan sebagai pelatih/instruktur pelatihan yang sama di desa Bentenan.



Foto: Norma Mangampe

Gambar-4. Pelatihan teknik *snorkeling* dalam rangka kegiatan *monitoring* terumbu karang yang melibatkan masyarakat

Tabel-5. Waktu pelaksanaan dan peserta pelatihan *monitoring* terumbu karang di desa Tumbak, Sulawesi Utara.

No	Waktu	Lama (Hari)	Asal Peserta	Jumlah Peserta
1.	01 - 06 Juni 1998	7	Tumbak	12
2.	24 - 29 Agustus 1998	6	2 dari Blongko	12
3.	09 - 15 Nopember 1998	6	Tumbak	11

Sumber : Ulaen (1998)

Menurut para peserta, kegiatan pelatihan ini akan terus dilanjutkan dengan kegiatan *monitoring* terumbu karang secara rutin atau kondisional oleh masyarakat dalam rangka mendukung program perlindungan laut di desa Tumbak. Kegiatan masyarakat difasilitasi oleh Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut yang masih dalam proses pembentukan oleh masyarakat. Sebagian peserta menjelaskan bahwa pelatihan ini cukup baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi lingkungan terutama terumbu karang, walaupun manfaat ekonomi secara langsung belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Para peserta telah mentransfer pengetahuan atau membagi pengalamannya dari hasil pelatihan ini kepada masyarakat secara lisan dan belum melakukan alih keterampilannya dalam memonitor terumbu karang melalui praktek langsung di lokasi.

9. PELATIHAN PENGUKURAN GARIS PANTAI

Pengantar Pelatihan pengukuran garis pantai yang dilaksanakan di desa Bentenan dan desa Talise bertujuan agar masyarakat dapat memahami dinamika garis pantai, menguasai teknik pengukuran pantai dengan metoda horizon dan *waterpass*, serta mampu menyajikan data perubahan garis pantai secara praktis, periodik dan kontinyu. Peralatan dan pelatih/instruktur dalam pelatihan ini disediakan oleh PP SULUT sedangkan pesertanya adalah

masyarakat lokal di dua desa tersebut. Pelatih/instruktur dalam pelatihan ini adalah 2 (dua) orang konsultan teknis yang dikontrak oleh PP SULUT. Peralatan penting yang digunakan adalah *staff gauge*, *meter roll*, kompas kecil juga data pasang surut.

Pelatihan dilaksanakan dengan menerapkan lebih banyak praktek di lapangan. Penyajian materi atau teori diberikan melalui ceramah dalam kelas. Di dalam kelas, instruktur memberikan penjelasan tentang pengertian, maksud dan manfaat pengukuran garis pantai serta petunjuk praktis tentang cara pengukuran garis pantai, cara pengukuran tinggi muka air pasang surut,

pengolahan data hasil pengukuran dan menggambarkan hasilnya dalam bentuk peta garis pantai.

9.1. Pelatihan pengukuran garis pantai bagi masyarakat desa Bentenan

Gagasan PP SULUT tentang pelatihan pengukuran garis pantai diperkenalkan kepada masyarakat oleh FEO dalam pertemuan umum dengan pejabat pemerintahan desa dan masyarakat. Dalam pertemuan ini kriteria peserta pelatihan ditetapkan, yaitu anggota dari kelompok umur muda dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi dari sebagian anggota masyarakat lainnya. Dari pertemuan ini terpilih 10 orang peserta. Selanjutnya FEO berkonsultasi dengan PP SULUT dan mempersiapkan pelaksanaan pelatihan yaitu biaya, pelatih/instruktur, materi dan peralatan pelatihan. Pelatihan pengukuran garis pantai telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dan menghasilkan 20 orang terlatih dari Dusun III, IV dan V serta 2 orang FEO yang juga mengikuti pelatihan ini (Tabel-6).

Praktek pengukuran garis pantai dilakukan pada 12 titik (*bench mark*) secara terpisah dengan interval jarak 300 meter. Lokasi terletak pada tempat-tempat yang diduga terjadi perubahan garis pantai (erosi atau akresi) baik yang musiman ataupun jangka panjang, yaitu dari ujung perbatasan desa (Tumbak) sampai ujung dusun V Desa Bentenan. Dugaan ini didasarkan

Tabel-6. Waktu pelaksanaan dan peserta pelatihan *monitoring* garis pantai di desa Bentenan, Sulawesi Utara.

No	Waktu	Lama (Hari)	Asal Peserta	Jumlah Peserta
1.	24 - 25 Maret 1998	2	Dusun III, IV, V	12 (2FEO + 10 masyarakat)
2.	25 April 1998	1	Dusun III, IV, V	11 (5 lama + 6 baru)
3.	22 Agustus 1998	1	Dusun III, IV, V	8 (4 lama + 4 baru)

Sumber : Dimpudus (1998)

pada pegamatan awal tim PP SULUT langsung di lokasi dan dari wawancara dengan orang-orang tua/tokoh-tokoh masyarakat. *Bench mark* ditandai pada batu, rumah, antena parabola, pohon dan tiang listrik atau sesuatu yang secara permanen berada atau dapat tahan dalam jangka waktu yang lama di pantai. Pengukuran pada setiap titik memerlukan waktu sekitar 60 menit. Setiap pengukuran garis pantai dapat dilakukan minimal 6 orang, masing-masing tiga orang untuk cara pengukuran *waterpass* dan tiga orang lagi untuk pengukuran cara horison, dengan tugas sebagai pengamat, asisten pengamat dan pencatat. Pengukuran dilakukan pada saat air surut terendah sesuai dengan pengalaman masyarakat atau data dari program *World Tide* (Gambar-5). Hasil pengukuran dicatat dalam tabel yang sederhana dan mudah dibaca, mudah dimengerti dan cukup informatif bagi masyarakat umum untuk menganalisa data secara praktis.

Setelah pelatihan tersebut, para peserta melanjutkan kegiatan pengukuran garis pantai setiap bulan dengan melibatkan anggota masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan dan dipandu oleh FEO dan asistennya. Untuk mengatur pembagian kerja di antara kalangan anggota masyarakat, kegiatan pengukuran garis pantai ini secara informal dikelola oleh kelompok *monitoring* garis pantai. Pembagian kerja masih berdasarkan pada kesadaran dan kesediaan masyarakat yang berminat.

Para peserta pelatihan mendiskusikan, menularkan pengalamannya dan mempersentasikan hasil pengukuran garis pantai kepada anggota masyarakat

lain dalam pertemuan desa, baik formal maupun informal. Para peserta mengakui bahwa pelatihan ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai erosi pantai dan keterampilannya dalam mengukur garis pantai serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan desa. Tanggapan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan

pengukuran garis pantai cukup besar berkaitan dengan pengalaman masyarakat tentang erosi pantai yang telah menyebabkan pindahnya pemukiman penduduk yang terkena erosi. Selanjutnya para peserta mengusulkan adanya pelatihan khusus untuk pengolahan dan analisa data hasil pengukuran sehingga masyarakat melalui kelompok dapat merencanakan dan mencatat perkembangan pantai sebagai dokumen desa.



Foto: Maria T. Dimpudus

Gambar-5. Pelatihan pengamatan garis pantai dalam rangka *monitoring* erosi pantai yang berbasis masyarakat di desa Bentenan

9.2. Pelatihan pengukuran garis pantai bagi masyarakat desa Talise

Ide perlunya pelatihan ini dimulai setelah Pam Rubinoff menyajikan hasil survey erosi pantai yang terjadi di desa Talise yang dihadiri oleh 136 orang. Ia menyimpulkan bahwa jika tidak dilakukan pencegahan maka Pulau Talise akan tenggelam karena erosi-air pasang (Tangkilisan, 1998). Dalam presentasi tersebut digulirkan gagasan pelatihan pengukuran garis pantai dan beberapa peserta sangat responsif, sehingga FEO mempersiapkan pelaksanaannya bersama-sama calon peserta.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada tanggal 15-16 Mei 1998 diikuti oleh 12 orang peserta terdiri dari 10 orang peserta dari masyarakat setempat, FEO dan asistennya. Tempat pelatihan terletak di dusun III, P. Kinabohutan. Pelatih mereka adalah konsultan teknik yang memberikan pelatihan di Bentenan dan asisten pelatih (Suryani) yang menjadi peserta pelatihan di Bentenan. Setelah pelatihan ini, para peserta melanjutkan kegiatan pengukuran garis pantai setiap bulan di enam stasiun (lokasi), yaitu dekat Pulau Komang, Tanjung Pasir, dekat Pemukiman Penduduk, Tanjung Tuteuruga, Karang Tinggi dan dekat Tanjung Bangkok. Partisipasi dan respon masyarakat terhadap kegiatan pelatihan dan pengukuran garis pantai di desa Talise masih kurang. Salah satu alasannya adalah pengalaman masyarakat dengan kegiatan-kegiatan proyek atau bantuan desa pada masa lalu yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

9.3. Analisis Isu

Isu degradasi sumberdaya pesisir seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan erosi pantai merupakan isu yang hampir terjadi secara umum pada sumberdaya wilayah pesisir di setiap kawasan di Indonesia. Pada suatu kawasan berbeda intensitas dan tingkat kerusakan alamnya dengan kawasan lainnya, sehingga prioritas pencegahan atau penanganannya isunya dapat disusun berdasarkan luas- sempitnya intensitas dan rendah-tingginya tingkat kerusakan alam yang terjadi di kawasan tersebut.

Hasil identifikasi isu yang dilakukan oleh PP SULUT terhadap empat desa lokasi proyek (Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise) tercatat sederetan isu pengelolaan sumberdaya pesisir di setiap desa tersebut (Pollnac *et al.*, 1997a).

Isu erosi pantai telah dikenal oleh masyarakat dan terjadi di desa Bentenan dan Talise, sedangkan isu potensi dan degradasi terumbu karang terdapat di desa Blongko dan Tumbak. Potensi terumbu karang di kedua desa tersebut perlu dikembangkan pemanfaatannya, sedangkan proses degradasinya perlu segera dilakukan pencegahan.

Potensi dan degradasi terumbu karang. *Baseline survey* menunjukkan kondisi terumbu karang di wilayah pesisir desa Blongko masih baik sehingga masih potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata lokal. Oleh karena itu PP SULUT merencanakan untuk mencoba model pendekatan *marine sanctuary* sebagai pendekatan pengelolaan pesisir di tingkat desa. Untuk mempertahankan kondisi terumbu karang dari kerusakan diperlukan partisipasi masyarakat sebagai subyek dari program pengembangan tersebut. Masyarakat akan berpartisipasi bila ada kesadaran dan pemahaman terhadap obyek pengembangan sumberdaya pesisir (terumbu karang dan lingkungannya) serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pengembangan sumberdaya tersebut. Untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan terumbu karang salah satu aksinya adalah melaksanakan pelatihan tentang terumbu karang.

Demikian juga yang terjadi di desa Tumbak, bukti-bukti aktifitas destruktif terhadap terumbu karang dapat terlihat dengan jelas dari tumpukan-tumpukan karang di pantai, sisi jalan, sebagai dinding pengaman pantai dan pondasi bangunan/rumah (Pollnac *et al.* 1997b). walaupun di hadapan desa masih dalam keadaan relatif cukup baik. Oleh karena itu upaya pembangkitan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan ekosistem terumbu karang perlu dilakukan dengan kegiatan pelatihan lingkungan hidup tentang terumbu karang.

Erosi pantai. Isu erosi pantai dan banjir sudah biasa dialami oleh masyarakat di desa Bentenan. Masyarakat telah menyadari fungsi proteksi alami daerah pantai oleh terumbu karang dan hutan bakau. Untuk mengamati proses erosi dan banjir tersebut secara berkala, Wiryawan (1997) telah merekomendasikan perlu adanya *monitoring* terhadap profil dan dinamika garis pantai dengan teknologi tepat guna dan sederhana yang melibatkan masyarakat dengan bantuan teknis dari Proyek Pesisir (PP).

Merujuk kepada sejarah banjir yang terjadi pada tahun 1964, 1979 dan 1991, juga adanya banjir musiman pada musim hujan pada saat ombak besar, perlu disusun studi kelayakan sebelum adanya program relokasi dan reklamasi daerah rawa untuk pemukiman. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh PP perlu ditingkatkan terutama terhadap permasalahan erosi dan pengamanan pantai.

Masalah erosi pantai juga terjadi di desa Talise; di Dusun I laju erosi pantai diperkirakan 3 meter per tahun. Sedangkan erosi yang terjadi di bagian selatan pantai Kinabohutan diperkirakan 30 meter sejak tahun 1970-an. Kondisi mangrove di daerah pasang surut dan kondisi terumbu karang di pantai bagian barat sudah mengalami kerusakan. Di Dusun II Tambun erosi telah menyebabkan perumahan penduduk harus mundur sejauh 50 meter dari pantai.

Bertitik tolak dari isu penting di desa Bentenan dan telah ada upaya penangan isu tersebut oleh masyarakat dan pemerintah desa, maka kegiatan pelatihan pengukuran garis pantai memperjelas pemahaman masyarakat terhadap cara pengukuran perubahan garis pantai secara kuantitatif dan akurat pada selang waktu tertentu sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui tingkat erosi pantai yang terjadi pada pantai tersebut. Disamping itu, dalam pelatihan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sebab-akibat dari proses perubahan garis pantai.

10. KEGIATAN PENANAMAN MANGROVE

Pengantar Dalam konteks PP SULUT, penanaman mangrove (bakau) merupakan salah satu bentuk kegiatan *early actions* yang diprakarsai oleh masyarakat dua desa lokasi PP SULUT, yaitu di desa Bentenan dan Tumbak Secara garis besar, kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan di dua desa tersebut, memiliki beberapa perbedaan seperti pada Tabel-7. Tujuan penanaman mangrove ini adalah: (1) melindungi dan melestarikan hutan mangrove, (2) melindungi pantai dari gangguan alami, seperti pengikisan pantai (abrasi), (3) menjaga fungsi ekologis pesisir sebagai tempat asuhan (*nursery ground*) berbagai jenis biota laut.

Sebagai suatu *early actions* yang berbasis masyarakat, kegiatan penanaman mangrove melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya, mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Ciri dari kegiatan penanaman mangrove yang berbasis masyarakat adalah tingginya komitmen dan rasa memiliki dari masyarakat (PP SULUT, 1998). Komitmen dan rasa memiliki yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat mulai dari persiapan kegiatan (penyusunan usulan kegiatan), penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan serta pengelolaannya. Namun, kemampuan masyarakat dalam penyusunan usulan kegiatan masih terbatas. Sehingga dalam tahap persiapan yang hanya melibatkan beberapa orang saja yang bertindak sebagai wakil dari masyarakat, penyusunan usulan kegiatan dibantu oleh FEO PP SULUT.

Dalam penyiapan bibit, penyiapan lahan (pemasangan patok dan pagar), penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan jumlah orang yang dibutuhkan untuk terlibat lebih banyak. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas, PP SULUT melakukan upaya penyuluhan kepada masyarakat. Tujuan penyuluhan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan ekosistem pesisir. Pada tahap pelaksanaan penanaman mangrove, ternyata masyarakat masih belum sepenuhnya terlibat sehingga masih diperlukan upaya untuk mengajak atau mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Mobilisasi ini dilakukan oleh FEO, kelompok pengelola dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pengamatan pada bulan Nopember 1998 ditemukan bahwa mangrove yang ditanam di desa Bentenan tersisa 20 batang (Gambar-6). Rendahnya tingkat survival ini kemungkinan besar disebabkan oleh terpaan ombak dan angin. Masyarakat desa Bentenan mengakui 'kegagalan' ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam hal teknik budidaya mangrove. Sebaliknya, mangrove yang ditanam oleh masyarakat desa Tumbak mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Perbedaan tingkat keberhasilan penanaman mangrove antara dua desa tersebut kemungkinan besar disebabkan perbedaan situasi dan kondisi lingkungan, seperti tingkat keterbukaan lokasi penanaman terhadap laut lepas, kondisi substrat lahan, dan lain-lain (Tabel-7).

10.2. Analisis Isu

Salah satu masalah yang teridentifikasi dalam *baseline survey* PP SULUT yang dilakukan oleh Pollnac *et al.* (1997b) adalah peluang terjadinya peningkatan erosi pantai selain akibat pengambilan karang, yaitu dampak negatif pembukaan kawasan mangrove untuk lahan kegiatan pariwisata dan penebangan pohon mangrove. Sementara masalah penting yang dirasakan oleh masyarakat desa Bentenan dan desa Tumbak adalah semakin turunnya hasil tangkapan.

Logika proses pencapaian manfaat penanaman mangrove dalam konteks tujuan PP SULUT dapat dijabarkan dalam urutan *input, output, outcome* dan *impact*. Sebagai *input* adalah segala sesuatu yang diberikan atau dilakukan di lokasi proyek, yaitu pembibitan mangrove, penanaman dan pemeliharaan oleh masyarakat serta dukungan teknis dan dana dari PP SULUT. Output dari proses atau kegiatan ini adalah adanya perbaikan kualitas lingkungan atau sumberdaya alam dalam bentuk restorasi kawasan mangrove 'baru', yang saat ini baru berumur kurang dari satu tahun. Dengan terjadinya perbaikan kualitas lingkungan atau sumberdaya alam ini, diharapkan terjadi jaminan atau peningkatan kuantitas atau kualitas sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dari kawasan mangrove ini. Misalnya jumlah juvenil ikan yang dapat selamat dan tumbuh berkembang sehingga dapat menjamin suplai terhadap stok ikan yang akan ditangkap oleh nelayan. Contoh lain adalah suplai kayu dan bahan-bahan lain dari kawasan mangrove dan adanya pelindung ekologis terhadap ancaman gangguan

Tabel-7. Garis besar kegiatan penanaman mangrove di desa Bentenan dan Tumbak pada tahun 1998.

No	Perihal	Desa Bentenan	Desa Tumbak
1	Isu lingkungan yang terkait dengan masalah mangrove	Erosi pantai Penurunan hasil tangkapan	Penurunan produk ikan
2	Penggunaan mangrove oleh masyarakat	Selain penggunaan konvensional, ada upaya konversi lahan mangrove menjadi lahan budidaya perikanan dan pariwisata	Penggunaan konvensional
3	Upaya penanaman kembali sebelum PP SULUT ada	Belum ada	Sudah ada (Pollnac <i>et al.</i> , 1998)
4	Luas hutan mangrove yang ada	< 4 ha (sebagian sudah hilang karena pembangunan resort)	213 Hektar
5	Lokasi penanaman kembali sekarang	Pantai timur terbuka sepanjang 2,0 km di hadapan pemukiman	Di teluk terlindung, di belakang pemukiman sepanjang 1,5 km
6	Substrat	Berpasir dan berdasar karang	Tanah berlumpur
7	Tujuan penanaman bakau	Melindungi dan memperbaiki habitat ikan; Melindungi pantai dari abrasi	Melindungi dan melestarikan hutan mangrove dan habitat ikan; Melindungi pemukiman dari angin kencang
8	Persiapan	Patok penyangga sebanyak 300 buah untuk melindungi bibit dari terpaan ombak dan angin	Patok dan pagar untuk melindungi bibit dari gangguan hewan atau binatang liar pemakan bibit
9	Penanam	Kelompok pengelola dengan anggota sebanyak 60 orang	Anggota masyarakat sebanyak 300 orang
10	Lama persiapan penanaman	1 (satu) bulan	2 (dua) bulan
11	Waktu penanaman dilakukan	Desember 1997	April - Juni 1998
12	Jumlah bibit yang ditanam	600 buah	11.258 buah, jenis posi-posi, turibak, ting dan lolaro
13	Sumber bibit	Dari kawasan mangrove di desa Tumbak	Dari kawasan mangrove di desa Tumbak
14	Jumlah bibit yang selamat (November 1998)	20 batang	Kurang lebih 10.000 batang

Sumber: Dokumen-dokumen PP SULUT dan hasil kunjungan ke lokasi

fisik laut ataupun angin. Dalam situasi kondisi alam seperti inilah, masyarakat setempat diharapkan dapat terjamin kehidupannya.

Selain itu, kegiatan penanaman mangrove juga bermanfaat bagi perlindungan pantai terhadap bahaya erosi akibat gempuran ombak. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan kegiatan PP SULUT pada tahun kedua (1998/99), yaitu menyusun peraturan tingkat desa tentang kondisi-kondisi pantai yang membahayakan (*coastal hazard regulations*). Untuk mencapai tujuan tersebut, PP SULUT melakukan strategi dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut, kemudian mendorong masyarakat untuk menyusun prakarsa-prakarsa untuk mengatasi masalah tersebut, lalu membantu mewujudkan prakarsa mereka dengan cara memberi bantuan teknis dan dana. Secara umum, keberhasilan tujuan ini tergantung dari partisipasi dan komitmen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan.

Pemantauan terhadap *output* kegiatan penanaman mangrove dapat dilakukan dengan mengamati perkembangan jumlah bibit yang berhasil tumbuh. Hal ini relatif mudah dilakukan. Sebaliknya, pengukuran *outcome*



Foto: Christovel Rotinsulu

Gambar-6. Penanaman bibit mangrove di kawasan yang sudah diberi pagar untuk mencegah gangguan binatang.

setiap pertemuan yang diadakan dan pada saat pelaksanaan, tetapi juga antusias mereka untuk melakukan kegiatan ini setelah mengikuti program penyuluhan. Dari sudut kinerja, tampak bahwa partisipasi yang tinggi ini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan keberhasilan kegiatan penanaman mangrove. Tingkat kesulitan teknis tampaknya merupakan kendala besar bagi keberhasilan penanaman mangrove; lebih mudah menanam mangrove di daerah yang terlindung (Tumbak) dibandingkan dengan di daerah yang terbuka (Bentenan).

adanya peningkatan jumlah juvenil ikan dan berakibat pada peningkatan produksi ikan adalah pekerjaan yang tidak mudah. *Outcome* terhadap produksi perikanan mungkin baru terlihat jika penanaman mangrove ini dilakukan dalam skala yang besar. *Outcome* yang lebih mudah dilihat adalah adanya mangrove sebagai pelindung pemukiman atau garis pantai.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bakau ini dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Keseriusan dalam partisipasi ini tidak hanya ditunjukkan dalam jumlah kehadiran pada

PENGALAMAN DAN PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL

1. **Apakah yang dimaksud dengan *early actions* atau pelaksanaan awal?** *Early actions* adalah kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan sebelum tersusunnya suatu rencana pengelolaan (*management plan*). Pada umumnya, *early actions* merupakan aktivitas yang bersifat sederhana dalam jangka waktu pendek yang diupayakan mengarah pada penanganan masalah atau isu sederhana tapi penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.
2. **Mengapa *early actions* dilakukan?** *Early actions* dilakukan untuk: a) memperkenalkan proyek pengelolaan wilayah pesisir kepada masyarakat; b) membangun dukungan masyarakat terhadap proyek dan program pengelolaan jangka panjang; dan c) mencoba/menguji pelaksanaan kegiatan pengelolaan dalam skala kecil.
3. **Siapa yang merencanakan dan memprakarsai *early actions*?** *Early actions* dapat diprakarsai baik oleh masyarakat maupun proyek. Proses pemilihan *early actions* yang diprakarsai oleh anggota masyarakat biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Siapa pencetus prakarsa *early actions* tidak menjadi penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang lebih penting adalah bahwa masyarakat merasa memiliki kegiatan tersebut. Hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu *early actions*.
4. **Bagaimana *early actions* dipilih atau ditentukan?** *Early actions* dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan dengan jelas. Di Sulawesi Utara, kriteria *early actions* adalah kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah setempat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir; kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek (beberapa bulan); kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dimana masyarakat memberikan kontribusi, baik tenaga, waktu, material maupun finansial; kegiatan yang melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu saja. Di Sulawesi Utara, semua kegiatan *early actions*, baik yang diprakarsai oleh masyarakat maupun oleh proyek, usulannya selalu dikonsultasikan dengan masyarakat setempat.
5. **Kegiatan *early actions* apa saja yang dipilih?** Di Sulawesi Utara, kegiatan *early actions* yang dilaksanakan adalah penanaman mangrove, pengambilan bintang laut berduri atau *Crown of Thorns* (CoT), pelatihan pengawasan terumbu karang, pelatihan pengawasan garis pantai, pembangunan pusat informasi masyarakat dan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) pada lokasi-lokasi tertentu.
6. **Bagaimana kegiatan *early actions* dilaksanakan?** Bagaimana kegiatan tersebut didanai? Masyarakat setempat atau Proyek Pesisir melalui petugas lapangnya (*field extension officer*) bekerjasama dengan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan *early actions*. Masyarakat mempunyai kontribusi besar dalam semua kegiatan *early actions*, terutama dalam bentuk curahan tenaga kerja, penyediaan bahan/material atau penggunaan peralatan yang diperlukan bagi kegiatan *early actions*, misalnya perahu. Pada saat sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan *early actions* tidak

tersedia di tengah masyarakat atau lokasi setempat, maka pengadaan sumberdaya tersebut sebagian besar diupayakan oleh Proyek Pesisir. Pada akhir-akhir ini, Bappeda Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi berupa dana yang diperlukan untuk kegiatan *early actions*. Dana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan digunakan masyarakat dalam pelaksanaan *early actions*. Penggunaan dana tersebut dilaporkan masyarakat kepada Proyek Pesisir.

7. **Bagaimana keberhasilan *early actions* dinilai?** Walaupun saat ini terlalu dini untuk menilai efektivitas dan mengkaji keberlanjutan kegiatan *early actions*, hasil antara (*intermediate results*) yang ingin diperoleh dari kegiatan *early actions* sudah tercapai. Misalnya dengan terbentuknya kelompok-kelompok pemonitor lingkungan. Penilaian efektivitas kegiatan *early actions* terutama harus dilihat dari tujuan khususnya, seberapa jauh masyarakat mengetahui atau mengenal Proyek Pesisir, seberapa jauh masyarakat memberikan dukungan kepada pelaksanaan Proyek Pesisir, dan seberapa jauh *early actions* berfungsi sebagai cara untuk menguji-coba strategi pengelolaan pesisir yang akan diterapkan oleh Proyek Pesisir. Namun, kriteria keberhasilan tersebut sangat sulit diukur.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman pelaksanaan kegiatan *early actions*:

8. Walaupun *early actions* telah terbukti sebagai suatu cara yang bermanfaat dalam memulai proyek pengelolaan wilayah pesisir di Sulawesi Utara, namun terlalu banyak kegiatan *early actions* dapat mengalihkan perhatian dari upaya perencanaan dan pengelolaan yang utama dan komprehensif.
9. *Early actions* telah menunjukkan hasil-hasil nyata dan telah mendorong masyarakat setempat dalam mendukung kegiatan-kegiatan jangka panjang, walaupun masyarakat belum atau tidak dapat melihat hasil *early actions* dalam waktu yang singkat.
10. Keberhasilan *early actions* ditentukan oleh dua hal, yaitu dukungan masyarakat dan kelayakan teknis kegiatan yang diajukan. Salah satu contoh adalah kegagalan upaya penanaman mangrove yang diprakarsai oleh masyarakat di Bentenan.
11. Beberapa jenis kegiatan *early actions*, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti sarana MCK, pusat informasi dan pengadaan air bersih, memerlukan tatanan penyelenggaraan yang dapat memastikan kelangsungan kerjasama masyarakat dalam penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun tersebut. (Ada kumpulan pengalaman dan teori yang luas tentang cara merancang suatu lembaga yang dapat menjamin kelangsungan kerjasama masyarakat secara kolektif, seperti penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat).
12. Beberapa kegiatan *early actions* harus didahului dengan kegiatan pendidikan umum bagi masyarakat luas untuk memastikan mereka memahami proyek dan kemudian memberikan dukungan.

Pustaka

- Anonimous. 1997. *Laporan Lokakarya Desain dan Perencanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup*. Kerjasama antara CRMP Manado, Yayasan Tanah Rindu Belanda dan Yayasan Kelola, Manado.
- Crawford, B.R., C. Rotinsulu, J.D. Kusen, E. Mantjoro, and A.J. Siahainenia. 1997. *A Community-based coastal resources management approach: Results of initial baseline surveys in the villages of Bentenan and Tumbak, North Sulawesi, Indonesia*. International Seminar on Maritime Communities in a Changing World, Manado, Indonesia, September 23-26, 1997.
- PP SULUT. 1998. *Proyek Pesisir: Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di Sulawesi Utara*.
- Dimpudus, M.T. 1998. *Laporan kerja bulanan Field Extension Officer-Bentenan (April-Oktober 1998)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- English, S., C. Wilkinson, and V. Baker. (Eds.) 1994. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. Australian Institute for Marine Sciences. Australia
- Fraser, N.M., A.J. Siahainenia and M. Kasmidi. 1998. Preliminary results of participatory Manta-tow training: Blongko, North Sulawesi. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia* 1(1): 31-35.
- IIRR. 1998. *Participatory methods in community-based coastal resources management*, Volume 1. International Institute of Rural Reconstruction, Silang, Cavite, Philippines.
- Kasmidi, M. 1997. *Laporan kerja bulanan Field Extension Officer-Blongko (Nopember-Desember 1997)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- Kasmidi, M. 1998. *Laporan kerja bulanan Field Extension Officer-Blongko (January-Februari 1998)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- Moran, P.J. 1998. *Crown of Thorns starfish, questions and answers*. Australian Institute of Marine Science. 35p.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997a. *Rapid assessment of coastal management issues on the coast of Minahasa*. Coastal Resources Management Project, Jakarta, Indonesia.
- Pollnac, R.B., F. Sondita, B. Crawford, E. Mantjoro, C. Rotinsulu, and A. Siahainenia. 1997b. *Baseline assessment of socio-economic aspects of resource use in Bentenan and Tumbak*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, RI.
- Proyek Pesisir. *Year two workplan (April 1998 - March 1999)*. CRC/URI CRMP, Jakarta, Indonesia.
- Siahainenia, A.J. 1998. *Laporan kerja bulanan Technical Extension Officer (Januari-Maret 1998)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- Tangkilisan, N. 1998. *Laporan bulanan Field Extension Officer-Talise (Januari-Mei 1998)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- Tulungen, J. 1998. *Laporan kegiatan Proyek Pesisir di Propinsi Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir - Sulawesi Utara, Manado.
- Ulaen, E. 1998. *Laporan bulanan Field Extension Officer-Tumbak (April-Oktober 1998)*. Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Manado.
- Wiryawan, B. 1997. *Trip Report: Shorefront and tourism development for North Sulawesi (Manado-Bitung-Minahasa)*. PKSPL-IPB, Bogor.

**PROVINCIAL WORKING GROUP:
SUATU UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN**

Oleh:

**Neviaty P. Zamani, M. Fedi A. Sondita, Johnnes Tulungen,
Budy Wiryawan, dan Ramli Malik**

Abstrak

Salah satu misi dari Proyek Pesisir dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah penguatan kelembagaan. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, yakni BAPPEDA Tingkat I, Proyek Pesisir memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Propinsi (*Provincial Working Group (PWG)/Provincial Task Force (PTF)*) dan atau Badan Pengarah/Penasihat Propinsi (*Provincial Advisory Committee /Provincial Steering Committee - PAC/PSC*). Pembentukan kelembagaan ini banyak disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di masing-masing propinsi sehingga proses dan bentuk lembaga ini di tiga propinsi lokasi Proyek Pesisir, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Lampung, tidak harus sama. Di Sulawesi Utara, pada awalnya PWG dibentuk karena dirasakan perlu adanya kelompok kerja yang akan membantu kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT). Dalam perkembangannya, khususnya setelah kegiatan PP SULUT lebih banyak dilakukan di tingkat desa, kegiatan PWG di tingkat propinsi lebih banyak berupa kegiatan pengarah. Oleh karena itu, kelompok kerja semacam ini dirasakan lebih tepat berada pada lingkup tingkat kabupaten, sementara yang lebih dibutuhkan pada tingkat propinsi adalah kelompok yang lebih bersifat sebagai badan pengarah atau penasihat. Dalam perkembangan PWG, PP SULUT tidak hanya memfasilitasi lembaga ini agar dapat membantu kelancaran kegiatan proyek tetapi juga berkeinginan untuk menjadikan PWG sebagai lembaga yang independen dan mampu berperan dalam mengkoordinasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Sulawesi Utara. Dengan melihat pengalaman dari PP SULUT, maka PP LAMPUNG merencanakan pembentukan PWG dan PAC secara bersamaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh PP KALTIM setelah menarik pengalaman dari PP SULUT dan Proyek MREP di Kalimantan Timur.

PENGANTAR

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah pesisir telah mengakibatkan semakin bervariasinya jenis kegiatan dan persoalan di wilayah tersebut. Masalah kependudukan merupakan faktor utama penyebab merosotnya kualitas sumberdaya pesisir dan lautan (Olsen *et al.*, 1998). Sekitar 60% dari penduduk bumi, yang jumlahnya mendekati 5,5 milyar orang pada tahun 1999, hidup di sekitar 60 km dari kawasan pesisir (UNEP, 1992). UNEP memperkirakan akan ada sekitar 11 milyar orang menempati kawasan pesisir pada tahun 2100. Dalam kondisi seperti ini diperkirakan akan terjadi

peningkatan tekanan terhadap sumberdaya pesisir, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun (*seagrass beds*) dan pantai-pantai berpasir. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan permasalahan ini, beberapa bentuk pengelolaan sumberdaya yang secara tradisional murni berbasis masyarakat akan mengalami pergeseran karena peran instansi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ini menjadi sangat dominan (Zamani *et al.*, 1998a).

Untuk menangani permasalahan-permasalahan di kawasan pesisir dan laut Indonesia, sebagai negara kepulauan yang besar dengan kondisi pantainya yang sangat beragam, memerlukan lebih dari 12 instansi pemerintahan terkait

(Sloan and Sugandhy, 1994). Namun sangat disayangkan koordinasi antar instansi pemerintahan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan lautan masih dirasakan sangat kurang (Sloan and Sugandhy, 1994; Dahuri *et al.*, 1996). Ego sektoral diperkirakan merupakan penyebab terjadinya koordinasi yang kurang baik dan akibatnya dapat dilihat dalam bentuk-bentuk kegiatan yang saling tumpang tindih. Koordinasi yang dibutuhkan kerjasama dalam perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks pengelolaan pesisir secara terpadu, koordinasi tersebut perlu dilakukan oleh lembaga dengan kemampuan yang memadai.

Ada dua model strategi yang dapat diterapkan dalam rangka peningkatan kekuatan atau kemampuan kelembagaan pengelola wilayah pesisir dan lautan. Model pertama, pembentukan suatu lembaga baru yang bertugas mengkoordinasi pemanfaatan potensi sumberdaya dan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan sumberdaya pesisir dan lautan. Model kedua, peningkatan peran suatu lembaga yang sudah ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan (PP Lampung, 1998).

Di ketiga lokasi proyek, Proyek Pesisir ‘memilih’ untuk memfasilitasi pembentukan sebuah lembaga atau kelompok baru dengan sistem dan pendekatan yang berbeda, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari proyek. Kelompok Kerja Propinsi atau *Provincial Working Group* - PWG di Sulawesi Utara, *Provincial Advisory Group* dan *Provincial Steering Committee* (PAG/PSC) di Lampung dan *Provincial Steering Committee* (PSC) dan *Provincial Task Force* (PTF) di Kalimantan Timur merupakan lembaga-lembaga yang diharapkan mampu memperkokoh kelembagaan dalam koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Baik PWG/PTF dan PAG/PSC diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu forum atau organisasi yang melibatkan semua lembaga terkait dan *stakeholder* lainnya. Saat ini, secara praktis, lembaga-lembaga tersebut selain diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Proyek Pesisir juga merupakan cikal bakal lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan lembaga-lembaga tersebut di tiga propinsi lokasi Proyek Pesisir, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Lampung. Informasi yang diperoleh dalam kajian ini berasal dari

berbagai sumber, baik secara langsung dari perorangan yang terkait langsung dengan lembaga ini di lapangan (khususnya untuk kasus Sulawesi Utara) dan dokumen-dokumen Proyek Pesisir serta literatur penunjang lainnya. Hasil kajian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kelembagaan yang layak untuk dikembangkan di daerah dalam rangka mendukung program-program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Indonesia.

1. PENGERTIAN *PROVINCIAL WORKING GROUP*

PWG/PTF/PSC/PAG merupakan lembaga-lembaga yang diharapkan dapat mengkoordinasi dan memperkuat pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di kawasan pesisir (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Walaupun ada kesamaan dalam misinya, tugas yang diemban masing-masing lembaga tersebut berbeda. Tugas PWG tampak hampir sama dengan PTF, yaitu melaksanakan pengelolaan (mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan *monitoring*), sedangkan tugas PAG/PSC adalah memberi pengarahannya terhadap badan pelaksana teknis (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Di dalam lembaga-lembaga ini diharapkan terdapat wakil-wakil dari berbagai sektor baik dari instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya, seperti masyarakat, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, pengusaha dan lembaga-lembaga non pemerintahan. Seperti halnya di Jawa Timur dan Sumatra Selatan, anggota dari badan pelaksana teknis (PTF) proyek *Marine Resources Evaluation Project* (MREP) mencakup perwakilan dari berbagai sektor terkait yang ditambah dengan perwakilan dari perguruan tinggi, LSM, pengusaha dan tokoh masyarakat (Bappeda Propinsi Jawa Timur, komunikasi pribadi). Sedangkan anggota PSC pada umumnya terdiri dari pucuk-pucuk pemerintahan di tingkat propinsi, seperti Wakil Gubernur, Ketua Bappeda, Ketua Bapedalda, kepala-kepala dinas/seksi di tingkat propinsi, perwakilan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Dengan komposisi dari berbagai kalangan yang siap membahas permasalahan pengelolaan pesisir dan memikirkan pemecahannya, diharapkan akan ada diskusi dan dialog yang berguna untuk memecahkan permasalahan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Memang dalam pelaksanaannya, hal ini tidak berlangsung

dengan mudah. Namun secara bertahap bentuk-bentuk penyelesaian persoalan secara terpadu dan menyeluruh seperti ini diharapkan akan membudaya.

Meskipun proyek MREP sudah merintis pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan ini di sepuluh propinsi di Indonesia (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Irian Jaya), namun sampai sejauh ini 'pengelolaan secara terpadu' yang dilakukan masih terbatas sampai penyusunan dokumen 'Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir' untuk masing-masing propinsi. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh proyek MREP ini dapat menjadi pendorong pembentukan lembaga serupa yang dapat berperan efektif dalam pengelolaan wilayah pesisir di setiap propinsi. Proyek Pesisir, yang berjangka waktu relatif panjang (1997-2003), diharapkan mampu mewujudkan fungsi koordinasi menjadi lebih efektif. Dalam jangka waktu tersebut, suatu waktu lembaga koordinasi pengelolaan ini diharapkan akan menjadi suatu kelembagaan yang kuat dan mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan pemecahan permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

2. PROVINCIAL WORKING GROUP DI SULAWESI UTARA

Dalam dokumen-dokumen PP SULUT (Zamani *et al.*, 1998b) tidak ditemui penjelasan secara rinci tentang proses dan tahapan pembentukan PWG. Dalam wawancara dengan sejumlah anggota PWG terungkap bahwa pengetahuan mereka tentang pembentukan PWG ini cukup bervariasi. Ada anggota yang memang mengetahui secara pasti proses dan tahapan-tahapan pembentukan PWG; ada juga anggota yang tidak tahu proses awalnya namun mengetahui adanya PWG ini setelah mendapat surat undangan untuk menjadi anggota PWG (Zamani *et al.*, 1998b). Dari Proyek Pesisir diperoleh penjelasan bahwa rencana pembentukan PWG ini sudah dibahas sebelum PP SULUT diresmikan. Pembicaraan ini sudah di mulai semenjak tahun 1997 dalam pertemuan di Cisarua tanggal 15 Januari 1997 yang dihadiri oleh beberapa tokoh kunci dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi (Brian Crawford, *personal communication*). Pada tahap awal tersebut, Proyek Pesisir sebenarnya sudah memberi masukan untuk melibatkan

sektor swasta, tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Namun mengingat beberapa pertimbangan, khususnya dari Pemda Propinsi SULUT, pembentukan PWG ini lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab adanya dominasi perwakilan instansi pemerintah dalam PWG di SULUT. Dengan komposisi anggota seperti ini popularitas Proyek Pesisir di kalangan pemerintah dan desa diharapkan cukup baik. Selain itu, komposisi keanggotaan ini dapat menyebabkan terbinanya koordinasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di Sulawesi Utara. Tidak diketahuinya Proyek Pesisir oleh pihak-pihak selain kalangan pemerintahan kemungkinan disebabkan oleh belum adanya kontak yang intensif antara Proyek Pesisir dengan pihak-pihak lain tersebut, termasuk LSM.

Wawancara dengan sejumlah anggota PWG mengungkapkan bahwa pembentukan PWG pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Proyek Pesisir. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tertuang dalam Surat Keputusan KBPPD Propinsi Sulawesi Utara (1997) tentang pembentukan PWG. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan PWG di Sulawesi Utara didasari pada kebutuhan dari pengembangan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara dalam hal:

- ♦ Peningkatan perencanaan pengelolaan yang memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai institusi terkait dalam menghimpun, menyusun dan mengolah data yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- ♦ Peningkatan kemampuan perencanaan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan identifikasi dan inventarisasi data sumberdaya wilayah pesisir secara akurat dan benar;
- ♦ Menjaga dan memelihara kesinambungan dan kelestarian dalam hal konservasi keanekaragaman hayati.

Salah seorang anggota PWG Sulawesi Utara menjelaskan bahwa PWG adalah semacam tim teknis seperti halnya PTF dalam proyek MREP, namun pembentukan PWG ini tidak ada kaitannya dengan *Provincial Task Force* (PTF) maupun *Provincial Steering Committee* (PSC) proyek MREP di Sulawesi Utara.

Menurut beliau, PWG ini dibentuk dalam rangka menangani hal-hal teknis yang berkaitan dengan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara, sedangkan PTF dibentuk dalam rangka menangani hal-hal teknis yang berkaitan dengan proyek MREP. Salah satu tugas dari PTF adalah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen ‘Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Lautan’ dibawah bimbingan dan arahan PSC (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Dalam penyusunan dokumen tersebut, PTF akan dibantu oleh dinas-dinas pemerintahan.

Beberapa anggota PWG Sulut mengatakan bahwa tujuan pembentukan PWG ini sama halnya dengan pembentukan tim teknis pada proyek-proyek pemerintah lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar kebutuhan-kebutuhan proyek (Zamani *et al.*, 1998c). Oleh karena itu lembaga ini hanya ada atau berfungsi selama proyek masih ada. Apabila proyek tersebut berakhir, kelembagaan ini juga dibubarkan. Salah satu alasan pembubaran ini ada kaitannya dengan sumber pendanaan. Dalam SK KBPPD Propinsi Sulawesi Utara (1997) dikatakan bahwa ‘Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (PPSWP) Sulawesi Utara tahun anggaran 1997/1998’. Pernyataan ini menunjukkan bahwa apabila Proyek Pesisir sudah tidak ada maka lembaga ini juga akan dibubarkan. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa PWG lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mempermudah pengkoordinasian dari kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir, dan bukan sebagai upaya untuk mempersiapkan salah satu cikal bakal lembaga yang kokoh dalam konteks pengembangan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Sulawesi Utara.

Tugas-tugas PWG yang tertuang dalam surat keputusan pembentukannya, meliputi:

- ♦ Penyusunan program/perencanaan proyek;
- ♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- ♦ Mengadakan identifikasi dan inventarisasi data;
- ♦ Mengadakan *monitoring*, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- ♦ Kegiatan lainnya yang dipandang perlu.

Wawancara dengan anggota PWG mengungkapkan bahwa hingga saat ini PWG belum mampu melaksanakan semua tugas-tugas seperti yang telah ditetapkan dalam SK tersebut (Zamani *et al.*, 1998c). Selama ini PWG lebih banyak berperan sebagai lembaga yang mensahkan ataupun mengkaji dan mengkoreksi (mereview) usulan-usulan yang diajukan oleh Proyek Pesisir. Dalam melakukan tugas *monitoring* dan evaluasi, PWG tidak menggunakan panduan khusus. Anggota PWG telah melakukan peninjauan ke lokasi proyek selama satu kali tanpa laporan hasil kunjungan. Hal ini merupakan satu contoh kegiatan *monitoring* yang minimal dapat dilakukan oleh anggota PWG. Walaupun tugas-tugas PWG belum terlaksana sepenuhnya, pada prinsipnya lembaga ini telah melakukan tugasnya dalam membantu kelancaran Proyek Pesisir.

Proyek Pesisir menyadari kesulitan yang dihadapi oleh anggota PWG dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesulitan ini akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antara sesama anggota PWG dan keterbatasan waktu. Lokasi tempat tinggal PWG di Manado kemungkinan telah menyebabkan anggotanya tidak banyak terlibat dalam implementasi kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir yang terkonsentrasi di desa-desa, khususnya di kabupaten Minahasa.

Mengingat rencana dan perkembangan kegiatan proyek yang akan lebih terpusat di desa-desa, khususnya di kabupaten Minahasa, keberadaan kelompok kerja semacam ini dirasakan lebih tepat berada pada tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu tim teknis dalam implementasi kegiatan Proyek Pesisir yang umumnya dilakukan di kabupaten (Proyek Pesisir 1998). Pada tingkat propinsi, sebuah tim penasihat propinsi lebih dibutuhkan untuk dapat memberi masukan bagi tim pelaksana di kabupaten. Oleh karena itu PWG akan diubah statusnya menjadi kelompok penasihat propinsi (*Provincial Advisory Group - PAG*) (PPSWP, 1998; Zamani *et al.* 1998c).

Seorang responden menyatakan bahwa pada tingkat propinsi sebaiknya dibentuk sebuah tim yang berfungsi sebagai pengarah, yaitu *Provincial Steering Committee*, karena yang dibutuhkan oleh kabupaten adalah arahan, dan bukannya nasehat. Ia menegaskan bahwa ada perbedaan pengertian yang mendasar dari ‘nasehat’ dan ‘pengarahan’. Kata nasehat dapat berkonotasi

menasehati atau memberi saran, dimana saran atau nasehat ini boleh diterapkan/diterima untuk ditindaklanjuti, atau boleh juga diabaikan/ditolak. Sedangkan 'pengarahan' berarti pemberian acuan atau garis haluan untuk dilaksanakan dan diikuti. Pertimbangan responden ini patut diperhatikan dalam pembentukan dan pemberian nama tim yang akan membantu Proyek Pesisir di tingkat propinsi.

3. **PROVINCIAL STEERING COMMITTEE di LAMPUNG**

Berbeda halnya dengan di Sulawesi Utara, proses pembentukan lembaga PWG ini di Lampung dimulai setelah dibukanya dan disosialisasikan keberadaan Proyek Pesisir di Lampung. Hal ini memberi peluang kepada PP Lampung untuk lebih berperan dan terlibat secara aktif dalam proses pembentukan ini. Dalam perkembangannya, PP Lampung juga langsung terlibat sebagai anggota dari lembaga ini.

Pada tanggal 25 Juli 1998 telah dibicarakan rencana pembentukan Tim Pengarah Propinsi (*Provincial Steering Committee* - PSC), khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi koordinasi antar sektoral dalam pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Lampung (PP Lampung, 1998). Pembentukan PSC di Lampung didasari pada kebutuhan akan perlunya pengelolaan pesisir secara terencana dan terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Surat Keputusan Gubernur tanggal 22 Mei 1999; SKG/157/BAPPEDA/HK/1999):

- ♦ Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, sekaligus juga melestarikan sumberdaya ekologisnya, diperlukan perencanaan dan strategi pengembangan pengelolaan terpadu sumberdaya wilayah pesisir.
- ♦ Ditetapkannya Lampung sebagai salah satu lokasi studi dan uji coba penerapan (implementasi) pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu yang berbasis masyarakat, melalui Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan (*Coastal Resources Management Project* - CRMP Lampung)
- ♦ Dalam rangka koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan Proyek Pesisir Lampung maka dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis.

Adapun dasar hukum pembentukan tim ini adalah:

- ♦ UU nomor 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- ♦ UU nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang
- ♦ UU nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ♦ PP nomor 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
- ♦ KEPPRES nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- ♦ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor 10/1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung

Pembahasan rencana pembentukan tim tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan lain pada tanggal 4 Nopember 1998 yang menegaskan bahwa anggota tim pengarah ini mencakup instansi pemerintah, LSM dan kalangan pengusaha swasta (PP Lampung, 1998).

Tugas Tim Pengarah Propinsi di Lampung adalah:

- ♦ Mengarahkan pelaksanaan studi dan kegiatan Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan (CRMP) Lampung sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah Lampung, terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;
- ♦ Mengarahkan strategi dan skenario pengembangan wilayah pesisir dan lautan Propinsi Lampung, guna mencapai kondisi ideal dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- ♦ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan (CRMP) Lampung, berdasarkan hasil kerja tim teknis;
- ♦ Menetapkan organisasi dan personalia Kelompok Kerja di masing-masing kabupaten yang terpilih sebagai lokasi uji coba (*pilot project*) kegiatan Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan (CRMP) Lampung.

Anggota PSC ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung. Anggota PSC mencakup kalangan dari instansi pemerintahan, TNI AL, unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Lampung (UNILA), Proyek Pesisir Lampung, Lembaga Penelitian UNILA, pengusaha swasta dan LSM. Dengan komposisi anggota seperti itu tim ini diharapkan dapat memperbaiki koordinasi sektoral dalam perencanaan pengelolaan

wilayah pesisir Lampung. PSC bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi Lampung. Pendanaan kegiatan PSC dibebankan pada dinas dan instansi terkait serta Pengelola Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan (CRMP) Lampung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Lampung sudah memikirkan dan mengantisipasi kelanjutan lembaga ini.

4. TIM TEKNIS PROPINSI (PTF) DAN TIM PENGARAH PROPINSI (PSC) DI KALIMANTAN TIMUR

Berbeda dengan yang terjadi di Sulawesi Utara dan Lampung, pembentukan lembaga tingkat propinsi yang diharapkan dapat membantu Proyek Pesisir dan cikal bakal lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir di Kalimantan Timur memiliki pola tersendiri. Sebagai salah satu propinsi lokasi proyek MREP, Propinsi Kalimantan Timur memiliki *Provincial Task Force* (PTF) dan *Provincial Steering Committee* (PSC). Pendekatan yang dilakukan oleh *Field Program Manager* Proyek Pesisir Kalimantan Timur (PP KALTIM) dalam memfasilitasi pembentukan lembaga yang dapat membantu kelancaran kegiatan Proyek Pesisir, berupaya untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan terkait (Ramli Malik, komunikasi pribadi). Setelah mengumpulkan berbagai informasi dan pendapat, PP KALTIM memutuskan untuk memberdayakan dan memperkuat PTF dan PSC yang sudah dibentuk dalam rangka proyek MREP, namun dengan penyesuaian beberapa anggotanya baik dikurangi maupun ditambah dengan memasukan PP KALTIM, kalangan pengusaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat (PP KALTIM, 1998).

Susunan PSC dan PTF CRMP Kalimantan Timur dikuatkan dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur nomor 050/SK.312/1998 tertanggal 27 Agustus 1998. Mengingat PSC dan PTF telah menyusun dokumen 'Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Kalimantan Timur', program-program PP KALTIM diharapkan menjadi lebih mudah dilaksanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena lembaga-lembaga tersebut sudah memiliki pandangan dan pengalaman dalam merencanakan pembangunan kawasan pesisir di Kalimantan Timur. Namun kenyataannya banyak anggota PTF MREP tidak lagi bertugas atau telah berpindah tugas ke bagian atau

instansi lain. Proses pembentukan lembaga yang terjadi di Kalimantan Timur ini merupakan suatu upaya yang memprioritaskan pemanfaatan sumberdaya atau lembaga yang tersedia di lokasi proyek dimana Proyek Pesisir memilih pendekatan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. PP KALTIM berupaya memfasilitasi kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana pemerintah daerah serta mencoba bersama-sama untuk melangkah pada tahapan penyusunan rencana pengelolaan (*management plan*) bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama, khususnya pengelolaan teluk dan diikuti oleh kegiatan pelaksanaannya. Selain memperkuat dan memberdayakan lembaga resmi PTF dan PSC, PP KALTIM juga mempunyai rencana untuk membentuk 'Kelompok Informal Balikpapan' (PP KALTIM, 1998). Kelompok ini bertujuan untuk menyatukan orang atau lembaga yang memiliki perhatian dan komitmen dalam pengelolaan wilayah Teluk Balikpapan.

5. DISKUSI

Makalah ini menyajikan proses pembentukan suatu lembaga yang diharapkan mampu berperan dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam proses pembentukan kelembagaan ini, proyek pesisir berperan sebagai fasilitator. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, Proyek Pesisir juga berharap mendapat manfaat dan mendapat dukungan dari *stakeholder* di propinsi lokasi Proyek Pesisir bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Proses pembentukan lembaga tersebut di ketiga propinsi lokasi Proyek Pesisir terlihat cukup berbeda. Perbedaan dapat dilihat dari awal proses pembentukan, pihak-pihak yang terlibat, komposisi anggota lembaga, peran Proyek Pesisir, dan nama lembaga yang mencerminkan fungsinya. Di Sulawesi Utara, lembaga tersebut pada mulanya disebut *Provincial Working Group* (PWG). Seiring dengan perkembangan proyek, disadari bahwa keberadaan tim kerja lebih tepat di kabupaten, sedangkan pada tingkat propinsi tim penasihat yang lebih diperlukan. Oleh karena itu PP SULUT mengusulkan untuk dibentuknya Kabupaten Task Force (KTF) di tingkat kabupaten, dan *Provincial Advisory Group* (PAG) di tingkat propinsi.

Di Kalimantan Timur Proyek Pesisir memfasilitasi pembentukan lembaga dengan mengakomodasi lembaga-lembaga yang sudah ada. Dalam hal ini PP KALTIM berusaha untuk meningkatkan fungsi atau peran mereka, melalui konsultasi dengan tokoh-tokoh kunci dari BAPPEDA, baik dengan mengurangi ataupun menambah keanggotaan dari lembaga ini. Keunggulan pendekatan ini adalah proses ‘pembentukan’ yang efisien dan upaya nyata untuk memanfaatkan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh proyek terdahulu, yaitu MREP.

Karena Lampung tidak termasuk dalam program proyek MREP, maka propinsi ini tidak memiliki lembaga *Provincial Working Group* seperti halnya di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Dalam hal ini Proyek Pesisir Lampung mencoba memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut dengan lebih mengutamakan keinginan *stakeholder* pesisir. Setelah melalui suatu proses diskusi-diskusi yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama dengan para *stakeholder*, akhirnya disepakati suatu tim yang disebut dengan tim pengarah (PAC) dan tim teknis propinsi (PTF).

Peran Proyek Pesisir dalam pelaksanaan tugas-tugas PWG di Sulawesi Utara tampak relatif besar. Peran yang besar ini sekaligus dapat mendukung efisiensi mekanisme kerja dan kelancaran dari program-program PP SULUT. Dengan mekanisme dimana PWG lebih banyak berfungsi sebagai lembaga yang membahas konsep-konsep yang diajukan atau disiapkan oleh PP SULUT, kemudian memberi saran, persetujuan atau pengesahan, maka Proyek Pesisir mendapat manfaat besar karena kemudahan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan-kegiatannya dari pemerintah setempat. Dengan mekanisme ini, PP SULUT diharapkan juga berperan dalam penguatan kelembagaan pengelolaan pesisir di Sulawesi Utara.

Dari sisi Pemerintah Indonesia, pemberdayaan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti yang terjadi di Kalimantan Timur tentunya menguntungkan karena *output* atau hasil suatu proyek terdahulu dimanfaatkan dan dikembangkan. Hal ini sangat efektif dan efisien sehingga dapat mendukung upaya penghematan baik dari waktu dan dana. Lain lagi halnya dengan PP Lampung yang mencoba mengakomodasi kepentingan semua pihak/ sektor terkait dan juga meyakinkan para *stakeholder* di Lampung bahwa pembentukan PAC dan

PTF terutama ditujukan untuk membentuk cikal bakal lembaga independen yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu, setelah Proyek Pesisir berakhir di Lampung. Jadi pendiriannya bukan hanya sekedar membentuk lembaga pendukung atau perpanjangan tangan dari Proyek Pesisir. Dalam proses pembentukan PAC ini, PP Lampung mempelajari pengalaman-pengalaman PP SULUT dan PP KALTIM serta Proyek MREP, kemudian mengembangkannya dengan beberapa penyesuaian untuk Propinsi Lampung. Sampai tulisan ini disajikan, kami belum dapat memberikan komentar tentang efisiensi dan efektifitas dari lembaga-lembaga di Kalimantan Timur dan Lampung.

Dari tiga cara pendekatan pembentukan lembaga-lembaga di atas, terlihat bahwa peran Proyek Pesisir di lokasi proyek sangat menentukan proses pembentukan dan fungsi lembaga yang diharapkan sebagai lembaga pendukung kelancaran Proyek Pesisir dan sekaligus cikal bakal lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir. Kajian ini diharapkan dapat membantu para penentu dan pengambil kebijakan mengenai pembentukan kelembagaan serupa di propinsi-propinsi lain. Komposisi anggota lembaga dapat mencerminkan sejauh mana lembaga tersebut dapat mengakomodasi aspirasi *stakeholder*. Pembentukan lembaga tersebut perlu ditunjang oleh kebijakan pemerintah setempat yang bertujuan untuk memperkuat status hukum lembaga tersebut sehingga lembaga ini efektif sebagai lembaga koordinasi pengelolaan kawasan pesisir di lingkungannya yang menentukan arah, mengendalikan, mengawasi, mengkoordinasikan atau mengakomodasi kepentingan sektor-sektor dan proyek-proyek terkait sekaligus mengurangi terjadinya tumpang tindih kegiatan.

Di Sulawesi Utara, kecenderungan perkembangan kelembagaan ke arah tersebut sudah terlihat dengan adanya usulan agar lembaga ini cukup independen untuk memberi arahan bagi setiap proyek-proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir. Pertemuan rutin yang difasilitasi oleh NRM-2 yang melibatkan hampir sebagian besar proyek-proyek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti MREP, COREMAP, Proyek Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan pemerintahan (NRM-2, 1998) memiliki peluang untuk dapat mengembangkan dan mewujudkan ide ini.

PENGALAMAN DAN PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL

- 1. Apakah yang dimaksud dengan *provincial working group*?** *Provincial working group* (PWG) adalah kelompok atau panitia khusus yang para anggotanya umumnya adalah staf instansi-instansi pemerintahan yang memiliki tanggungjawab hukum di wilayah pesisir.
- 2. Apa peran dan tanggungjawab PWG?** PWG dibentuk dalam rangka: a) memberikan arahan kebijakan dan membantu kelancaran pelaksanaan Proyek Pesisir; b) mengkoordinasikan proyek dan membantu pemerintah daerah melalui proyek di tingkat propinsi; c) meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu (*integrated coastal management*) di kalangan instansi-instansi pemerintahan, dan dalam beberapa kasus mencakup juga kalangan pengusaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan d) membina komunikasi dan pemahaman antar staf instansi pemerintahan dan para *stakeholder* lainnya. Nama lembaga PWG ini berbeda-beda di setiap propinsi lokasi proyek: *Provincial Working Group* (PWG - Sulawesi Utara), *Provincial Task Force* dan *Provincial Steering Committee* (PTF dan PSC - Kalimantan Timur) dan *Provincial Advisory Committee/Provincial Steering Committee* (PAC/PSC-Lampung).
- 3. Bagaimana anggota PWG dipilih?** Komposisi anggota PWG berbeda di antara masing-masing propinsi lokasi Proyek Pesisir, tetapi di setiap lokasi ada wakil-wakil dari instansi-instansi pemerintahan terkait dan setiap PWG diketuai oleh perwakilan dari Bappeda Tingkat I Propinsi. Di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, para Manajer Program Lapangan (*Field Program Manager-FPM*) dan/atau para penasihat teknis (*Technical advisor-TA*) dan perwakilan BAPPEDA menentukan anggota PWG berdasarkan instansi-instansi yang mereka anggap perlu atau relevan untuk terlibat dalam kelompok ini. Sementara itu, di Lampung FPM bekerjasama dengan wakil-wakil *stakeholder* untuk menentukan siapa yang seharusnya dilibatkan.
- 4. Kegiatan apa yang telah dilakukan oleh PWG?** PWG telah terlibat dalam sejumlah kegiatan Proyek Pesisir. Di Sulawesi Utara, PWG terlibat dalam proses pemilihan desa lokasi proyek, studi tour untuk perbandingan, pelatihan lokakarya, penyusunan profil desa lokasi proyek, dan juga peninjauan terhadap kegiatan tahun pertama dan anggaran Proyek Pesisir. Kelompok ini juga membantu Proyek Pesisir dalam penyusunan laporan Proyek Pesisir kepada Gubernur dan Bupati. Di Kalimantan Timur, PWG berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Sedangkan di Lampung, walaupun kelompok ini secara formal baru akan mulai melakukan pertemuan, anggotanya sudah terlibat dalam beberapa kegiatan Proyek Pesisir, seperti pelatihan, pembuatan profile pesisir Propinsi Lampung dan proses pembentukan PWG.
- 5. Sejauh mana PWG berperan efektif?** Di Sulawesi Utara kelompok ini melakukan pertemuan bulanan dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan proyek yang spesifik, seperti pemilihan desa lokasi proyek. Akhir-akhir ini pertemuan rutin PWG menjadi sekali setiap 3 bulan dan partisipasinya cenderung bersifat pasif. Meskipun peran kelompok ini dalam koordinasi pelaksanaan proyek di tahun pertama (1997/1998)

sangat penting, namun ternyata sulit untuk menemukan bagaimana caranya agar kelompok ini dapat terlibat lebih aktif dan efektif di tahun selanjutnya. Sementara itu, pada tahun ke 2 (1998/1999) di Sulawesi Utara *Kabupaten Task Force* (KTF) dibentuk. Tugas KTF ditekankan pada pengkajian dan peninjauan usulan rencana pengelolaan pesisir di tingkat desa. Saat ini PWG berubah menjadi *Provincial Advisory Group* (PAG), dengan tugas utama menyangkut kegiatan-kegiatan pengarahan, seperti diskusi-diskusi kebijakan untuk penerapan strategi pengelolaan pesisir tingkat desa secara lebih luas (*scaling up*) dan kegiatan lain lebih sesuai dengan kapasitas dan peranannya sebagai tim pengarah. Di Kalimantan Timur, *Provincial Steering Committee* (PSC) dan *Provincial Task Force* (PTF) baru saja dibentuk dan mereka telah mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknis dan pelatihan. Di Lampung, para calon anggota *Provincial Steering Committee* (PSC) telah mulai membantu dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan program Proyek Pesisir setempat.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman *provincial working group*:

6. Tim penasihat atau tim pengarah seharusnya dibentuk dalam waktu yang tepat agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kegiatan utama proyek, seperti pemilihan lokasi lapang dan lokasi contoh. Namun tidak cukup jelas apakah tim semacam ini selalu diperlukan. Jika tim ini diperlukan maka tim ini harus dibentuk.
7. Sebuah surat keputusan (SK) dari Gubernur diperlukan untuk memberi legitimasi atau kewenangan bagi lembaga koordinasi propinsi semacam PWG. Namun SK tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas instansi pemerintahan.
8. Jika pengusaha swasta dan LSM diinginkan untuk berpartisipasi dalam kelompok ini, Surat Keputusan Gubernur mungkin tidak selalu sesuai. Suatu kelompok lain yang sifatnya informal dimana anggotanya mencakup berbagai macam *stakeholder* mungkin lebih diminati. Namun aturan main dan pengambilan keputusan dalam kelompok lain ini mungkin harus dirancang berbeda. Pemilihan wakil-wakil dari lembaga-lembaga yang bukan instansi pemerintahan membutuhkan suatu pemikiran yang hati-hati mengingat satu lembaga belum tentu dianggap mewakili lembaga-lembaga lainnya.

Pustaka

- NRM-2. 1998. *Prosiding Lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Alam Sulawesi Utara*. 29 September 1998, Manado. The Natural Resources Management 2, Jakarta.
- Dirjen Pembangunan Daerah. 1998. *Technical manual for preparation of a provincial coastal and marine management strategic plan (English version)*. Marine Resource Evaluation and Planning Project, Jakarta.
- PP Lampung. 1998. *Activity report of Lampung site (April - October 1998)*. Presented at Senior Management Team, 17-20 March 1998, Jakarta. Proyek Pesisir, Jakarta.
- PP KALTIM. 1998. *Status Proyek Pesisir Kalimantan Timur*. Presented at Senior Management Team, 17-20 March 1998, Jakarta. Proyek Pesisir, Jakarta.
- Proyek Pesisir. 1998. *Year Two Workplan (April 1998 - March 1999)*. Proyek Pesisir, Jakarta.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Olsen, S., J. Tobey and L. Z. Hale. 1998. *A learning-based approach to Coastal Management*. *Ambio* 27(8): 611-619
- PPSWP. 1998. Hasil Rapat Tim Kerja PPSWP, 25 November 1998. Proyek Pesisir Sulawesi Utara
- Sloan, N.A. and Sugandhy. 1994. *An overview of Indonesian coastal environment management*. Coastal Management Vol. 22.
- UNEP. 1992. *The world environment. In: Environment and Development Briefs*. Coasts. UNESCO 1993.
- Zamani, N.P., K.S. Putra, T. Kusumastanto and L. Adrianto. 1998a. *Perspective on community participatory in integrated coastal resources management in Indonesia*. Seminar on community based management, 5 January 1998, Bogor. CCMRS-IPB, Bogor.
- Zamani, N.P., M.F.A. Sondita, A. Tahir, Burhanuddin dan B. Haryanto. 1998b. *Pendokumentasian kegiatan Provincial Working Group (PWG) di Sulawesi Utara: Sebuah hasil kajian terhadap dokumen-dokumen Proyek Pesisir*. PKSPL-IPB, Bogor.
- Zamani, N.P., M.F.A. Sondita, A. Tahir, B. Haryanto dan Burhanuddin. 1998c. *Pendokumentasian kegiatan Provincial Working Group (PWG) di Sulawesi Utara: Hasil wawancara dan observasi di lapang*. PKSPL-IPB, Bogor.

KEGIATAN *MONITORING* PROYEK PESISIR SULAWESI UTARA

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Burhanuddin dan Brian R. Crawford

Abstrak

Monitoring proyek merupakan bagian dari suatu kegiatan atau proyek untuk mengetahui proses, kemajuan atau perkembangan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, serta untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Selain itu *monitoring* juga bermanfaat untuk mengetahui dampak dari adanya kegiatan proyek. Kegiatan *monitoring* Proyek Pesisir SULUT dilakukan terhadap a) pelaksanaan kegiatan yang meliputi proses perencanaan dan perkembangan kegiatan dan b) dampak Proyek Pesisir terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan sumberdaya lingkungan/alam. Tujuan *monitoring* yang dilakukan Proyek Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT) adalah untuk mengetahui kendala dalam implementasi, menyusun strategi masa mendatang, dan memenuhi ketentuan dari penyandang dana (USAID). *Monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pertemuan rutin tiap bulan dan pengisian *form data Performance Monitoring Plan* (PMP) tiap enam bulan sekali, kunjungan lapangan, serta penulisan dokumen/laporan *Field Extension Officer*. Sedangkan *monitoring* dampak proyek dilakukan dengan cara membandingkan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi di desa proyek dengan arah perkembangan yang terjadi pada desa kontrol yang tidak ada kegiatan Proyek Pesisir.

PENGANTAR

Monitoring merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau proyek yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan dari rencana kegiatan proyek yang sedang berjalan. Dengan melaksanakan *monitoring*, arah perkembangan kegiatan proyek dapat diamati oleh pengelolanya dan jika suatu masalah ditemukan, maka hasil temuan dari aktifitas *monitoring* tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya (Olsen *et al.*, 1998). Selain untuk keperluan mengetahui kemajuan atau proses pelaksanaan kegiatan, *monitoring* juga bermanfaat untuk mengetahui dampak kegiatan selagi kegiatan berjalan maupun sudah selesai dikerjakan. Dengan demikian, *monitoring* merupakan salah satu metode untuk mendapatkan informasi tentang suatu kegiatan sebagai bahan masukan evaluasi. Evaluasi ini oleh Lowry (1998) dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) evaluasi kinerja (*performance evaluation*) yang biasanya dilakukan setelah proyek berakhir, (2) penilaian kapasitas manajemen (*management capacity assessment*) yang bertujuan untuk menentukan

diagnosa atau keadaan suatu kegiatan sehingga seyogyanya evaluasi ini dilakukan pada saat proyek sedang berjalan, dan (3) penilaian *outcome (outcome assessment)* yang bertujuan untuk mengetahui dampak proyek sehingga penilaian ini dilakukan setelah proyek berakhir. Secara umum, *monitoring* akan bermanfaat bagi pengelola kegiatan atau proyek, pemberi dana, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Tujuan dari *monitoring* terhadap proses kegiatan yang sedang atau berlangsung dilakukan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT) adalah untuk: (1) mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam implementasi kegiatan di tingkat desa dan propinsi; (2) menyusun strategi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang berdasarkan kekurangan yang sudah diketahui; (3) memenuhi ketentuan dari pemberi bantuan dana (USAID). Sedangkan tujuan *monitoring* yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan adalah: (1) mengetahui adanya dampak kegiatan proyek terhadap kondisi kehidupan masyarakat maupun kondisi sumberdaya wilayah pesisir;

(2) mendokumentasikan dan mengukur tingkat dampak atau perkembangan dari kegiatan proyek yang sudah dilakukan.

Proyek Pesisir melaksanakan dua jenis *monitoring*, yaitu: (1) *monitoring* terhadap proses kegiatan selama proyek berjalan, dan (2) *monitoring* yang dilakukan setelah kegiatan proyek untuk melihat dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan dan pengaturan penguasaan atau pemanfaatan sumberdaya. Kedua jenis *monitoring* ini pada dasarnya saling berhubungan karena proses kegiatan dapat menentukan hasil atau dampak kegiatan. Dalam tulisan ini *Learning Team* IPB memberikan fokus perhatian terhadap rencana pelaksanaan *monitoring* jenis kedua. Kegiatan *monitoring* jenis pertama sudah ada dalam *framework* pemberi donor, yaitu USAID, dalam bentuk PMP (*Performance Monitoring Plan*). Metode yang diterapkan oleh *Learning Team* IPB dalam pendokumentasian kegiatan *monitoring* PP SULUT dijelaskan dalam Sondita (1998), sesuai dengan yang disarankan oleh Lowry and Needham (1998).

1. KEGIATAN MONITORING PP SULUT

1.1. *Monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan

PP SULUT secara teratur melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa setiap bulan melalui pertemuan dan laporan bulanan penyuluh lapangan (Field Extension Officer - FEO) serta laporan 6 bulanan melalui pengisian formulir *Performance Monitoring Plan* (PMP). Hal-hal yang dilaporkan oleh EO diantaranya adalah kemajuan suatu kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PP SULUT. Variabel yang dilaporkan adalah jumlah peserta pertemuan, komposisi lelaki/perempuan peserta dan jumlah pertemuan.

Monitoring proses kegiatan diarahkan oleh pengelola PP SULUT terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatannya di tingkat desa. Contoh kegiatan di desa adalah pelatihan dan pengukuran perubahan garis pantai di desa Talise dan Bentenan, kegiatan *monitoring* terumbu karang di Blongko serta kegiatan penanaman mangrove di desa Bentenan dan Tumbak. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui sampai dimana perkembangan kegiatan tersebut sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun terhadap proyek.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, banyak contoh kegiatan lain yang dibahas dalam pertemuan rutin (satu atau dua bulanan) di Kantor PP SULUT. Rincian dari kegiatan ini, misalnya jumlah partisipan, komposisi partisipan suatu pertemuan, jenis pertemuan dan publikasi yang dihasilkan dan distribusinya, merupakan informasi yang dilaporkan dalam PMP Report. Catatan administratif rincian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam PMP Report PP SULUT, yang sekarang ini formatnya sedang dimodifikasi.

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dengan berbagai kunjungan lapang oleh Senior Field Extension Officer, Field Program Manager, dan para *Technical advisor*, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kunjungan lapang ini walaupun tampaknya seperti formalitas dan informal namun sangat penting. PP SULUT tidak ingin hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis dan pertemuan rutin, *monitoring* kegiatan dan validasi laporan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kunjungan ke lapang. Selain dokumen yang dibuat oleh para EO, pertemuan rutin mereka di kantor PP SULUT di Manado, kunjungan lapang, pihak-pihak lain dapat pula melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan lewat berbagai laporan (seperti Pollnac *et al.* 1997a, Pollnac *et al.* 1997b), rencana kerja dan makalah-makalah yang disajikan dalam berbagai konferensi (misalnya Tulungen *et al.* 1998a, Tulungen *et al.* 1998b) yang menerangkan berbagai keputusan tentang strategi Proyek Pesisir, membahas pengalaman awal, kajian terhadap pola pikir rancangan proyek ini, pengembangan model Sulawesi Utara dan rencana *monitoring*.

1.2. *Monitoring* dampak Proyek Pesisir

PP SULUT berpendapat bahwa pendekatan sistematis dalam *monitoring* dampak proyek perlu diterapkan mengingat PP SULUT dirancang dan ditujukan untuk mencari bentuk-bentuk model *community-based coastal management* yang efektif di Sulawesi Utara. Hal ini berarti kondisi awal dan perubahan-perubahan yang diakibatkan proyek perlu didokumentasikan dengan baik. Sehingga kita memiliki argumen yang kuat berdasarkan pengalaman di lapang.

Mengingat Proyek Pesisir diharapkan berdampak positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan kondisi lingkungan serta sumberdaya pesisir, PP SULUT perlu melakukan *monitoring* terhadap kondisi-kondisi tersebut di desa-desa proyek. Sejauh ini PP SULUT belum mempunyai panduan untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* ini. Namun, pada prinsipnya pengamatan ulang terhadap indikator keberhasilan proyek dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang diterapkan oleh Pollnac *et al.* (1997b) untuk aspek sosial dan ekonomi, dan English *et al.* (1994) untuk aspek sumberdaya dan lingkungan. Secara khusus, pilihan indikator yang diukur kembali tersebut harus sesuai dengan tujuan dari model pendekatan yang diterapkan.

Kegiatan *monitoring* terhadap dampak proyek terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan lokasi proyek sudah mulai direncanakan secara lebih tajam oleh PP SULUT, paling tidak dengan adanya memo dari *Technical advisor* pada bulan Agustus 1998 tentang usulan kegiatan *monitoring* yang bersifat jangka panjang setelah baseline study dilakukan (Crawford, 1998). Kegiatan tersebut mencakup:

1. *Monitoring* sosial-ekonomi dengan survei terhadap masyarakat desa proyek dan desa kontrol dengan sampel random pada tahun 2001 dan 2003 menggunakan kuesioner yang sama dalam baseline study (Pollnac *et al.*, 1997b);
2. *Monitoring* lingkungan dengan survey lengkap pada tahun 2001 dan 2003, dan Line Intercept Transect setiap tahun mulai 1999 hingga 2003 pada perairan desa proyek dan desa kontrol;
3. *Monitoring* terhadap upaya penangkapan dan produksi perikanan;
4. *Monitoring* lain terhadap kegiatan penambangan karang, pemboman ikan, perubahan garis pantai, bangunan rumah baru, rumah yang tergusur ombak, kebersihan pantai, dan lain-lain seperti yang dilaporkan dalam *baseline study* (Pollnac *et al.*, 1997b).

Sesuai dengan pendekatan *community-based* yang diterapkan oleh Proyek Pesisir, kegiatan *monitoring* setelah proyek berakhir direncanakan akan dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun kedua ini PP SULUT telah berhasil mendorong pembentukan kelompok-kelompok anggota masyarakat yang berminat untuk melakukan *monitoring* lingkungan terumbu karang dan garis pantai di desa-

desa lokasi proyek, yaitu Talise, Bentenan, Tumbak dan Blongko (lihat Haryanto *et al.*, 1999, prosiding ini). Mereka telah mendapat latihan dari PP SULUT dan diharapkan memiliki kemampuan yang memadai untuk kegiatan *monitoring* lingkungan.

Sebagai landasan untuk menentukan adanya dampak proyek terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan serta sumberdaya, PP SULUT telah melaksanakan *baseline study* di empat desa proyek (Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise; tahun 1997) dan enam desa kontrol (Minanga dan Rumbia (Pollnac *et al.*, 1998); Sapa dan Boyongpante; Kahuku dan Aerbanua; tahun 1998). Pelaksanaan *baseline study* ini tidak dilakukan secara serempak karena ada keterbatasan tenaga dan waktu. Dari studi baseline ekonomi terungkap indikasi adanya penggunaan peledak dan racun dalam penangkapan ikan. Sedangkan persoalan bintang laut berduri (*Crown of Thorns*) terungkap dari *baseline study* lingkungan, bukan dari wawancara dengan penduduk desa.

Pada lokasi-lokasi proyek dimana direncanakan akan adanya kawasan perlindungan laut (*marine sanctuary*), *monitoring* dapat diarahkan terhadap indikator keberhasilan suatu kawasan perlindungan sesuai dengan tujuan pendirian kawasan tersebut. Tulungen *et al.* (1998a) menyatakan bahwa pendirian *marine sanctuary* di desa Blongko ditujukan untuk meningkatkan produksi ikan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas terumbu karang, melindungi keanekaragaman hayati laut dan melindungi tempat berkembangbiaknya biota laut. Sebagai persiapan partisipasinya di masa yang akan datang, beberapa anggota masyarakat dari desa Blongko, Bentenan dan Tumbak sudah mengikuti pelatihan *monitoring* terumbu karang dengan teknik *manta-tow*.

Sedangkan pada lokasi proyek dimana diharapkan akan terbentuknya kesepakatan tentang aturan-aturan mengenai pencegahan bahaya di kawasan pesisir (misalnya erosi pantai), *monitoring* dapat difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat setempat, misalnya perpindahan lokasi perumahan ke tempat yang lebih aman, kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan setempat dan lain-lain. Upaya awal menuju tersusunnya kesepakatan untuk pencegahan bahaya tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk melihat dan

menilai lokasi-lokasi berbahaya melalui pengamatan terhadap garis pantai. Untuk itu beberapa anggota masyarakat dari desa Talise dan Benteenan telah mengikuti pelatihan pengukuran garis pantai.

Khusus untuk *monitoring* kondisi lingkungan, Oxley (1994) menyarankan tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan *monitoring* adalah sebagai berikut::

1. Menentukan tujuan *monitoring*;
2. Menentukan pada skala apa *monitoring* ini akan dikerjakan;
3. Mengidentifikasi faktor penentu keragaman obyek (variabel) yang dimonitor, faktor apa yang penting dan realistis untuk diukur dan dikontrol;
4. Merumuskan replikasi pengamatan pada semua tingkat skala yang diinginkan
5. Percobaan *monitoring* dalam skala kecil (*pilot study*) untuk memperoleh informasi penting dan melihat faktor mana yang sebaiknya dinilai;
6. Mempertimbangkan bagaimana mencatat dan menyimpan data;
7. Menganalisis data dari *pilot study* dan menentukan jenis data terbaik/cocok untuk dianalisis;
8. Mempertimbangkan kemampuan pelaksana *monitoring*;
9. Setelah data terkumpul, memeriksa dan menguji data secara teratur untuk memastikan kualitas data dan mengidentifikasi adanya kesalahan atau penyimpangan.
10. Melakukan analisis data secara lengkap setiap tahun.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan lautan tampaknya proporsional sesuai dengan kemampuannya. Sebagian anggota masyarakat sudah disiapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan *monitoring* lingkungan. Sebaliknya dalam *monitoring* dampak sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat tampaknya akan tercurah terutama dalam memantau kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan lokal yang mereka buat. Dalam *baseline study*, masyarakat banyak berperan dalam memberikan informasi dan dukungan kelancaran pelaksanaan *study*. Sementara

ini, PP SULUT sudah memiliki staf yang berpengalaman melaksanakan survey sosial-ekonomi sebagaimana survey untuk *baseline study*. Untuk keperluan ini Prof. Richard Pollnac dari University of Rhode Island sedang menyiapkan sebuah buku panduan; draft pertama sudah selesai.

2. RELEVANSI *MONITORING* DENGAN PENGELOLAAN PESISIR

PP SULUT bertujuan untuk mencoba model pengelolaan pesisir yang diakui efektif dalam menstabilkan atau meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kondisi sumberdaya alam dimana mereka bergantung. Pertanyaan yang perlu dikemukakan perihal model pengelolaan pesisir adalah bagaimana kita dapat mengetahui adanya dampak dari proyek terhadap dua komponen ekosistem pesisir, yaitu masyarakat pesisir dan lingkungan/sumberdaya alam. Pollnac (1998) menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya dampak pengelolaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan kita seyogyanya memiliki informasi tentang kondisi masyarakat dan lingkungannya sebelum pengelolaan tersebut berlangsung, yaitu *baseline data*.

Bersamaan dengan pengumpulan data untuk *baseline*, data dari desa-desa yang berdekatan juga perlu dikumpulkan karena desa tersebut akan dijadikan sebagai desa kontrol. Kondisi desa kontrol ini sebaiknya mempunyai keadaan sosial ekonomi dan lingkungan yang mirip dengan kondisi desa proyek. Tujuan dari desa kontrol ini bukan untuk menentukan besar atau tingkat dampak yang diberikan oleh proyek tapi untuk melihat perbedaan kecenderungan (*trend*) perubahan yang terjadi di desa proyek dengan kecenderungan yang terjadi di desa kontrol. Hal ini untuk memisahkan perubahan karena faktor proyek dan faktor non-proyek (Pollnac 1998, Sondita 1998).

PENGALAMAN DAN PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL

1. **Apa yang dimaksud dengan kegiatan *monitoring*?** Kegiatan *monitoring* adalah kegiatan yang secara sistematis melakukan pendokumentasian terhadap upaya-upaya yang dilakukan Proyek Pesisir, baik pada skala proyek secara keseluruhan maupun pada skala program di setiap skala geografi yang relevan.
2. **Apa tujuan kegiatan *monitoring*?** Tujuan kegiatan *monitoring* adalah: a) mengidentifikasi perubahan-perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan yang memiliki kemungkinan berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir; b) untuk memastikan kegiatan-kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan; c) untuk mendokumentasikan kegiatan yang menyangkut penyusunan peraturan-peraturan (*governance activities*), termasuk persiapan rencana-rencana dan peraturan lokal, upaya penegakan hukum atau aturan dan kepatuhan terhadap hukum atau aturan tersebut; d) mengumpulkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi keperluan para *Program Manajer* Lapang dan pemberi dana; dan e) mengumpulkan informasi untuk keperluan kegiatan pembelajaran (*learning activity*), penyesuaian atau adaptasi rancangan proyek dan pengangkatan model-model yang potensial diterapkan di tempat lain.
3. **Jenis kegiatan *monitoring* apa saja yang sudah dilakukan oleh Proyek Pesisir?** Seperti sudah dilakukan oleh Proyek Pesisir, kegiatan *monitoring* mencakup: a) kegiatan *monitoring* jangka panjang terhadap perubahan kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan tingkat desa; b) perbandingan hasil awal, hasil antara (*intermediate output*) dan *output* akhir dari kegiatan-kegiatan khusus dengan tingkat pencapaian yang diharapkan (*benchmarking*); c) ringkasan kegiatan Proyek Pesisir untuk setiap lokasi proyek dan kantor pusat proyek (seperti diperintahkan oleh USAID/*Project Monitoring Performance*). Kegiatan *monitoring* di tingkat desa mencakup pelaksanaan survey-survey dan pengamatan sistematis yang dilakukan oleh Proyek Pesisir serta kegiatan *monitoring* yang melibatkan anggota masyarakat.
4. **Bagaimana status kegiatan *monitoring*?** Saat ini: a) kegiatan *monitoring* masyarakat secara sistematis tengah berlangsung di desa-desa lokasi proyek di Sulawesi Utara; b) kegiatan *monitoring* yang melibatkan masyarakat desa telah berlangsung di empat desa lokasi proyek; c) sebuah sistem telah dirancang dan tersedia untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang semua kegiatan proyek (*Performance Monitoring Plan - PMP*). Tidak ada rencana sistematis untuk memonitor setiap kegiatan proyek di tingkat propinsi. Namun terdapat banyak informasi sudah dikumpulkan atau didokumentasikan di Sulawesi Utara dalam bentuk laporan bulanan para petugas penyuluh lapangan, selain dokumen-dokumen proyek lainnya. Dalam tahun kedua (1998/1999), *Learning Team* telah memusatkan perhatiannya untuk memonitor kegiatan-kegiatan tingkat desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Informasi untuk kegiatan pembelajaran ini diperoleh dari laporan-laporan lokakarya, wawancara dengan para staf lapangan dan laporan-laporan yang disusun oleh *Learning Team*.

5. **Bagaimana variabel-variabel yang dimonitor tersebut ditentukan?** Di Sulawesi Utara, staf proyek dan konsultan teknis menentukan variabel-variabel yang akan untuk baseline survey dan *monitoring*. Mereka juga menentukan variabel-variabel untuk kegiatan *monitoring* lingkungan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Variabel-variabel PMP ditentukan oleh USAID dengan konsultasi kepada *Chief of Party*. Namun, data untuk PMP dikumpulkan oleh staf proyek dan disatukan oleh staf *Learning Team*. Staf Proyek Pesisir menemukan sejumlah variabel-variabel PMP, seperti jumlah orang yang berpartisipasi, sangat berguna.
6. **Prosedur apa yang diterapkan untuk memastikan kebenaran data?** Di Sulawesi Utara, prosedur yang jelas telah dibuat untuk mengumpulkan dan pengolahan data dari kegiatan *monitoring*. Beberapa prosedur untuk memonitor aspek sosio-ekonomi dan kegiatan *monitoring* yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat sudah diuji-coba di desa lokasi proyek di Sulawesi Utara. Prosedur-prosedur ini telah diterapkan dengan hati-hati. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengolahan data memerlukan waktu yang cukup banyak.

Beberapa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pengalaman pelaksanaan kegiatan *monitoring*:

7. Kegiatan *monitoring* terbukti merupakan kegiatan penting dalam hal meningkatkan nilai pertanggungjawaban (*accountability*) dan kinerja Proyek Pesisir serta mendukung proses pembelajaran. Namun, pentingnya kegiatan *monitoring* ini kadang tidak disadari oleh staf Proyek Pesisir. Di Sulawesi, pengalaman Proyek Pesisir menunjukkan bahwa kegiatan *monitoring* ini memerlukan waktu yang relatif besar dan sumberdaya untuk merancang sistem *monitoring*, prosedur, melaksanakan kegiatan pelatihan staf, pengumpulan dan pengolahan data.
8. Di Sulawesi Utara, informasi *baseline* terbukti berguna bagi penyusunan profil setiap lokasi proyek.
9. Dalam penyusunan dan perbaikan program *monitoring* untuk kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir di desa penekanan perlu dilakukan dalam hal penilaian pencapaian tujuan-tujuan antara (*intermediate objectives*). Maksud dari *monitoring* ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana dan setiap langkah telah dilakukan secara efektif. Sebagai contoh, dalam kegiatan penanaman mangrove, apakah lokasi penanaman adalah tepat, apakah spesies yang ditanam cocok, apakah mangrove ditanam dengan tepat, apakah mangrove yang ditanam tumbuh dengan baik atau mati, dan lain-lain?
10. Kegiatan *monitoring* yang efisien memerlukan diketahuinya indikator kunci yang dapat dimonitor secara intensif. Namun untuk memonitor pengelolaan pesisir di tingkat desa, hingga kini belum ada kesepakatan tentang apa indikator kunci ini.

Pustaka

- Crawford, B.R. 1998. *Memorandum*. Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir - Sulawesi Utara. 2p.
- English, S., C. Wilkinson, and V. Baker. (Eds.) 1994. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. Australian Institute for Marine Sciences.
- Haryanto, B. M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani, Amiruddin, Burhanuddin, Johnnes Tulungen, Christovel Rotinsulu, Audrie Siahainenia, Meidi Kasmidi, Egmond Ulaen dan Pierre Gosal. 1999. Kajian terhadap konsep *early actions* Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Dalam: *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999*, 1 Maret 1999, Bogor. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan Coastal Resources Center - University of Rhode Island.
- Lowry, K. 1998. *CRMP Roundtable Discussion* 15 August 1998. Proyek Pesisir, Jakarta.
- Lowry, K. and Needham, B. 1998. *Building a coastal management learning capacity at IPB: progress report*. Proyek Pesisir, Jakarta. 9 p.
- Olsen, S., K. Lowry and J. Tobey. 1998. *Coastal Management Planning and Implementation: A Manual for Self Assessment*. Coastal Resources Center, The University of Rhode Island USA.
- Oxley, W.G. 1994. Sampling Design and Monitoring. Dalam: *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. English, S., C. Wilkinson and V. Baker (Eds.). ASEAN - Australia Marine Science Project: Living Coastal Resources. Townsville Australia
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu, A. Soemodinoto. 1997a. *Rapid Assessment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa*. Narragansett RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- Pollnac, R.B., F. Sondita, B. Crawford, E. Mantjoro, C. Rotinsulu, and A. Siahainenia. 1997b. *Baseline Assessment of Socioeconomic Aspects of Resource Use in Bentenan and Tumbak*. Narragansett RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- Pollnac, R.B., B.R. Crawford, C. Rotinsulu, P. Kussoy, and A. Siahainenia. 1998. *An Examination and Comparison of Rumbia and Minanga: Control Sites for the Coastal Resource Management Project Sites at Bentenan and Tumbak*. Technical Report, Coastal Management Project, Manado, Indonesia.
- Pollnac, R.B. 1998. *Acquiring information on human behavior for assessing, monitoring and evaluating community based coastal zone management projects*. Coastal Resources Center The University of Rhode Island USA. (in prep.)
- Sondita, F. 1998. *A strategy on monitoring of impacts of CRMP or Proyek Pesisir programs at village level or pilot project area*. Proyek Pesisir Workshop on Monitoring, 28-29 October 1998, Manado. Proyek Pesisir, Jakarta 3p.
- Tulungen, J., F.G. Pua, B.R. Crawford. 1998a. *Desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir: Kasus Sulawesi Utara*. Seminar Tahun Bahari Internasional, 24-25 September 1998, Manado. 12p.
- Tulungen, J., P. Kussoy and B.R. Crawford. 1998b. *Community based coastal resources management in Indonesia: North Sulawesi early stage experiences*. Convention of Integrated Coastal Management Practicioners in the Philippines, 10-12 November 1998, Davao. 17p.

DISKUSI

Komentar Dr. Rokhmin Dahuri:

Dua catatan penting untuk diskusi hasil pendokumentasian:

- ♦ Dalam pengelolaan wilayah pesisir, kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir sebaiknya tidak hanya didasarkan pada isu dalam konteks permasalahan, tetapi juga pada peluang atau potensi. Pernyataan tersebut sangat menarik, karena kami seringkali mendapatkan kritikan dari para ahli kelompok ekonom bahwa para ahli lingkungan seolah-olah hanya bekerja memperlambat laju pembangunan, apalagi dalam masa krisis semacam ini. Walaupun kritikan tersebut sebenarnya terlalu utopis tetapi baik sekali dipertimbangkan. Oleh karena itu, tantangan pengelolaan adalah bagaimana meramu atau mendisain kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya *sustainable* (berkelanjutan). Ini adalah kompromi yang baik dengan para ahli atau kelompok yang menganut *economic development oriented thinking*.
- ♦ Tujuan akhir dari adanya pendokumentasian yang dilakukan oleh *Learning Team* adalah agar pada saat membacanya dapat mempelajari mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang baik diteruskan atau ditularkan pada yang lain. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dalam dokumentasi ini indikator *output* kegiatan-kegiatan, seperti penanaman mangrove, PWG, pembersihan *Crown of Thorns* (CoT) dan seterusnya. Dengan ditentukan indikator *output*-nya tersebut, kita bisa mengetahui pendekatan mana yang baik dan yang tidak baik.

1. TOPIK BAHASAN: *EARLY ACTIONS*

1.1. Pertanyaan, komentar dan saran

1 Ramli Malik:

- ♦ Penyajian pendokumentasian yang dilakukan *Learning Team* terhadap kegiatan PP SULUT dari hasil lapangan terkesan kurang netral karena yang dipaparkan hanya keberhasilannya. Hambatan atau kekurangan selama proses kegiatan *early actions* belum terlihat.
- ♦ Menurut *Learning Team*, kegiatan *early actions* PP SULUT mana yang terbaik dan prakarsa siapa yang paling menarik dalam pelaksanaan EA?

2 Endang Indriati:

- ♦ Apakah dengan kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara mempunyai pengaruh negatif terhadap partisipasi masyarakat di desa? Pengamatan terhadap proyek-proyek lain yang mengutamakan partisipasi masyarakat

dengan biaya bantuan luar negeri, seperti Proyek Pesisir, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menjadi enggan berpartisipasi. Hal ini terjadi pada proyek-proyek Jaringan Pengaman Sosial yang dilaksanakan untuk mengatasi krisis moneter dan secara langsung diarahkan ke desa-desa dalam bentuk bantuan dana yang bombastis dengan sistem yang sangat mudah. Proyek-proyek lain yang ada di bawah pengawasan BAPPENAS juga menghadapi kesulitan dalam menggugah partisipasi masyarakat di dalam proyek-proyek tersebut.

- ♦ Apakah ada kaitan antara Proyek Pesisir dengan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah? Bila dibandingkan dengan JPS, terlihat bahwa dampak jangka pendek Proyek Pesisir terhadap kondisi masyarakat tampaknya tidak banyak diperhatikan karena sasaran proyek ini adalah jangka panjang. Sementara itu dampak program JPS terhadap masyarakat sangat diperhatikan karena sifatnya yang jangka pendek

dan diarahkan langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

- ♦ Apakah kapasitas LKMD/LMD di Sulawesi Utara sudah diketahui dengan baik untuk berperan atau berfungsi seperti yang diharapkan oleh Proyek Pesisir dalam penerapan kegiatan yang berbasis masyarakat tetapi prosesnya masih harus melalui LKMD/LMD di desa?
- ♦ Apakah ada dokumen visual berupa foto-foto yang menggambarkan obyek yang didokumentasikan, misalnya *marine sanctuary*, penanaman mangrove ataupun pengambilan *Crown of Thorn*?

3. Johnnes Tulungen:

- ♦ Pada bulan Nopember 1997, PP SULUT sudah mulai melakukan survey terhadap 'desa kontrol' dan pada bulan Desember 1997 dan Januari 1998 melakukan penyusunan *data-base* dan survey sosial-ekonomi dari desa kontrol.
- ♦ Untuk kegiatan *early actions*, seperti pelatihan *monitoring* terumbu karang dan pengukuran garis pantai, tujuan akhir program utama dari masing-masing kegiatan *early actions* belum diungkapkan dengan jelas dalam makalah dokumentasi yang disajikan di lokakarya ini.
- ♦ Dalam prosiding lokakarya ini, kegiatan *early actions*, seperti pembersihan CoT, penanaman mangrove, pelatihan *monitoring* terumbu karang dan pelatihan pengukuran garis pantai, sebaiknya ditempatkan sebagai studi kasus atau bagian dari dari makalah *early actions*.

4. Bill Marsden:

- ♦ Apakah *Learning Team* dalam kegiatan pendokumentasian ini mengambil sikap netral dengan penelitian yang mencakup semua komponen kegiatan PP? Bagaimana *Learning Team* menentukan obyek pendokumentasian dan bagaimana menentukan bahwa kegiatan atau obyek di suatu tempat adalah berhasil? Apakah kegiatan *early actions* yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sudah mengarah untuk mengantisipasi penanganan isu atau masalah setempat yang sudah mendapat prioritas dan biasanya Pemerintah sudah mengalokasikan dana?
- ♦ Dalam contoh skala kecilnya, kegiatan *early actions* di suatu propinsi yang

akan menerapkan model pengelolaan pesisir terpadu dengan basis ekosistem dan masyarakat memerlukan masukan, kontribusi dan saran dari semua unsur didalam diskusinya tentang program yang akan dilakukan di suatu wilayah dengan dana yang terbatas. Pemerintah dan Proyek Pesisir perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka siap untuk berpartisipasi dan melakukan desentralisasi pengelolaan sehingga dengan dukungan masyarakat dan pemerintah tersebut kegiatan *early actions* dapat dilaksanakan sesuai dengan dana yang tersedia. Sebelum masyarakat bergerak aktif dalam suatu kegiatan, misalnya *early actions*, maka kita belum dapat dikatakan sudah menerapkan pendekatan yang berbasis atau melibatkan masyarakat. Kegiatan *early actions* ini di suatu wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara.

5. Farah Sofa:

- ♦ Setelah selesai melakukan pendokumentasian terhadap tiga obyek pada tahun kedua, yaitu *early actions*, *provincial working group* dan kegiatan *monitoring*, apakah dalam tahun ketiga *Learning Team* akan melaksanakan pendokumentasian terhadap obyek yang sama dengan pada tahun kedua atau obyek lain yang berbeda?
- ♦ Dalam lokakarya apakah *Learning Team* akan menghasilkan semacam rekomendasi? Jika ya, sejauh mana rekomendasi ini memiliki validitas yang diharapkan? Apakah *Learning Team* di masa yang akan datang hanya mendokumentasikan kegiatan atau hanya sekedar melakukan kegiatan *learning* dan kegiatan *learning* lainnya, atau ada fungsi lainnya?
- ♦ Apakah orang lain dari luar Proyek Pesisir-PKSPL IPB dapat menjadi anggota *Learning Team*?

6 Janny D. Kusen:

- ♦ Semula saya menganggap bahwa *Learning Team* melihat apa yang dilakukan oleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara merupakan model pengelolaan yang akan disebarluaskan atau diterapkan ke tempat lain, seperti di Lampung dan Kalimantan Timur. Padahal sudah diketahui atau sebaiknya kita mengetahui sejak awal bahwa model pendekatan yang akan diterapkan oleh

Proyek di ketiga propinsi lokasi proyek adalah berbeda. Dengan demikian, hasil atau pengalaman yang diperoleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara tidak relevan lagi untuk diangkat ke propinsi lainnya.

- ♦ Pertanyaan yang timbul adalah kelebihan-kelebihan apa saja dari kegiatan *early actions* yang perlu dikembangkan ataupun yang tidak perlu dikembangkan di Sulawesi Utara ini? Juga, apakah ada hal-hal khusus dari pengalaman Proyek Pesisir di Sulawesi Utara yang dapat diterapkan ke daerah lain? Apa konsep *Learning Team* dalam hal ini?

7. Budy Wiryawan:

- ♦ Saya ingin memberitahukan bahwa kegiatan Proyek Pesisir di Lampung yang didokumentasikan oleh *Learning Team* hanya yang berkaitan dengan proses pembentukan *Provincial Working Group* karena memang kegiatan lainnya masih dalam proses persiapan pelaksanaan.
- ♦ Apa yang akan dilakukan oleh *Learning Team* dalam rangka kegiatan pendokumentasian Proyek Pesisir di Lampung dan Kalimantan Timur?

8. Irwandi Idris:

- ♦ Pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir sangat bagus untuk memetik/mengambil pelajaran (*lesson learned*) tetapi masing-masing penyajian obyek-obyek tadi sangat bervariasi. Apakah metode pendokumentasian yang digunakan oleh setiap orang itu sama atau berbeda? Apakah pendokumentasian tersebut hanya dilakukan terhadap proses kegiatan atau hanya memotret sesaat pada tempat tertentu tanpa melihat semua unsur yang bisa didokumentasikan?
- ♦ *Early actions* adalah kegiatan perantara dari kegiatan yang lebih besar akan tetapi jangan sampai memperlambat kegiatan besar sehingga *early actions* tersebut perlu dimantapkan atau dikembangkan melalui diskusi-diskusi karena kegiatan sejenis *early actions* diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang ada. Perihal dana pendamping, Pemerintah akan dapat menyisihkan dananya untuk secara aktif mendorong pelaksanaannya jika kegiatan *early actions* tersebut bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat dan berhubungan dengan proses desentralisasi pengelolaan. Dengan dukungan

dari Pemerintah pusat dan pendekatan dari pelaksana proyek, Pemerintah daerah diharapkan akan tertarik untuk menyediakan dana kegiatan *early actions* melalui organisasi proyek.

9. Sari Suryadi:

- ♦ Penyelenggaraan kegiatan *early actions* yang berskala kecil biasanya bukan merupakan masalah, namun yang penting tidak dilupakan adalah esensi dan prinsip dari kegiatan ini, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- ♦ Dalam penyajian hasil pendokumentasian disebutkan bahwa kegiatan *early actions* di atas berbasis masyarakat namun tidak terlihat adanya gambaran bahwa kegiatan tersebut mengarah pada penyelesaian isu-isu sosial. Sejauh ini yang terlihat adalah kegiatan yang mengarah terhadap permasalahan lingkungan, sehingga belum terlihat adanya bentuk pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pengelolaan yang berbasis lingkungan (*resources based management*).

10. Kathleen Shurcliff:

- ♦ Kegiatan *early actions* tidak dapat dipisahkan dari komponen pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan merupakan kesempatan untuk melakukan kegiatan uji coba secara terus menerus mulai dari kegiatan yang kecil-kecil sampai yang berskala besar.
- ♦ Kegiatan *early actions* perlu dilakukan dengan keyakinan sepenuhnya (*full confidence*) bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dan proses untuk mengenal kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

1.2. Jawaban dan tanggapan

Fedi Sondita:

- ♦ Tanggapan terhadap pertanyaan dan komentar nomor (1), (2), dan (4): *Learning Team* dalam melaksanakan pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara telah berupaya untuk bersikap netral, karena itu

Learning Team hanya menerima dan merekam data atau informasi seperti apa adanya dari Proyek Pesisir Sulawesi Utara (PP SULUT) melalui dokumen-dokumen yang tersedia dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada PP SULUT, termasuk juga pertanyaan untuk mengetahui hambatan dan kendala *early actions* yang dilaksanakannya. Tidak munculnya keterangan tentang hambatan-hambatan pelaksanaan *early actions* dalam makalah yang disajikan adalah karena *Learning Team* tidak pernah menerima informasi atau jawaban tentang hal tersebut dari PP SULUT sampai terselenggaranya lokakarya ini. Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tugasnya, *Learning Team* tidak melakukan penilaian atau analisis kecenderungan terhadap informasi yang tidak diterimanya.

♦ Tanggapan terhadap pertanyaan nomor (8):

Learning Team telah mencoba menggambarkan atau mendiskripsikan obyek yang didokumentasikan seperti apa adanya atau seobyektif mungkin. Untuk mendokumentasikan ketiga obyek, yaitu *early actions*, *Provincial Working Group* dan kegiatan *monitoring*, *Learning* telah menyusun seperangkat daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terlibat dalam setiap obyek tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sedemikian rupa tanpa menanyakan penilaian baik dan buruknya suatu obyek namun setiap jawaban diharapkan memberikan informasi yang lengkap. Contoh pertanyaan-pertanyaan untuk mendokumentasikan *early actions* adalah apa tujuan *early actions*, apa relevansi kegiatan ini terhadap kegiatan Proyek Pesisir, bagaimana menilai bahwa tujuan suatu *early actions* tercapai, bagaimana proses suatu *early actions* dipilih atau ditentukan, bagaimana strateginya disusun, apa kendala yang dihadapi dan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dikirimkan ke PP SULUT. Dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terkumpul, *Learning Team* juga mempunyai memeriksa kembali jawaban-jawaban (*cross check*), apakah ada konsistensi antara jawaban dengan pernyataan yang tertulis di dalam dokumen-dokumen. Selain menerima jawaban dari FPM (*Field Program Manager*) dan stafnya melalui kuisisioner, *Learning Team* juga mewawancarai anggota masyarakat untuk merekam persepsi mereka tentang kegiatan *early actions*. Dari hasil kajian dokumen, pengiriman kuisisioner,

wawancara dengan Manajer dan staff PP SULUT serta masyarakat, informasi yang terkumpul kemudian diramu dan digabungkan oleh *Learning Team* untuk dibuat dan dituliskan dalam bentuk sebuah *draft* laporan. *Draft* laporan ini merupakan catatan *Learning Team* terhadap situasi seluruhnya.

Sebelum *draft* laporan ini diedarkan), *Learning Team* menanyakan lagi kepada para pemberi jawaban tersebut, apakah yang tertulis dalam *draft* laporan itu sudah benar. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan *draft* laporan kepada pemberi jawaban. Setelah itu, laporan akhir dibuat dengan memasukan koreksi yang mereka berikan terhadap *draft* laporan. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang belum terungkap dalam laporan tersebut, sebagaimana pertanyaan nomor (1), hal ini disebabkan *Learning Team* tidak menerima informasi yang dimaksud walaupun sudah kami tanyakan.

Pengalaman Proyek Pesisir yang akan diangkat untuk dipelajari (*lesson learned*) dari kegiatan *early actions* ini diperoleh bukan dari hasil pendokumentasian ini, tetapi dari diskusi dalam lokakarya ini.

Johnnes Tulungen:

♦ Tanggapan terhadap pertanyaan dan komentar nomor (1):

PP SULUT merasa terlalu banyak melakukan kegiatan *early actions* pada tahun kedua sehingga tujuan utama dari Proyek Pesisir di Sulawesi Utara tidak terlihat jelas.

♦ Tanggapan terhadap *Learning Team*:

Mengapa dalam makalah dari pelatihan *monitoring* terumbu karang dan pelatihan pengukuran garis pantai tidak terungkap *big picture* dari program utamanya? Kedua pelatihan tersebut mengarah pada tersusunnya aturan-aturan setempat (*local ordinance*) yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat (seperti mengetahui tempat-tempat yang terjadi erosi atau tertelan air) maupun pengetahuan yang diperkenalkan (seperti lokasi terumbu karang yang kondisinya masih baik yang dapat dijadikan *marine sanctuary*) dimana di kemudian hari masyarakat siap melakukan upaya yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir desanya.

Bambang Haryanto:

- ♦ Tanggapan terhadap komentar di atas:
Hubungan antara tujuan *early actions*, kegiatan *early actions* dan program utama proyek telah disampaikan dalam bentuk sebuah matriks. Dengan jelas terlihat adanya kaitan erat antara kegiatan *early actions* yang dilaksanakan di empat desa lokasi proyek di Sulawesi Utara dengan kegiatan utamanya. Namun penilaian terhadap keterkaitannya masih tetap tergantung dari informasi yang ada.

Fedi Sondita:

- ♦ Pada awalnya *Learning Team* mempunyai kesulitan untuk mengetahui kearah mana *early actions* tersebut diarahkan dan apa tujuannya. Meskipun sudah tersedia dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang *early actions*, *Learning Team* tetap mengalami kesulitan untuk mendefinisikannya karena adanya pernyataan-pernyataan berbeda dari staf Proyek Pesisir. Persepsi yang beragam juga terjadi dalam hal tujuan pembentukan *marine sanctuary* di desa Blongko.
- ♦ *Learning Team* tidak akan menyatakan atau melaporkan bahwa PP SULUT melakukan terlalu banyak *early actions* karena dalam mekanisme kerjanya kesimpulan seperti itu layaknya dibicarakan oleh peserta lokakarya lainnya.
- ♦ Menjawab pertanyaan nomor (7):
Dapat dijelaskan bahwa dalam tahun ketiga obyek pendokumentasian yang dilakukan oleh *Learning Team* akan mencakup kegiatan Proyek Pesisir di Lampung dan Kalimantan Timur. Namun kegiatan apa, bagaimana dan kapannya sangat tergantung dari persetujuan dan keputusan *Chief of Party* dan teknis pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan para *Technical Assistant* dari *Learning Team*.
- ♦ Sebagaimana dijelaskan oleh Johnnes Tulungen, PP SULUT, memang benar *goal* dari kegiatan PP SULUT adalah tersusunnya *management plan*, tetapi bukan hanya *management plan*. PP SULUT merencanakan untuk menerapkan tiga model pengelolaan, yaitu penyusunan *management plan*, pembentukan *marine sanctuary* dan penyusunan ordinansi lokal. Oleh karena itu, desa-desa di Sulawesi Utara tidak semuanya akan menyusun *manage-*

ment plan. Mungkin ada desa yang cukup mendirikan *marine sanctuary* saja, begitu juga desa lainnya mungkin hanya sampai pada terbentuknya ordinansi lokal. Namun perlu diketahui bahwa pendirian *marine sanctuary* dan ordinansi itu mungkin saja dimasukan dalam *management plan* desa. Dengan tersusunnya *management plan*, berdirinya *marine sanctuary* atau terbentuknya aturan-aturan lokal di suatu desa merupakan tanda bahwa kegiatan *early actions* telah selesai.

- ♦ Menjawab pertanyaan nomor (6):
Sebenarnya *Learning Team* bukan dalam posisi seperti itu karena penyusunan rekomendasi akan dilakukan bersama-sama dalam lokakarya ini. Dengan adanya dokumentasi dari proses pendirian *marine sanctuary* di Sulawesi Utara, pengalaman masyarakat Blongko dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat lain yang akan mendirikan hal serupa. Perlu diingat bahwa penerapan tahapan atau proses ini mungkin memerlukan penyesuaian mengingat Juga beragamnya kondisi sosial dan lingkungan desa-desa pantai, seperti dikatakan oleh Prof. Pollnac.

Johnnes Tulungen :

Penjelasan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan nomor (1):

- ♦ Hambatan atau kekurangan yang dirasakan oleh PP SULUT dalam pelaksanaan kegiatan *early actions* adalah sebagai berikut:
 1. Adanya harapan yang tinggi (*high expectation*) masyarakat terhadap *early actions* sehingga banyak dana PP SULUT yang terserap untuk jenis kegiatan ini.
 2. Terjadinya kelambatan (*slow down*) dalam pelaksanaan program utama sehingga pelaksanaan program utama ini memerlukan waktu lebih panjang.
 3. Masyarakat hanya melihat kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir yang skalanya kecil (*early actions*) sedangkan program besarnya yang merupakan '*big pictures*' Proyek Pesisir yang menjadi sasaran seolah-olah terabaikan.
 4. Donatur proyek tidak bisa membantu kegiatan-kegiatan yang kecil dan banyak menghabiskan waktu.
 5. Hal-hal positif dari *early actions* adalah:
 - Diketuainya minat dan dukungan masyarakat,

- Kesempatan untuk menunjukkan bahwa proyek memenuhi keinginan masyarakat sehingga mereka percaya kepada komitmen proyek,
 - Sebagai jembatan untuk mencapai tujuan utama proyek,
 - Kesempatan untuk mengetahui dan melibatkan keahlian dan pengetahuan masyarakat setempat,
 - Tidak memerlukan banyak dana tapi lebih memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu
 - Melibatkan banyak orang
 - Membangun rasa sukses
 - Hasil dapat dilihat atau dirasakan oleh orang banyak
 - Kesempatan untuk mengevaluasi apakah tujuan-tujuan program sesuai
 - Membangun rasa memiliki terhadap kegiatan proyek diantara *stakeholder*
 - Menarik perhatian lebih banyak peminat
 - Cara yang baik untuk mempengaruhi masyarakat di tempat lain
6. Persoalan yang dapat timbul dalam pelaksanaan *early actions* adalah:
- Pengalihan dana dan perhatian staf dari tujuan utama proyek
 - Persiapan dan pelaksanaannya memerlukan waktu yang tidak sedikit
 - Kesulitan dalam melakukan tindakan lanjutan setelah *early actions* berakhir
 - Terlambatnya pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu
 - Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap proyek
 - Masyarakat tidak dapat melihat dengan jelas tujuan proyek sebenarnya
 - Walaupun berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat tetapi *early action* belum tentu dianggap memuaskan pihak sponsor proyek
7. Saran-saran untuk pelaksanaan *early actions*:
- Jenis kegiatan *early actions* seyogyanya harusnya sesuai dengan konteks tujuan utama proyek
 - Usulan kegiatan *early actions* sebaiknya berasal dari masyarakat
 - *Early actions* tidak selalu dibuat untuk pencapaian setiap tujuan proyek. *Early actions* sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan utama
 - *Early actions* yang diusulkan oleh masyarakat perlu mendapat bimbingan teknis dan dikoordinasikan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah
- Keseimbangan antara kegiatan *early actions* dengan rencana jangka panjang terpadu tergantung kepada lingkungan sosial, seberapa penting perhatian pemerintah dan *stakeholder* lainnya terhadap isu-isu utama yang telah diidentifikasi dan tersedianya dana untuk pelaksanaan *early actions*.
 - ♦ Prakarsa kegiatan *early actions* dan proses adanya kegiatan *early actions*:
 Pada awalnya, tujuan utama PP SULUT adalah menyusun management plan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu di tingkat desa. Setelah PP SULUT melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan bersama-sama melakukan kunjungan lapangan, pemerintah setempat memberikan masukan bahwa tanpa kegiatan aksi yang melibatkan masyarakat, mereka tidak akan tertarik dan sulit untuk berpartisipasi dalam program Proyek Pesisir yang ditawarkan kepada mereka. Kemudian PP SULUT mencobanya dengan kegiatan aksi yang melibatkan masyarakat desa, salah satu contohnya dalam pembuatan profil desa. Gagasan kegiatan aksi terus berkembang, baik dari masyarakat maupun staf PP SULUT, setelah kegiatan aksi berupa pendidikan/penyuluhan lingkungan hidup ke desa-desa. Melalui kegiatan *early actions* ini masyarakat dan PP SULUT saling belajar dan kegiatan *early actions* ini dijadikan jembatan untuk memperkenalkan program PP. Dengan demikian, proses terjadinya *early actions* ini berawal dari lapangan, bukan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.
- Untuk menentukan apakah kegiatan *early actions* tersebut inisiatif dari masyarakat atau dari PP SULUT tergantung dari prosesnya, sehingga siapa pembuat prakarsa menjadi tidak penting. Yang penting adalah tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan *early actions* yang mengarah kepada program utamanya. Penilaian keberhasilan kegiatan *early actions* bersifat relatif, tergantung siapa yang menilai, ada masyarakat yang menilai berhasil dan ada juga yang menilai gagal, karena ada masyarakat yang terlibat langsung dan ada yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Amiruddin Tahir:

Menanggapi pertanyaan nomor (1):

- ♦ Pendekatan program yang dilakukan oleh Proyek Pesisir di tiga propinsi adalah berbeda, sehingga apa yang dilakukan Proyek Pesisir di Sulawesi

Utara belum tentu bisa diterapkan di Lampung ataupun Kalimantan Timur. Misalnya kegiatan pembersihan *Crown of Thorns* (CoT) di Sulawesi Utara walaupun dianggap berhasil, tidak dapat diterapkan di Lampung karena Proyek Pesisir tidak menangani suatu kawasan.

- ♦ Untuk pelaksanaan Proyek Pesisir di Lampung dan Kalimantan Timur yang penting dipelajari dari hasil pendokumentasian ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan *early actions*, mulai dari identifikasi isu sampai pencapaian tujuan. Proses inilah yang didokumentasikan oleh *Learning Team*.
- ♦ Dalam penyampaian hasil pendokumentasian, *Learning Team* tidak melakukan evaluasi atau penilaian baik atau buruk, benar atau salah terhadap kegiatan yang didokumentasikan. Hal ini sesuai dengan saran dari *Technical Advisory* (Dr. Kem Lowry dan Brian Needham) bahwa *Learning Team* jangan bertindak sebagai evaluator. Oleh karena itu dalam makalah dan penyajiannya, *Learning Team* berupaya keras untuk tidak pernah menyatakan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PP SULUT, tetapi mencoba memperlihatkan bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan suatu kegiatan serta indikator-indikator yang mengarah ataupun tidak mengarah kepada kerangka kerja proyek. Penilaian pelaksanaan kegiatan harus dihasilkan dari diskusi dalam lokakarya ini.
- ♦ Apabila *Learning Team* terpaksa harus menentukan *early actions* yang baik, maka pembahasannya akan didasarkan kepada kerangka kerjanya, misalnya apakah *early actions* yang dipilih dan diterapkan itu melalui proses yang mengarah kepada tujuan besar Proyek Pesisir ataukah terlepas sama sekali dari tujuan programnya.

Dietrich G. Bengen (Moderator) :

- ♦ Sebelum diskusi ini berlanjut, berikut adalah penjelasan umum dan arahan diskusi *early actions*:
1. Kondisi pesisir di berbagai lokasi di Indonesia sangat beragam sekali, sehingga dikenal adanya ciri *site specific* pesisir, baik secara biofisik maupun secara sosial-ekonomi-budaya. Sesuatu yang dilakukan secara *site specific* tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh Indonesia. Sehingga apa yang diperoleh dari sesuatu yang *site specific* hanya mungkin diterapkan pada lokasi

lain yang memiliki kesamaan ciri yang analog dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap kegiatan PP harus didokumentasikan agar dapat dijelaskan proses dan indikator-indikator kegiatannya.

2. Kesepakatan untuk melakukan kegiatan pendokumentasian itu penting sekali. Berdasarkan pengalaman, sejak tahun 1980-an tidak pernah ada kegiatan pendokumentasian terhadap proyek-proyek pengelolaan sumberdaya pesisir. Sehingga kita tidak mendapatkan informasi/data mengenai dampak proyek terhadap masyarakat. Dengan melakukan pendokumentasian dan *monitoring* proyek yang melibatkan masyarakat, maka dapat diharapkan adanya perhatian dari masyarakat untuk melanjutkan kegiatan proyek, seperti pada pembuatan terumbu karang buatan dengan rongsokan becak yang ditimbun dalam laut, masyarakat ikut serta memeliharanya dan saat ini karang alami sudah mulai terbentuk dan tumbuh dengan baik.
3. Apabila *Learning Team* dilibatkan dalam kegiatan evaluasi yang perlu diperhatikan adalah kapasitas *Learning Team* untuk melakukan evaluasi ditinjau dari waktu, tenaga dan kemampuannya. Jika tidak memenuhi kriteria kapasitas, *Learning Team* dapat saja melibatkan ahli dari luar tim untuk mengevaluasi kegiatan yang didokumentasikannya.
4. Dalam membahas kegiatan *early actions*, pada intinya yang perlu disamakan adalah apa yang akan dilakukan dalam *early actions*, bagaimana proses penetapannya, bagaimana melakukan *early actions*, siapa yang melakukan, kapan dan kemana disebarkan luaskan hasilnya, seberapa jauh keberhasilan *early actions* yang didokumentasikan tersebut sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran (*learning*) bagi pihak atau proyek-proyek lainnya.

♦ Menanggapi pertanyaan atau komentar nomor (7), (8) dan (9):

1. *Learning Team* bukanlah tim yang melakukan *monitoring* dan evaluasi, kalau *Learning Team* dijadikan tim *monitoring* dan evaluasi berarti ada analisis atau kajian, tetapi *Learning Team* hanya mendokumentasikan kegiatan walaupun mungkin ada kesan dalam penyajiannya tadi seolah-olah kegiatan tersebut

dilaksanakan oleh *Learning Team*. Dari pendokumentasikan oleh *Learning Team* ini diharapkan dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan atau kesulitan praktek pengelolaan pesisir dan lingkungannya. Temuan-temuan ini kemudian dapat diangkat dan didesiminasikan ke pihak lain agar orang atau pihak lain tersebut mengetahuinya. Keberhasilan bisa diterapkan, mungkin dengan penyesuaian. Tapi kegagalan dapat dikaji lagi untuk mengetahui penyebabnya. Di masa mendatang *Learning Team* akan bergerak kepada aspek tersebut untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

2. *Early actions* dalam pengertian pengelolaan sumberdaya pesisir adalah kegiatan pendahuluan untuk mencapai suatu tujuan. Harus diakui bahwa dalam pengelolaan pesisir yang dilaksanakan di Indonesia yang banyak terjadi adalah penyusunan konsep-konsep dan studi-studi saja. Masyarakat umum tidak memerlukan kegiatan studi tetapi kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya nyata di lapangan. Jadi *early actions* merupakan kegiatan pendahuluan yang bisa melibatkan masyarakat untuk ikut serta di dalam mencapai tujuan bersama, sehingga partisipasi masyarakat ini diharapkan terwujud melalui kegiatan yang langsung mereka ikuti. Bukan orang lain atau orang luar yang terlibat sementara masyarakat hanya ikut-ikutan atau bahkan sebagai penonton. Kegiatan pendahuluan apa saja yang perlu, karena untuk menentukan kegiatan *early actions* harus ada dasarnya. Hal yang diutarakan oleh Sari Suryadi, yaitu isu sosial, perlu diperhatikan dalam penyusunan *early actions*.

♦ **Rangkuman diskusi topik *early actions*:**

1. Pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir oleh *Learning Team* tetap penting dilakukan di masa mendatang. *Learning Team* tidak menentukan kegiatan atau obyek yang akan didokumentasikan, tapi melakukan pendokumentasian terhadap kegiatan atau obyek yang sudah ditetapkan oleh Proyek Pesisir. Inti kerja dari *Learning Team* ini adalah *learning by activity* artinya tim melakukan pendokumentasian atau proses learning dari suatu aktifitas yang ada. Dari hasil pendokumentasian ini sedang dicoba untuk untuk mengangkat temuan-temuan yang bermanfaat untuk pengelolaan pesisir di

daerah lain.

2. *Early actions* yang merupakan bagian dari kegiatan untuk mencapai tujuan Proyek Pesisir masih tetap dianggap perlu untuk diprogramkan dan didokumentasikan.

3. Kegiatan *Learning Team* yang akan datang, bisa tetap, berkurang atau bertambah, tergantung dari aktifitas yang telah ditetapkan dalam proses waktu yang berjalan di setiap propinsi lokasi Proyek Pesisir.

2. TOPIK BAHASAN: MONITORING

2.1. Pertanyaan, komentar dan saran

1. Ramli Malik:

- ♦ *Monitoring* sangat penting dilakukan untuk mengetahui proses dan *outcome* suatu kegiatan program.
- ♦ Perlunya kegiatan *monitoring* berbasis atau melibatkan masyarakat ditingkat lapangan, karena selama ini *monitoring* sulit berjalan sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek di masyarakat. Misalnya, program IDT dan subsidi Inpres berjalan tanpa *monitoring* yang baik sehingga ada rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah desa dan pelaksana proyek di desa.
- ♦ Ada dua macam *monitoring* berbasis masyarakat yang penting, yaitu *monitoring* proses dan *monitoring* terhadap kondisi lingkungan, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Monitoring* proses dilakukan terhadap proses implementasi proyek di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat umum secara terbuka dari suatu kegiatan di tingkat desa. Di Sulawesi Utara, *monitoring* terhadap sistem keuangan dari suatu kegiatan kecil telah berjalan dengan baik, dimana kepala desa dan pengurus LKMD secara terbuka menginformasikan masalah keuangan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan *monitoring* lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus agar masyarakat menjadi lebih peka dan memperhatikan lingkungannya. Contoh untuk

kegiatan *monitoring* ini adalah *monitoring* terhadap perubahan-perubahan dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di dalam kawasan *marine sanctuary*.

2. Endang Indriati:

- ♦ Makalah yang disajikan menunjukkan bahwa kegiatan *monitoring* yang dimaksudkan di dalamnya bukan kegiatan *monitoring* terhadap proyek, melainkan *monitoring* terhadap kondisi atau potensi desa dimana masyarakat melakukan pengamatan atau *monitoring* terhadap lingkungannya.

3. Janny D. Kusen:

- ♦ Dalam kegiatan *monitoring* berbasis masyarakat, ada dua model *monitoring* yaitu *monitoring* berdasarkan dinamika proses akibat adanya intervensi manusia termasuk kegiatan-kegiatan proyek dan dinamika proses alamiah yang *monitoring*-nya dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan *Learning Team* dapat dianggap sebagai *monitoring* terhadap dinamika proses alamiah.
- ♦ Untuk *monitoring* dinamika alamiah ini *Learning Team* sebaiknya membuat kerangka kerja (*framework*) *monitoring* yang jelas dan menyusun panduan lapang (*field guide*) dengan matrik *monitoring* yang sederhana, mudah dimengerti dan dikerjakan, serta biaya murah terhadap obyek-obyek yang sifatnya penting, sehingga masyarakat dapat melaksanakan dan menganalisis sendiri hasil *monitoring*-nya.

4. Budy Wiryawan

- ♦ *Monitoring* kondisi lingkungan di bawah air sulit dilakukan dan data yang diperoleh lebih bersifat kualitatif, misalnya untuk memonitor habitat terumbu karang. Oleh karena itu pengamatan atau *monitoring* dapat dilakukan dengan merekam kondisi bawah air secara visual dengan membuat foto atau rekaman video yang dilakukan secara periodik (2-3 tahun sekali), sehingga dapat menggambarkan arah perkembangan obyek yang diamati.

2.2. Jawaban dan tanggapan

Dietriech G. Bengen :

- ♦ Dari komentar para serta tersebut sebelumnya berkaitan dengan *monitoring*, maka perlu ditambahkan masukan sebagai berikut :
1. Dalam suatu proyek biasanya *monitoring* sering ditinggalkan, walaupun ada proporsi komponen *monitoring* biasanya sangat kecil. Padahal manfaat *monitoring* ini sangat besar.
 2. Pengalaman *monitoring* berbasis masyarakat sebagai contoh dalam pengelolaan mangrove di daerah Subang dan Indramayu dengan pola wana-mina sangat bermanfaat, selain untuk mengontrol penebangan mangrove yang biasa dilakukan oleh masyarakat juga bermanfaat dalam pengumpulan informasi atau data yang diperlukan bagi pencarian model pengelolaan mangrove secara cepat dan mudah untuk dianalisis untuk pengambilan keputusan secara praktis.

Fedi Sondita:

- ♦ Kegiatan *monitoring* yang didokumentasikan oleh *Learning Team* adalah kegiatan memonitor proses dan dampak proyek terhadap aspek lingkungan (habitat), sosial-ekonomi-budaya masyarakat, hukum dan kelembagaan masyarakat. Kegiatan *monitoring* ini akan dilakukan dengan format yang agak berbeda dengan yang dilakukan untuk *Performance Monitoring Program* USAID namun informasi yang diperolehnya dapat digunakan untuk kedua jenis *monitoring* tersebut.
- ♦ Kegiatan *monitoring* dilakukan secara bertahap, mulai dari memonitor kondisi awal proyek sampai suatu kegiatan selesai hingga tindak lanjutnya setelah proyek selesai. Sebagai contoh, dalam memonitor *marine sanctuary* di suatu desa, indikator yang diamati adalah sejauh mana masyarakat atau proyek mensosialisasikannya ke desa lain, apakah ada perubahan dalam kualitas dan kuantitas aturan setelah waktu tertentu, apakah pendirian *marine sanctuary* tersebut cukup efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan apakah ada faktor penghambat.

3. TOPIK BAHASAN: *PROVINCIAL WORKING GROUP*

3.1 PERTANYAAN, KOMENTAR DAN SARAN

1. Bill Marsden:

- ♦ Di setiap propinsi ada PWG, tapi istilahnya berbeda-beda, apakah fungsinya juga berbeda? Dalam penyajian makalah belum secara jelas terungkap, apakah masih perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap PWG?
- ♦ Bagaimana bentuk koordinasi antar instansi dalam PWG pada pemerintah daerah tingkat I? Ada hipotesa bahwa lembaga koordinatif itu sulit mencapai hasil yang maksimal.

2. Buddy Wiryawan:

- ♦ Tujuan dan proses PWG di Lampung belum jelas secara ril dan pembahasan masih akan dilakukan dalam diskusi-diskusi di tingkat propinsi.
- ♦ Berkaitan dengan fungsi PWG, ada hipotesa bahwa koordinasi antara instansi sulit dilaksanakan, namun dapat berjalan baik jika ada proyek. Bagaimana kelanjutan lembaga PWG ini jika tidak ada proyek atau proyek sudah berakhir? Pembentukan PWG harus mempertimbangkan hipotesa ini. Oleh karena itu suatu pengkajian perlu dilakukan untuk mengetahui apa motivasi pembentukan PWG, apa sebabnya tidak berfungsi, bagaimana supaya PWG bisa berfungsi, dan informasi apa saja yang diperlukan untuk membahas PWG ini.

3. Irwandi Idris:

- ♦ Tidak lancarnya fungsi *Provincial Steering Committee* (PSC) antara lain adalah akibat:
 - 1 Sering terjadi pergantian pimpinan dan promosi dari personal anggota PSC yang mewakili suatu instansi sebelum masa tugasnya selesai di PSC.
 - 2 Koordinasi PSC secara kuantitatif adalah kurang, misalnya selama masa kerja lima tahun hanya ada dua kali rapat atau pertemuan.
- ♦ Untuk pembentukan PSC perlu ada komitmen dari masing-masing anggotanya, terutama kesamaan visi dan misi PSC, sehingga setiap anggota

memahami betul tugas dan wewenangnya masing-masing untuk bekerja dalam tim.

4. Farah Sofa:

- ♦ Mengapa Keanggotaan PWG di Sulawesi Utara didominasi oleh kalangan pemerintahan? Apakah PWG ini merupakan forum independen yang dibentuk oleh Gubernur?
- ♦ Institusi PWG ini memiliki fungsi yang cenderung sebagai tim pengarah atau bersifat pengarah tapi belum berfungsi sebagai lembaga penghubung yang mengarah pada penguatan desentralisasi sampai tingkat terbawah.

5. Ian M. Dutton:

- ♦ Pidato sambutan Kepala PKSPL IPB menunjukkan bahwa selama ini jarang terjadi penerapan pengelolaan pesisir yang menerapkan pengalaman terdahulu sehingga hal ini merupakan alasan utama bagi Proyek Pesisir untuk melakukan *learning activity*. Dari pengalaman terdahulu, yang harus disiapkan dan sekaligus tantangan adalah bagaimana melanjutkan upaya-upaya yang dirintis oleh Proyek Pesisir agar dapat terus berlanjut setelah Proyek Pesisir selesai. Pengalaman apa yang diperoleh dari pelaksanaan Proyek Pesisir ini diharapkan dapat berguna untuk penerapan *integrated coastal zone management* di Indonesia. Selama ini, masalah umum yang terjadi adalah pendekatan dan *learning activity* dalam pengelolaan pesisir terlalu bersifat akademis atau ilmiah.
- ♦ Pengamatan terhadap kegiatan pendokumentasian dan lokakarya yang dilakukan oleh *Learning Team*:
 - 1) Masih ada kekurangan dan ketepatan dalam pencatatan rincian kegiatan. Laporan perlu diperiksa secara teliti sebelum lokakarya.
 - 2) Ada kesenjangan pandangan antara pandangan di tingkat nasional (misalnya, BAPPENAS) dan tingkat daerah (e.g. *social safety net*). Perlu adanya kesepakatan tentang pentingnya kesamaan yang memadukan kedua pandangan tersebut.
 - 3) Terlihat adanya manfaat penting dari suatu forum dialog;
 - 4) Ada persoalan dalam mengevaluasi kegiatan Proyek Pesisir secara terpisah.

Sebagai contoh adalah pengalaman atau sejarah PWG sejak awal pertumbuhannya yang banyak diketahui oleh Dr. Janny Kusen dari Sulawesi Utara.

- 5) Laporan para penyuluh lapangan (*Field Extension Officer*) adalah sumber informasi baik untuk pendokumentasian ini.
- 6) Beragamnya hasil temuan yang dilaporkan dapat membingungkan para utusan Pemerintah Indonesia. Mereka lebih menginginkan pelajaran (*lesson learned*) yang lebih jelas.
- 7) Terlihat ada kebingungan terhadap peran *Learning Team* dalam *monitoring* dan evaluasi walaupun tim ini sudah menjelaskan dengan baik namun tidak ada petunjuk yang mengarah pada pelaksanaan tugas ini. Sehingga sulit bagi utusan pemerintah untuk melihat *Learning Team* sebagai pelaksana *monitoring* dan evaluasi.
- 8) *Learning Team* memiliki masalah dalam memahami apa tujuan dari setiap kegiatan yang mereka dokumentasikan. Apakah kita perlu secara jelas menentukan sasaran terukur dari setiap kegiatan yang dilakukan?
- 9) Terlihat ada masalah mengenai alasan pemilihan obyek pendokumentasian. Banyak peserta lokakarya berpendapat bahwa obyek-obyek yang dipilih hanyalah sebagian kecil dari konsep *community based coastal resources management*.
- 10) Lokakarya ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya ‘menengok masa lalu sebelum melangkah ke masa depan’. Kepada peserta yang tidak familiar dengan sejarah dan filosofi Proyek Pesisir, *Learning Team* perlu menyebarluaskan pepatah ini.
- 11) *Learning Team* telah membawa kritikan pedas namun sehat dalam pekerjaannya. Namin hal ini dapat mengganggu peserta yang tidak mengenal cara kerja PKSPKL-IPB.
- 12) Komentar dan debat tentang proses dan logika, suatu indikasi adanya perbedaan di antara para akademisi, pelaku pengelolaan dan pengguna informasi yang dihasilkan.
- 13) Ada keinginan untuk meningkatkan kualitas pendokumentasian di setiap lokasi proyek.
- 14) Makalah tentang *Provincial Working Group* banyak memuat ketidakcocokan dan salah pengertian.

♦ Langkah selanjutnya

- 1) Perlu adanya keterpaduan dalam proses pembelajaran (*learning*) antar proyek-proyek, misalnya COREMAP.
- 2) Lebih banyak lagi staf Proyek Pesisir untuk terlibat langsung dengan *Learning Team* (bekerja di IPB?) dan lebih banyak staf *Learning Team* bekerja di lapang, khususnya Lampung.
- 3) Perlu dilakukan verifikasi apakah bahan atau makalah yang disajikan sudah benar? Periksa dengan *Field Project Manager* dan para stafnya.
- 4) Perlu diulang lagi, dan gunakan masukan dari diskusi dalam lokakarya ini.
- 5) Dari pendokumentasian perlu diupayakan agar dihasilkan suatu paper dalam penerbitan jurnal edisi kelima, bersama penulis lainnya.
- 6) Perlu disusun agenda *learning*.

Lampiran-1. Kerangka kerja *monitoring* dan rencana kerja *Learning Team* IPB

**Proposed Monitoring Framework and Action Plan
of Learning Team-IPB**

Oleh:

**Darmawan, M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani,
Burhanuddin, Amiruddin dan Bambang Haryanto.**

**The Annual Staff Meeting of Proyek Pesisir
Bandar Lampung
18 July 1998**

Proposed Monitoring Framework and Action Plan of Learning Team-IPB¹

Oleh:

Darmawan², M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani,
Burhanuddin, Amiruddin dan Bambang Haryanto.

1. Introduction

Learning Team activities:

- ♦ Documenting approaches and methods used in the project;
- ♦ Together with the Technical Advisors developing a framework for monitoring and evaluation of the project;
- ♦ Develop a strategy for disseminating the results of documentation and lessons learned;

Functions:

1. Learning the lessons from CRMP
2. Assisting PKSPL-IPB in providing conceptual guidance

Assisting Lampung Field Site Manager in:

- ♦ Designing and implementing field program work plan
- ♦ Developing a framework for monitoring and evaluation of the project site
- ♦ Designing and conducting training programs
- ♦ Conducting activities deemed necessary for Lampung site

2. Information & data collection methods/systems

The team needs specific data 'for managing, monitoring and evaluating the project' collection plans. Below are some directives we would like to adopt:

- ♦ Complex surveys and quasi-experimental designs may not provide useful data for project management/project planner. Therefore the data collection system should be designed to address the specific information needs of project managers and should include a combination of methodologies gathering quantitative and qualitative information.
- ♦ Question oftentimes raised was "what difference has the project made to the beneficiaries?" In a laboratory set-up, experimental designs are used to prove causality. A major problem in using such designs to assess development projects (such as the CRMP) is that external factors constantly interfering the study setting, making it almost impossible to hold the research design constant over a long period. As a result, the ability to attribute change to the project and make definitive statements about impact will severely diminish.
- ♦ Data and information needs are bound to change as implementation proceeds, thus information systems should be designed so that they can be easily adapted to changes in the project environment, capabilities of implementing agencies, methods of service delivery, impediments to project success and beneficiary needs. Yet too much time spent conceptualizing and planning a "perfect" system may result in an overly ambitious and totally unmanageable effort that is of no use to anyone. Simplicity, feasibility, timelines, and relevance must be the guiding principles

¹ Presented in the Annual Staff Meeting of Project Pesisir, 18 July 1998, Lampung

² Coordinator of Learning Team-IPB

Rapid, low-cost studies can provide useful, timely, and relevant data/information for project planner/decision-making. This is crucial for the implementation of “adaptive management concept” use in CRMP. Therefore the data collection system should include procedures for rapid data gathering and analysis to facilitate timely feedback and informed management decision-making.

Rapid, low-cost studies should be guided by two principles:

- 1) Optimal ignorance, or the art of knowing what is not worth knowing, and
 - 2) Proportionate accuracy, or the avoidance of unnecessary precision
- Based on those two principles, we should identify the minimum data needed for effective project decision-making.

All of that suggest that a data/information collection system must be designed to provide timely data and information to satisfy needs of project managers/planner rather than the long-term research interests of academics or consultants

Question:

How can we develop practical, timely, relevant, and low-cost methods for gathering information and data for project planner/management and decision-making?

3. Conceptual understanding:

‘Integrated Coastal Management Policy Cycle’

- ♦ First order (generation)
- ♦ Second order
- ♦ N order

Steps of the integrated coastal management policy cycle:

- 1) Issue identification & assessment
- 2) Preparation of the plan
- 3) Formal adoption and funding

- 4) Implementation
- 5) Evaluation

Project logical framework:

- 1) Input
- 2) Output
- 3) Outcome
- 4) Impact

4 Monitoring and evaluation system

Process of development of monitoring and evaluation systems

The steps that will have to take in developing monitoring and evaluation system are as follow:

- 1) Identify the users.
 - ♦ Who is going to use the information?
- 2) Clarify project goals, purposes, inputs and outputs.
 - ♦ This will allow a continual analysis over time of trends toward achievement of goals (impact?) and purposes (objectives?) as well as inputs and outputs. The point in here is not to see goal or purpose achievement at any one point in time but to observe trends to ensure that reasonable movement in the proper direction is taking place. To do this, it is important to know very specifically what should be changing.
- 3) Identify the managers questions.
 - ♦ Questions triggered by analysis of administrative data.
 - ♦ Questions concerning behavioral changes in and/or benefits for project participants.
 - ♦ Questions concerning sub-project effectiveness.
 - ♦ Questions concerning the project implementation process.
- 4) Identify key indicators and administrative data to answer managers’ questions.
 - ♦ Identify existing data collection procedures that provide information on key performance indicators and then fine-tune these procedures as appropriate so that the data accurately reflect key aspects of project performance.

- 5) Select other appropriate methods to answer managers' questions.
 - ♦ The feasibility of data collection, monitoring and evaluation can be used as a key criterion of acceptable design. That is if the resultant system is too complex, this may be an immediate indicator of problematic design: projects that cannot be efficiently monitored and evaluated probably cannot be efficiently implemented either.
- 6) Clarify counterpart support and involvement.
- 7) Develop effective feedback procedures.
 - ♦ It is the link that transform evaluative studies into an information system for improving performance.
- 8) Develop the budget.
- 9) Perform other related tasks.
 - ♦ Drafting handbook/guidelines manual for project's monitoring & evaluation system.

Methods of data collection

- ♦ Census and sample surveys
- ♦ Participant observation
- ♦ Case studies
- ♦ Rapid low-cost approaches
- ♦ Secondary methods

What should the monitoring and evaluation system be designed to do?

- ♦ Regular analysis of administrative data on select indicators of project progress and performance (this is sometimes called "performance monitoring")
- ♦ Planned or ad-hoc studies on key management or impact questions
- ♦ Procedures for timely feedback of both types of information to managers

5. Outcomes of the project

USAID (1996) identified four intermediate level program outcomes:

- a. Development of successful field sites
- b. Strengthened and decentralized institutions

- c. Improved policies and enabling conditions
- d. Dissemination of lessons learned;

Strategic level outcome:

Strengthened & decentralized natural resources management

Program level outcome:

- a. Development of successful field sites
- b. Strengthened and decentralized institutions
- c. Improved policies and enabling conditions
- d. Dissemination of lessons learned

Field level outcome:

- a. Increased public participation
- b. Improved local policy and implementation
- c. Strengthened local institutions

6. Action plan of Learning Team-IPB 1998/1999

Program Persiapan

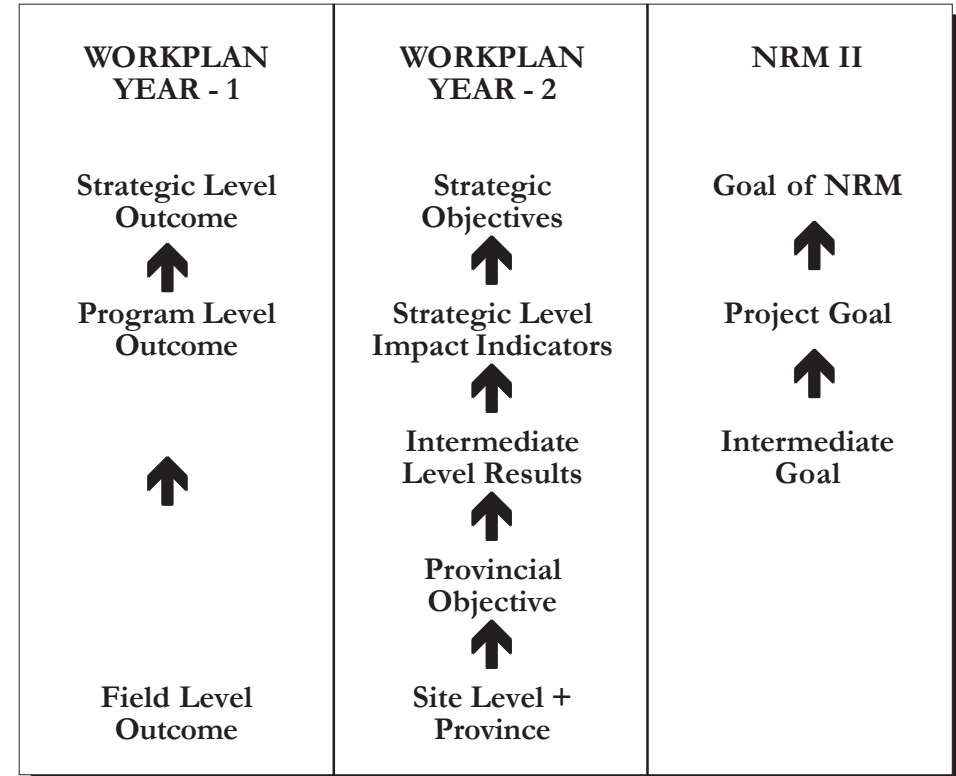
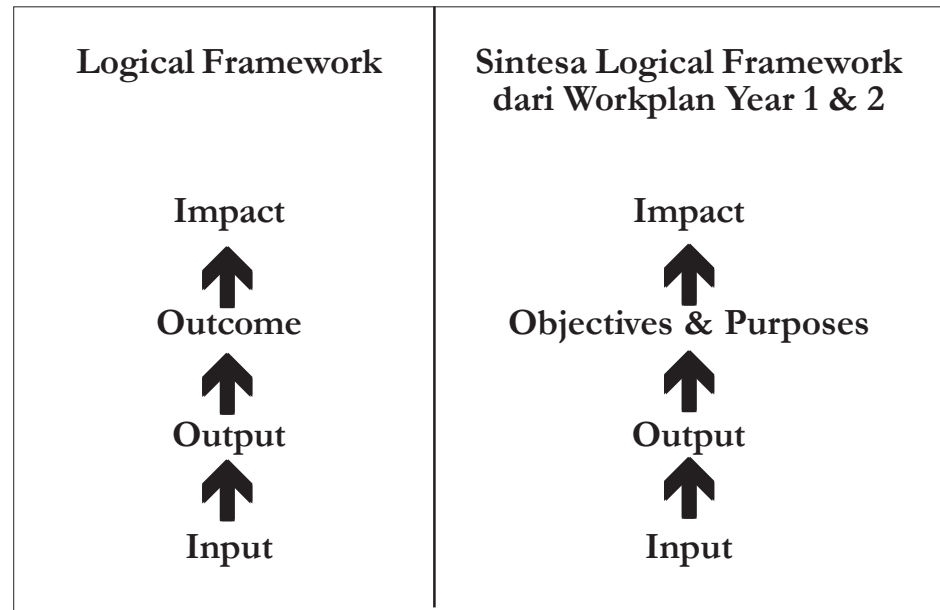
- ♦ Pemahaman anggota *Learning Team* tentang filosofi, organisasi, peranan dan penyusunan kegiatan *Learning Team* sesuai keinginan Proyek Pesisir, melalui bahan-bahan masukan seperti:
 - 1) Workplan Proyek Pesisir Year 1 dan 2
 - 2) Coastal management capacity assessment: a self-assesment manual (Olsen *et al.*, 1998)
 - 3) From local action to national practice (Crawford *et al.*, 1998)
- ♦ Diskusi dengan Technical Advisors (TA)
- ♦ Output yang diharapkan:
 - 1) Rencana kerja *Learning Team*
 - 2) Kerangka filosofi Proyek Pesisir

Program Dokumentasi

- ♦ Pengumpulan dokumen secara aktif dan pasif :
 - 1) Pengumpulan hasil-hasil kegiatan dokumentasi Proyek Pesisir, seperti laporan dan makalah.
 - 2) Penggunaan dokumen sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi.
- ♦ Output:
 - 1) Kumpulan laporan Proyek Pesisir
 - 2) Kumpulan makalah tentang Proyek Pesisir
 - 3) Hasil pemikiran *Learning Team* (manual dan makalah)

Program Monitoring dan Evaluasi

- ♦ Menyusun kerangka kerja *monitoring* dan evaluasi Proyek Pesisir setelah intermediate goals, program-program dan indikator keberhasilan program sudah ditetapkan oleh Proyek Pesisir.
- ♦ Mengkaji/menganalisa hasil-hasil kegiatan dokumentasi



- ♦ Diskusi dengan *Technical Advisors* (TA)
- ♦ Output:
 - 1) Kerangka kerja *monitoring* dan evaluasi
 - 2) Instrumen *monitoring* dan evaluasi Proyek Pesisir Lampung
 - 3) Hasil kajian (*lessons learned*)

Program Diseminasi

- ♦ Menyebarkan hasil kajian melalui media informasi (jurnal) dan forum seminar
- ♦ Output:
 - 1) Bahan laporan tentang perkembangan Proyek Pesisir
 - 2) Masukan bagi para pengelola proyek serupa

Lampiran-2. Acuan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian yang dilaksanakan oleh *Learning Team* IPB 1998/1999

PROYEK PESISIR

(Coastal Resources Management Project)

USAID/BAPPENAS NRM II PROGRAM

**Building a Coastal Management Learning
Capacity at IPB: Progress Report**

**Kem Lowry (University of Hawaii) and
Brian Needham (Coastal Resources Center, University of Rhode Island)**

**WORKING PAPER
Proyek Pesisir, Jakarta**

August, 1998

Project Context

The Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP - also known as Proyek Pesisir) is part of the USAID - BAPPENAS Natural Resources Management II Program being implemented between 1996 and 2003. The strategic objective of NRM II is to “to decentralize and strengthen natural resources management in Indonesia.” Proyek Pesisir, which began in 1996, is designed to provide lessons about ‘best practices’ in community-level coastal management by establishing, maintaining and assessing pilot coastal management projects. The first provincial pilot project sites were established in North Sulawesi in 1997. A field office was established in Lampung in April, 1998 and a field office is expected to be established in the Province of East Kalimantan later in 1998.

Learning from experience is an integral component of Proyek Pesisir. As the Year Two Workplan (Proyek Pesisir, 1998) notes, the project sites “enable the CRMP to evaluate what works /what fails and why, and to take these lessons forward into the national and global policy/practice arenas (the national track)”. The local track sub-programs of CRMP are simultaneously reinforced and complemented by additional national track activities which emphasize institutional and policy development and which shall facilitate the ultimate replication of CRMP-derived best practices in other areas of Indonesia and more globally” (Year Two Workplan, 4). The most immediate ‘clients’ for lessons generated from the initial pilot projects are staff and counterparts of subsequent Proyek Pesisir project sites. The coastal management lessons from Proyek Pesisir could also be immediately relevant to other projects underway in Indonesia such as the ADB supported Marine Evaluation and Planning project (MREP) and the multilateral Coral Reef Rehabilitation and Management Project (COREMAP).

Proyek Pesisir has sought to institutionalize learning from the pilot projects by designating a ‘learning partner’, the Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL or Centre for Coastal and Marine Resources Studies) at the Institut Pertanian Bogor (IPB - Bogor Agricultural University). IPB has, in turn, designated a Learning Team charged with facilitating the learning process. The members of the IPB Learning Team are:

- Darmawan, Manager (100%)
- Neviaty P Zamani (25%)
- Amiruddin (40%)
- Fedi Sondita (25%)
- Burhanuddin (40%)
- Bambang Haryanto (40%)

A. Expected for the Learning Team

The formal Proyek Pesisir expectations for the Learning Team are outlined in the 1998-99 agreement between the University of Rhode Island (as the USAID contractor) and PKSPL IPB as the contractor. Under the terms of the agreement, the Learning Team is to produce:

- ♦ Methodology/manual for site documentation and self-assessment
- ♦ Operational plan for site assessment
- ♦ Six monthly site assessment reports for
- ♦ North Sulawesi field program
- ♦ East Kalimantan field program
- ♦ Lampung field program
- ♦ Input to manual for socio-economic baseline surveys

Beyond these formal expectation are the hopes, articulated in a variety of ways, the IPB can develop capacities to document, assess and synthesize the experiences of the project sites, to broadly disseminate these experiences in reports and articles and to provide outreach assistance to field projects. Project and URI staff also talk about the hope that IPB will become a center for coastal management and will develop the capacity to educate future generations of Indonesians in the technical and social skills necessary for integrated coastal management. Indeed, PKSPL faculty have developed a two year Masters degree in Coastal and Marine Resources Marine in conjunction with the Faculty of Fisheries and Resources Management. The first class of 27 was admitted in 1997.

B. Current Status of Learning Team Activities

Since Proyek Pesisir began, IPB staff have organized or participated in nine training programs, published the first issues of *Journal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia* (Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Management), helped organize a national conference and developed a preliminary report on the North Sulawesi project site.

In general, however, initial activities assigned to the Learning Team have taken longer than anticipated. Lack of Learning Team progress is attributable to a number of factors. Certainly, the political unrest and economic turmoil within Indonesia has been disruptive and has required personal and professional adjustments on the part of staff. However, many of the start-up problems confronting the Learning Team are the predictable (if not inevitable) problems associated with new team projects: Uncertainty about the team role in the larger project; uncertainty and unfamiliarity with specific required tasks and intended products; uncertainty about the team strategy and the roles of individual team members within the strategy and within-team dynamics.

As technical advisors, our role was primarily to help diagnose problems and issues associated with the general learning project at IPB and to assist the team in designing strategies to deal with the problems. Within constraints by the brevity of our visit, lack of full context about the IPB working environment and our less-than-full understanding of the personal and professional agendas of our Learning Team colleagues, we tried to assist them in working out a more detailed learning strategy. A broad range of topics was discussed, including team-building, rudiments of evaluation, the Learning Team's role in the larger project, a Learning Team strategy, an outline for *Learning Team* reports, topics for 'learning' and a host of related issues. A few of these topics are discussed below.

C. Team-building

The Learning Team is composed of dedicated young professionals, most of whom are trained in fisheries and other technical aspects of ocean and coastal management of ocean and coastal management. None is trained

in social science generally or in evaluation in particular. Project inertia can be attributed in part to the lack of familiarity with the learning tasks as envisaged by Proyek Pesisir staff, in spite of numerous discussions among PP staff and team members. Team members were concerned that 'learning' meant evaluating project activities (and project colleagues) and that such evaluation would invite criticism of them. They have spent much of their time to date talking among themselves both about their understanding of project philosophy and how that translates into project tasks for the Learning Team.

Time management seems to be another significant cause of inertia, although not much discussed. All the Learning Team members are involved in a number of academic, service and professional activities, most of which impose familiar tasks and predictable time demands. The learning project, by contrast, involves both unfamiliar tasks and unbounded time requirements. Hence, there is an understandable desire to divide the learning enterprise into a series of small, familiar tasks for which time and resource budgets can be made more predictable.

As technical advisors, we emphasized two key issues regarding these team building issues. First, we argued that the Learning Team is necessarily a 'partner' with PP and with project site staff and not superior in the project hierarchy. We all agreed that Learning Team staff should work with project staff to identify lessons. Second, we made the case that the critical role of the LT is in documentation of project experience in key areas and not in evaluation. The documentation process is central to creating a shared understanding of what happened at the project sites. Carefully developed documentation reports, we argued, can be the basis for conservations of the implications of project activities for future projects; for drawing lessons from experience. (In our view, participation on the Learning Team is a tremendous opportunity for professional development. Members of the team are in a position to become national and regional experts on coastal management and the design and implementation of local coastal management projects).

D. The Project ‘Logic’ of the IPB Partnership

The language of the contract describes specific intended outputs on the part of the IPB generally and, more specifically, the Learning Team that has been formed at IPB. The tasks and outputs described in the contract are linked by a set of implicit premises about how a coastal management ‘learning process’ could be developed and maintained. The central purpose of the proposed learning process is to systematically assist in the development and dissemination of coastal management project ‘lessons’ that would inform other projects in Indonesia, in the Asia-pacific region and throughout the world.

Since we spent some time discussing how it is useful to identify and analyze underlying causal ‘theory’ or ‘logic’ of projects—the assumptions or premises by which project activities will induce changes in coastal conditions or the behavior of coastal resources users—we thought it useful to make explicit the premises upon which the Learning Team project is based.

Roughly, the project premises are that:

1. There exists in IPB (specifically in PKSPL) a core of key staff who are already knowledgeable about social and technical aspects of marine management generally and coastal management in particular or are willing to develop that expertise;
2. The key staff will be assembled into a Learning Team to work collaboratively with each other, with Proyek Pesisir staff and with staff at current and future sites and with other stakeholder;
3. The Learning Team will develop a strategy for facilitating learning in conjunction with Proyek Pesisir staff, project staff and others;
4. A key component of the ‘learning strategy’ is the in-depth documentation of key coastal management activities at project sites (to be determined in consultation with Proyek Pesisir staff, project site staff, and others), the

assembling this documentation in carefully-developed reports and dissemination of the reports to key stakeholders.

5. The documentation of key project activities will be based on both documents routinely submitted to the Learning Team by project staff (reports, plans, minutes of meetings, memos, etc.) and observations and interviews by members of the Learning Team with project staff, significant governmental and non-governmental stakeholders, community residents and others.
6. Reports by the Learning Team will be disseminated to Proyek Pesisir staff, site project staff and others for review and comment.
7. The Learning Team will convene meetings of project staff and others interested in coastal management to discuss Learning Team reports and to generate possible ‘lesson’ for other project sites. These tentative ‘lessons’ will be compiled by the Learning Team and disseminated more broadly among coastal management professionals for further review and comment.

Close examination of project ‘theory’ or logic makes it possible to determine to what extent that ‘theory’ is regarded as an accurate representation of what is to happen and whether, and to what extent, planned events are being implemented as intended.

E. Project Issues to be Examined

Although the URI-IPB agreement calls for site documentation, after discussions with the Learning Team it seemed evident that the documentation should focus on specific planning and management activities that are common to all sites. Such activities might include site profiling, baseline analysis and similar activities likely to be important endeavors at each site.

We brainstormed a list of possible issues to be examined (see Appendix 1). These proposed issues are to be sent to project staff and PP staff for review and comment. We agreed that the Learning Team should pick three or four important issues in consultation with the other stakeholders

and that initial documentation activities should concentrate on these issues. After some discussion, we agreed that these documentation reports should be completed by February 28, 1999.

F. Documentation Strategy

Because there was some uncertainty about how the documentation process should proceed, the team collaborated on a series of steps the Learning Team might follow to prepare the documentation reports. These steps are outlined in Appendix 2.

G. Outline of Issue Paper: Proposals and the Issue Papers

In order to have a common format for the issues papers proposals and the issues, we worked on a tentative format for each (see Appendix 3). The core element of the proposals is the questions to be answered in the research. Our notion is that these questions would be widely reviewed and amendments would be suggested as necessary. Also important is the preliminary identification of those who are to be interviewed. We assume that the first round of interviewees will also identify some of those to be interviewed

in the second round. The issue paper proposals would also identify proposed research dates, documents to be reviewed, etc. Project staff will review the proposals and make suggestions.

H. Learning Workshop

We discussed having the team organize a learning workshop lasting perhaps one full day in March, 1999. This workshop would be facilitated by the Learning Team. Invitees would include BANGDA staff, representatives of donor agencies, NGO representatives, CRC and project staff and others.

The papers prepared by the Learning Team would provide the basis for discussion. Each paper is to conclude with a section titled: Questions for further discussion and learning. These questions could provide the framework for discussion. It is our expectation that the papers would be prepared and circulated prior to the meeting. CRC staff and Learning Team members would serve as rapporteurs for the session to insure that the findings of the meeting are written up and widely disseminated.

APPENDIX-1

POSSIBLE COASTAL MANAGEMENT 'ISSUES' TO BE ANALYZED BY THE *LEARNING TEAM*

1. Provincial working groups
2. 'Early actions' at site to build community enthusiasm and commitment
3. Use of extension officers
4. Baseline studies
5. Coastal management site selection processes and criteria
6. Site profiles
7. Selection counterparts
8. Management issues identification
9. Performance indicators
10. Management plans
11. Economic activities
12. Monitoring

* Identified at a meeting of the Learning Team on 14/8/98

APPENDIX-2

STEPS IN DOCUMENTATION PROCESS

1. Contact project staff about possible management issues to be examined
2. Determine in collaboration with project staff and other stakeholders about which issues will be examined.
3. Determine which Learning Team members will examine which issues (Having Fedi, Darmawan and Neviaty as team leaders was discussed).
4. Develop a brief research proposal for each issues:
 - ♦ literature review related to issues
 - ♦ research questions
 - ♦ identify first round of interviewees
 - ♦ establish research dates / protocols
 - ♦ budgets
5. Organize review of proposal by major stakeholders
6. Conduct research at sites
7. Draft documentation papers
8. Organize internal (among Learning Team, project staff) and external review (CRC/URI and others) of papers. Revise papers.
9. Design learning workshop to include major national stakeholders and CRC participants. (Circulate papers, etc.)
10. Facilitate learning workshop
11. Working with CRC staff, write up results and circulate broadly
12. Select issues for second round of documentation, etc.

APPENDIX -3

SUGGESTED COASTAL MANAGEMENT ISSUES PROPOSAL OUTLINE

A. ISSUE/THEME

(e.q. coastal management issue/opportunity assessment at project sites)

B. PURPOSE

(e.q. To document the processes of identifying, ranking, analyzing and choosing which problems and opportunities are the focus of project management)

C. RESEARCH QUESTIONS

1. What are the primary coastal issues/opportunities at each site?
2. Who identified these/opportunities? Who decided what the process of issue selection would be? What criteria were used?
3. How severe was the coastal issue/problem? What are the indicators of severity? How great is the coastal opportunity?
4. What is the geographic scope of the issue/opportunity?
5. What are the 'causes' of the problem or issues?
6. What technical analysis of the 'causes' or issues was done?
7. How adequate is the analysis?
8. Which agency is responsible for management of the problem causes? How effective is management?

D. DOCUMENTS TO BE REVIEWED

E. INTERVIEWS (initial round)

F. PROPOSED RESEARCH DATES

G. BUDGET

H. NEEDED PROJECT ASSISTANCE

Lampiran 3. Daftar obyek pendokumentasian Proyek Pesisir 1998/1999

**OBJEK PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN
PROYEK PESISIR 1998 - 1999**

Oleh Learning Team

**Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor**

1. Provincial Working Group

PWG merupakan kelompok yang didirikan untuk menunjang kerja Proyek Pesisir di Sulawesi Utara dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya. Pendokumentasian obyek ini diarahkan terhadap proses pendiriannya, proses pemilihan anggota kelompok, tujuan, aktifitas, kinerja kelompok, manfaatnya selama ini dan rencana pengembangannya di masa yang akan datang.

2. Early actions

Early actions merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat di wilayah tertentu terhadap satu program jangka panjang. Pendokumentasian obyek ini diarahkan terhadap proses dan tatacara penentuan aktifitas *early actions*, siapa yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, jenis-jenis kegiatan yang sudah dilakukan, keterkaitannya dengan program jangka panjang, *output* yang dihasilkan dan pengaruhnya terhadap sikap/pandangan masyarakat terhadap Proyek Pesisir.

3. Extension officers

Extension officer merupakan ujung tombak pelaksanaan Proyek Pesisir di wilayah pedesaan. Pendokumentasian obyek ini diarahkan terhadap bagaimana cara pemilihan *extension officers*, ruang lingkup pekerjaannya, wewenangnya dalam menjalankan tugas, mekanisme hubungan kerja dengan masyarakat dan dengan Proyek Pesisir, hambatan yang dialami di lapangan, proses dan strategi penempatannya di desa.

4. Baseline study (socio-economic aspect)

Sebelum suatu perlakuan manajemen dilakukan di suatu tempat, seyogyanya kondisi awal lokasi diketahui untuk melihat strategi manajemen apa yang dapat diterapkan dan untuk melihat di masa yang akan datang apakah strategi manajemen ini efektif. Pendokumentasian obyek ini diarahkan

terhadap tujuan pelaksanaan baseline study, strategi yang dilakukan dalam menentukan data/informasi yang dibutuhkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data/informasi tersebut, teknik analisis, dan pemanfaatan hasil studi dalam perencanaan program.

5. Site selection

Pemilihan lokasi Proyek Pesisir di Sulawesi Utara adalah satu kegiatan penting dimana pendekatan '*best practices*' pengelolaan pesisir akan diujicobakan. Pendokumentasian terhadap obyek ini diarahkan terhadap informasi yang diperlukan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, dan kriteria pengambilan keputusan.

6. Kemitraan antara Proyek Pesisir dengan proyek/kegiatan lainnya (pemerintah, LSM, swasta dan perguruan tinggi).

Kemitraan antara Proyek Pesisir dengan lembaga lainnya sangat penting bagi keberhasilan proyek dalam jangka panjang. Informasi yang perlu didokumentasikan antara lain pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Pesisir, proses partnership atau kemitraan yang diterapkan, tujuan dan jenis kegiatan, output yang diharapkan dari kemitraan tersebut, hasil yang telah dicapai saat ini, hambatan yang dihadapi dan program pengembangannya.

7. Kegiatan monitoring

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan dari rencana kegiatan proyek yang sedang berjalan. Informasi yang perlu didokumentasikan adalah frekuensi kegiatan *monitoring*, pihak yang terlibat dalam *monitoring*, teknik atau metode *monitoring*, indikator-indikator yang diperlukan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil *monitoring*.

8. Site profiling

Site profiling merupakan kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi secara sistematis tentang status dan kondisi biofisik, sosial ekonomi budaya

di wilayah lokasi proyek. Pendokumentasian diarahkan pada perencanaan *profiling*, metode dan analisis terhadap data yang dikumpulkan, hasil dan manfaat dari *profiling*.

9. Site management plan

Site management plan merupakan hasil kegiatan tahap awal penyusunan rencana pengelolaan di suatu lokasi proyek berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari site *profiling*. Pendokumentasian diarahkan pada proses penyusunan rencana pengelolaan di lokasi proyek, yang meliputi kegiatan-kegiatan persiapan dengan para *stakeholder*, identifikasi isu dan

permasalahan, penyusunan dokumen, pengesahan oleh instansi yang berwenang, dan penyebarluasan dokumen rencana pengelolaan.

10. Control/reference site

Salah satu cara untuk melihat apakah pengelolaan yang diterapkan telah efektif memberikan hasil seperti yang diharapkan adalah dengan membandingkan perubahan yang terjadi di lokasi proyek dengan lokasi non-proyek. Lokasi non-proyek ini dapat dikatakan lokasi kontrol. Pendokumentasian dapat diarahkan pada alasan-alasan penerapan *control sites*, proses penentuan *control site*, penetapan indikator dan rencana *monitoring*.

Lampiran-4. Usulan kegiatan pendokumentasian *Learning Team* IPB 1998/1999

**USULAN KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN
LEARNING TEAM 1998/1999**

**Disusun oleh:
Learning Team IPB**

Proyek Pesisir - PKSPL IPB

**USULAN KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN
LEARNING TEAM 1998/1999**

1. EARLY ACTIONS

1.1. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap proyek pengembangan yang berbasis masyarakat termasuk juga Proyek Pesisir melaksanakan satu kegiatan yang dinamakan *early actions*. Kegiatan yang disebut sebagai *early actions* tersebut dilaksanakan

untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yaitu;

- (1) Menarik dukungan masyarakat terhadap program-program jangka panjang (*to build public support for longterm programs*),
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat (*to improve public awareness*)
- (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk institusi (*public and institution capacity building*)

(4) Pengalaman dalam menerapkan pelaksanaan atau eksperimen program jangka panjang dalam skala kecil (*small scale experiment*).

Proyek Pesisir di Sulawesi Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan *early actions* di empat desa yang menjadi wilayah proyek (Bentenan, Tumbak, Blongko, dan Talise). Berdasarkan sumber inisiatifnya (penggagas), kegiatan-kegiatan *early actions* tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- (1) *early actions* dengan inisiatif yang berasal dari Proyek Pesisir (*initiated by the project*)
- (2) *early actions* dengan inisiatif yang berasal dari masyarakat (*initiated by the community*).

Kelompok, jenis dan lokasi kegiatan *early actions* yang telah dilakukan di Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel-1 di sebelah ini.

Tabel-1. Kelompok, jenis dan lokasi early actions di Sulawesi Utara

No	Kegiatan	Bentenan	Tumbak	Blongko	Talise
A Initiated by the project					
1	Crown of Thorns clean-up	x	x	-	-
2	Coral reef monitoring	-	x	x	-
3	Beach monitoring	x	-	-	x
4	Community meeting and information center	-	-	x	x
5	Study tour on coastal and marine tourism	x	x	x	x
6	Training on financial accounting	x	x	x	x
B Initiated by the community					
1	Formation of a coral reef group	x	-	-	-
2	Mangrove planting	x	x	-	-
3	Ecotourism enterprices	-	-	-	x
4	Wells, latrines & washing facilities	-	-	x	-

Sumber: Brian Crawford dalam Summer Institute Course CRC-University of Rhode Island, June 1998

Kegiatan *early actions* tersebut dilaksanakan oleh Proyek Pesisir dalam upaya mendukung dan menunjang program jangka panjang agar mencapai tujuan akhir proyek. Untuk itu pendokumentasian seluruh proses dan hasil yang dicapai dari kegiatan ini sangatlah penting bagi upaya perbaikan, penyempurnaan dan penyebarluasan pengalaman ke daerah-daerah lain maupun pada praktisi pengelolaan wilayah pesisir lainnya.

1.2. METODOLOGI

1.2.1. Pendekatan

Pendekatan yang diambil untuk menarik pelajaran dari kegiatan *early actions (lessons learned)* adalah dengan melakukan pendokumentasian terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan *early actions* di Sulawesi Utara. Namun mengingat keterbatasan waktu, sumberdaya manusia dan biaya maka hanya beberapa kegiatan *early actions* yang secara spesifik akan didokumentasikan lebih detail. Kegiatan *early actions* tersebut adalah *Crown of Thorns clean up*, *coral reef monitoring*, *beach profil monitoring*, dan *mangrove planting*. (Tabel-2) Pemilihan kegiatan tersebut didasarkan atas berbagai alasan sebagai berikut:

- ♦ Dapat mewakili kelompok sumber inisiatif (prakarsa proyek atau masyarakat)
- ♦ Mewakili satu bentuk komunitas atau lokasi proyek (*coastal village or small island*).
- ♦ Telah dilakukan dilebih dari satu desa/lokasi. Adanya pelaksanaan *early actions* tertentu di lokasi yang berbeda dapat digunakan sebagai bahan pembandingan antar lokasi atau saling melengkapi data/informasi bagi jenis kegiatan tersebut.
- ♦ Dapat mewakili keempat wilayah kerja proyek.

Survey dilaksanakan dengan melakukan observasi lapang, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan pengumpulan data-data dari laporan-laporan tentang kegiatan EA. Data, informasi dan keterangan yang perlu didokumentasikan dalam kegiatan ini dapat di kategorikan sebagai data primer dan data

sekunder. Di bawah ini merupakan penjelasan bagaimana *Learning Team* akan melakukan pengumpulan data tersebut.

1.2.2. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Observasi lapang dilakukan terhadap subyek dan obyek kegiatan *early actions*. Observasi diartikan sebagai pengamatan visual terhadap keadaan/kondisi dan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan *early action* pada suatu lokasi dan waktu tertentu tanpa wawancara dengan responden. Observasi lapang sangat diperlukan bagi *Learning Team* untuk memverifikasi hasil wawancara.

Pelaksanaan observasi ke lapangan akan dilakukan oleh *Learning Team* untuk melengkapi hasil “wawancara tidak langsung (jarak jauh)” yang kurang jelas, meragukan atau kurang lengkap informasinya, sehingga perlu menggali informasi lebih mendalam/detail atau lebih sempurna dari lapangan. Pelaksanaan observasi lapang akan dikordinasikan dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara agar tidak mengganggu jalannya aktifitas proyek ataupun rutinitas lainnya.

Learning Team akan menyusun satu kuisisioner yang akan menjadi panduan pertanyaan untuk menggali dan menemukan informasi yang berkaitan

Tabel-2. Jenis kegiatan *early actions* Proyek Pesisir Sulawesi Utara dan lokasinya

No	Early Actions	Bentenan	Tumbak	Blongko	Talise
A Initiated by the project					
1	Crown of Thorns clean-up	x	x	-	-
2	Coral reef monitoring	-	x	x	-
3	Beach monitoring	x	-	-	x
B Initiated by the community					
1	Mangrove planting	x	x	-	-

Keterangan: X : ada; - : tidak ada

melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang disusun dalam bentuk semi struktural (*semi structured*) yang bersifat “*open-ended*”. Dengan demikian diharapkan bahwa jawaban yang diterima dari suatu pertanyaan akan dapat menghasilkan atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain secara terus menerus (*snow balling method*) sampai informasi yang diperoleh jelas, ada kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner disajikan dalam Kotak-1.

Wawancara *Learning Team* dengan para responden dilakukan dengan cara tidak langsung (jarak jauh) dan secara langsung (*face-to-face*). Wawancara tidak langsung dilakukan dengan melalui telepon dan e-mail. Sedangkan wawancara langsung dilakukan dengan berhadapan langsung dengan responden di satu tempat dan waktu tertentu yang telah disepakati ataupun diatur kemudian. Pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan observasi lapang

Responden dalam kegiatan ini adalah kelompok/individu yang menjadi target wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel-3. Jadwal pendokumentasian kegiatan *early actions* dan workshop

No	Activities	Week-Month
1	Letter to project staff	I September
2	List of issues identified and approved	I-III September
3	Research proposal for “Early actions”	IV September - I October 1998
4	Proposal review, comment and approval	II-III October 1998
5	Documentation process (field activities)	IV October - III November 1998
6	Writing Documentation Draft Paper	IV November - III December 1998
7	Draft circulation and improvement	IV December - IV January 1998
8	Workshop	IV February 1999
9	Final Documentation Result	III March 1999

Responden ini dapat berasal dari staf Proyek Pesisir, termasuk manajer dan para *Technical Advisor* Proyek Pesisir Sulawesi Utara, pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang terkait. Rincian responden akan disusun setelah melakukan diskusi dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi *key respondent*.

1.2.3. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka terhadap laporan-laporan pelaksanaan kegiatan, korespondensi selama kegiatan berlangsung dan referensi lainnya yang terkait. Kajian pustaka terdiri dari dua jenis yaitu kajian literatur (*literature review*) dan kajian laporan (*report review*). Kajian Pustaka dilakukan pada awal kegiatan pendokumentasian untuk mempelajari dan memahami konsep/teori yang melandasi pelaksanaan *early actions* dan mengetahui garis besar proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi *early actions* dari Proyek Pesisir di Sulawesi Utara.

1.2.4. Jadwal kegiatan pendokumentasian *early actions*

Proses pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir dimulai secara formal dengan dilaksanakannya pertemuan dan diskusi dengan Dr. Kem Lowry dan Brian Needham pada akhir Agustus 1998 yang lalu. Khusus untuk pendokumentasian kegiatan *early actiona* kan dilaksanakan setelah seluruh pihak-pihak yang terkait menyetujui isi dari proposal yang disusun oleh *Learning Team*. Berikut adalah jadwal tentatif dari pelaksanaan dokumentasi kegiatan *early action* di Sulawesi Utara.

1.3. Penutup

Pelaksanaan pendokumentasian ini merupakan satu kerja bersama, oleh karena itu masukan dan kritik terhadap proposal ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan dokumen yang didukung oleh seluruh pelaksana Proyek Pesisir.

Kotak-1: Daftar pertanyaan untuk mendokumentasikan *early actions*

1. Tujuan ~ Objectives

- a. Apa tujuan early actions?
 - ♦ What's the objective of the early actions?
- b. Bagaimana relevansi early action tertentu dengan Proyek Pesisir ?
 - ♦ What is the relevancy of its objective to Proyek Pesisir?
- c. Bagaimana menilai bahwa tujuan early action tercapai ?
 - ♦ How can we know that the objective have been achieved?

2. Proses pemilihan *early actions* ~ *Early actions* selection process

- a. Bagaimana keterlibatan masyarakat/ *stakeholder* dan proyek dalam pengusulan dan penentuan kegiatan *early actions*?
 - ♦ How was the community/ *stakeholder* involved in the process? What's the role of Proyek Pesisir?
- b. Apa ruang lingkup dan kriteria yang digunakan dalam pemilihan kegiatan *early actions*? (dana, waktu, lembaga, sumberdaya manusia, kelompok masyarakat, batas wilayah, dukungan pemerintah, kelayakan kegiatan).
 - ♦ What's the scope and criteria used in the selection process? (financial, time, human resource, community groups, geographical boundary, government support, other feasibility aspects)
- c. Deskripsi setiap kegiatan *early actions* ~ Description for each of early actions

3. Pelaksanaan *early actions* ~ Implementation of *early actions*

- a. Strategi apa yang digunakan dalam melaksanakan *early actions*? (Persiapan pelaksanaan, struktur organisasi, legitimasi *early actions*)
 - ♦ What's the strategy to implement EA?
- b. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan *early actions*? Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Faktor-faktor apa yang mendukung dalam mengatasi kendala tersebut?
 - ♦ Was there any problem? What measures being taken? What was the supporting factors?
- c. Apakah terjadi perubahan pelaksanaan dari yang telah direncanakan?
 - ♦ Was the implementation deviated from the plan?

4. Evaluasi ~ Evaluation

- a. Apa kelanjutan early action setelah waktu yang telah ditentukan selesai?
 - ♦ What's next?
- b. Sejauh mana kegiatan early action dipublikasikan?
 - ♦ What's the publication strategy for *early actions* implementation?
- c. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap *early actions*?
 - ♦ What's the community/ *stakeholder* response?
- d. Apa manfaat langsung *early actions* terhadap masyarakat?
 - ♦ Is there any tangible result?

2. PROVINCIAL WORKING GROUP

2.1. PENDAHULUAN

2.1.1. Latar belakang

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah pesisir, mengakibatkan kegiatan di wilayah tersebut juga sangat bervariasi. Hal ini memerlukan adanya suatu bentuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terencana dan terpadu, agar kesinambungan dan kelestarian sumberdaya yang ada dapat mendukung berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu, perlunya adanya koordinasi dan kerjasama antara institusi yang terkait dalam menyusun perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Hal ini diperlukan guna menghindari adanya tumpang tindih antar sektor dalam proses perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan di lapangan.

Provincial Working Group (PWG) yang dibentuk di Manado dan *Provincial Advisory Committee* (PAC) yang dibentuk di Lampung merupakan suatu hal yang diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. PWG dan PAC ini diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu “wadah” atau “organisasi” yang melibatkan semua institusi yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Sehingga dalam proses pengelolaan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dapat terencana dan terpadu dengan baik, dengan melibatkan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dari para *stakeholders* yang ada.

2.1.2. Tujuan

Pendokumentasian kegiatan PWG dan PAC dilakukan untuk mendapatkan informasi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

2.2. METODOLOGI

2.2.1 Pendekatan

Dalam kegiatan pendokumentasian PWG dan PAC ini, pendekatan yang dilakukan adalah menginventarisir berbagai informasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan PWG di Sulawesi Utara dan PAC di Lampung. Data, informasi dan keterangan yang perlu didokumentasikan dalam kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder. Di bawah ini merupakan penjelasan bagaimana *Learning Team* akan melakukan pengumpulan data tersebut.

2.2.2. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapang.

a. Kuisisioner dan Wawancara (*Questioner and Interview*)

Learning Team (*Learning Team*) akan menyusun satu kuisisioner yang akan menjadi panduan pertanyaan untuk menggali dan menemukan informasi yang berkaitan melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang disusun dalam bentuk semi struktural yang bersifat “*open-ended*”. Dengan demikian diharapkan bahwa jawaban yang diterima dari suatu pertanyaan akan dapat menghasilkan atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain secara terus menerus (*Snow Balling Method*) sampai informasi yang diperoleh jelas, ada kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner disajikan dalam Kotak-2.

Wawancara *Learning Team* dengan para responden dilakukan dengan cara tidak langsung (jarak jauh) dan secara langsung (*face-to-face*). Wawancara tidak langsung dilakukan dengan melalui telepon dan e-mail. Sedangkan wawancara langsung dilakukan dengan berhadapan langsung dengan responden di satu tempat dan pada waktu tertentu yang telah disepakati ataupun diatur kemudian.

Responden dalam kegiatan ini adalah kelompok/individu yang menjadi target wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Responden ini dapat berasal dari staf (termasuk manajer dan para TA) Proyek Pesisir Sulawesi Utara, pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang terkait. Rincian responden akan disusun setelah melakukan diskusi dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi *key respondent*.

b. Observasi dan Survey (*Observation and Survey*)

Observasi dan survey lapangan dilakukan terhadap subyek dan obyek kegiatan PWG. Observasi diartikan sebagai pengamatan visual terhadap keadaan/kondisi dan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan kegiatan PWG di Sulawesi Utara dalam waktu tertentu tanpa wawancara dengan responden sesuai metoda yang telah ditentukan. Observasi lapangan sangat diperlukan bagi *Learning Team* untuk mendeskripsikan hubungan antara hasil pengamatan lapangan dengan hasil wawancara.

Pengertian survey dalam konteks ini adalah pengamatan dan pencatatan mengenai kegiatan PWG di lapangan dengan melakukan “pengamatan langsung” dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PWG tersebut. Pelaksanaan survey ke lapangan akan dilakukan oleh *Learning Team* untuk melengkapi hasil “wawancara tidak langsung (jarak jauh)” yang kurang jelas, meragukan atau kurang lengkap informasinya, sehingga perlu menggali informasi lebih mendalam/detail atau lebih sempurna dari lapangan. Pelaksanaan observasi dan survey lapangan akan dikordinasikan dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara agar tidak mengganggu jalannya aktifitas proyek ataupun rutinitas lainnya.

2.2.3. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka terhadap laporan-laporan pelaksanaan kegiatan, korespondensi selama kegiatan berlangsung dan referensi lainnya yang terkait.

a. Kajian Pustaka (*Document Review*)

Kajian pustaka *Learning Team* pada awal kegiatan pendokumentasian, adalah untuk mempelajari dan memahami konsep/teori yang melandasi

pelaksanaan PWG dan mengetahui garis besar proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi PWG dari Proyek Pesisir di Sulawesi Utara

2.3.3. JADWAL KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PROVINCIAL WORKING GROUP

Proses pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir dimulai secara formal dengan dilaksanakannya pertemuan dan diskusi dengan Kem Lowry dan Brian Needham pada akhir Agustus 1998 yang lalu. Khusus untuk pendokumentasian kegiatan PWG akan dilaksanakan setelah seluruh pihak-pihak yang terkait menyetujui isi dari proposal yang disusun oleh *Learning Team*. Jadwal tentative pelaksanaan pendokumentasian kegiatan PWG sama dengan pendokumentasian kegiatan *early actions* (Tabel-3).

2.3 PENUTUP

Pelaksanaan pendokumentasian ini merupakan satu kerja bersama, oleh karena itu masukan dan kritik terhadap proposal ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan dokumen yang didukung oleh seluruh pelaksana Proyek Pesisir.

Kotak- 2: Pertanyaan untuk mendokumentasikan *Provincial Working Group*

1. Pendahuluan ~ *Introduction*

- a. Bagaimana ide awal terbentuknya *Provincial Working Group* (PWG)?
- b. Pengalaman dari negara lain, negara sendiri atau proyek-proyek lain, ide dari proyek pesisir, pemerintah atau masyarakat lokal?
 - ♦ *What was the original idea of the establishment of PWG?*
 - ♦ *Experience from other country, Indonesia or other project in Indonesia, from project pesisir or local government and community?*

2. Tujuan dan tugas ~ *Purpose/Aim/Objectives*

- a. Apa tujuan dari PWG?
- b. Apa output PWG?
- c. Apa dampak PWG?
 - ♦ *What is the objective of PWG?*
 - ♦ *What is the output?*
 - ♦ *What is the impact?*

3. Proses Pembentukan PWG ~ *Establishment process of PWG*

- a. Bagaimana PWG dibentuk?
- b. Proses pemilihan dan pengangkatan anggota? (Siapa yang terlibat, yang mengusulkan, peranannya, forumnya?)
- c. Proses pengesahan?
- d. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?
- e. Struktur PWG?
 - ♦ *How was PWG established?*
 - ♦ *Process of selection and appointment of its members (who is involved, who proposed it, what is their role? what is the forum?)*
 - ♦ *Official appointment process*
 - ♦ AD/ART
 - ♦ PWG structure

4. Proses Kerja PWG ~ *PWG work process*

- a. Ada rencana kerja? (Siapa, waktu, dana?)
- b. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya? (pengembangan, masalah dan pemecahannya?)
 - ♦ *Does PWG have a work plan? (Who is involved?, when is it executed? Is there fund available?)*
 - ♦ *How does PWG implement its activities? (Progress of implementation, problems and solution)?*

5. Evaluasi ~ *Evaluation*

- a. Apakah ada *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan PWG?
- b. Bagaimana pengevaluasian dilakukan?

- c. Apakah ada kriteria?
- d. Bandingkan hasil dengan kriteria?
 - ♦ *Are PWG activities monitored and evaluated?*
 - ♦ *How was the evaluation carried out?*
 - ♦ *What are the criteria of success?*
 - ♦ *How was the results compared to the criteria?*

3. PROGRAM MONITORING

3.1 PENDAHULUAN

Program *monitoring* seyogyanya merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau proyek. Dengan melaksanakan *monitoring*, arah perkembangan kegiatan atau proyek dapat diamati oleh pengelolanya. Jika suatu masalah ditemukan maka hasil temuan dari aktifitas *monitoring* dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. *Monitoring* dapat juga dilakukan baik untuk keperluan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan maupun terhadap dampak kegiatan. Secara umum, *monitoring* akan bermanfaat bagi pengelola kegiatan atau proyek, pemberi dana, *stakeholder* dan lain-lain.

Monitoring program is supposed to be one part of implementation of an activity or project. By conducting monitoring, the track or direction of the activity can be observed by its management. When a problem is discovered from a monitoring program, the project management can make a decision based on this observation. Results of monitoring program can also be used to evaluate both process and impact of the activity. In general, monitoring program is beneficial to the project management, project donor, stakeholders, etc.

Kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir tersebar di berbagai tingkat, baik nasional, daerah maupun *field-sites*. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada dua jenis kegiatan *monitoring* yang secara eksplisit ditulis dalam *YearPlan 2*,

yaitu *baseline survey monitoring* dan *citizen monitoring plan/programs*. Kegiatan *monitoring* tersebut perlu didokumentasikan sebagai bahan pelajaran (*lesson learned*) bagi penyelenggaraan *monitoring* Proyek Pesisir selanjutnya maupun proyek sejenis lainnya.

Proyek Pesisir has many activities distributed at national, provincial and field site levels. Among these activities, there are two types of monitoring activities that are explicitly mentioned in YearPlan 2: baseline survey monitoring and citizen monitoring plan/programs. These two kinds of activities should be well documented as lesson learned for monitoring program of the Proyek Pesisir or other similar projects.

Sebagai unit kerja yang ditugaskan oleh Proyek Pesisir untuk melakukan learning, maka *Learning Team* IPB mengajukan kegiatan pendokumentasian aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Kegiatan pendokumentasian *monitoring* ini semata-mata dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Proyek Pesisir. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara para staf Proyek Pesisir dan berbagai pihak dengan *Learning Team* sangat diharapkan.

As a unit specially developed by Proyek Pesisir to conduct learning activity, the IPB Learning Team herewith proposes activity to document monitoring program executed by Proyek Pesisir Sulawesi Utara (CRMP-Manado). This documentation activity is conducted merely to support the implementation of Proyek Pesisir. Therefore, good cooperation between Proyek Pesisir staffs and others with the IPB Learning Team is expected very much.

Kotak-3: Pertanyaan untuk mendokumentasikan *monitoring* program

A. Pertanyaan pendahuluan ~ *Overview*:

1. Apakah dalam lingkup pekerjaan anda ada kegiatan *monitoring*?
 - ♦ *Do you have any monitoring program in your project plan?*
2. Jika ada, *monitoring* tersebut di arahkan terhadap kegiatan apa? (Pertanyaan B)
 - ♦ *If yes, what activity is the monitoring directed to? (Questions B)*
3. Apa tujuan kegiatan *monitoring* tersebut? (Pertanyaan C)
 - ♦ *What is the objective of the monitoring?(Questions C)*
4. Apa fokus yang dimonitor? proses pelaksanaan kegiatan, dampak sosial atau dampak lingkungan, atau semuanya?
 - ♦ *What is the focus of the monitoring? Is it the process of implementation of an activity, the social and environmental impact of an activity, or all of them?*

B. Deskripsi kegiatan yang dimonitor ~ *Description of the activity which is monitored*

5. Judul atau nama kegiatan:
 - ♦ *Title of the activity:*
6. Definisi kegiatan:
 - ♦ *Practical definition of the activity:*
 - ♦ Apa tujuan kegiatan tersebut?
 - ♦ *Input* apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Apakah dapat terukur?
 - ♦ *Output* apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Apakah dapat terukur?
 - ♦ Dampak apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Apakah dapat terukur?
 - *Objectives of the activity:*
 - *The input required:*
 - *The expected output:*
 - *The expected outcome:*
7. Isu apa yang ditangani atau dibahas?
 - ♦ *Issue to be addressed:*
8. Bagaimana keadaan isu tersebut saat ini?
 - ♦ *The present status of the issue:*
9. Posisi kegiatan dalam WorkPlan:
 - ♦ *Position of the activity on the YearPlan:*
10. Dokumen rencana kegiatan:

♦ *Is the plan of activity well documented?*

11. Periode waktu pelaksanaan: s/d

♦ *Time of the activity:..... to*

C. *Monitoring* terhadap proses kegiatan/ dampak kegiatan ~ *Monitoring program on process of activity implementation and/or impact of activity*

12. Apakah program *monitoring* sudah dirumuskan?

- *Has the monitoring activity been formulated?*

13. Apakah parameter, variabel, indikatornya?

- *What is the indicator parameter/variable?*

14. Apakah tersedia panduan (guidelines) untuk melaksanakan *monitoring*?

- *Is there a guideline available for monitoring the activity?*

♦ Siapa yang menyusun?

- *Who designed it?*

♦ Pernah diuji-coba?

- *Has it been exercised?*

♦ Apakah tersedia cukup sumberdaya untuk melaksanakan program *monitoring*?

- *Do you have enough resources for monitoring the activity?*

♦ Tenaga: Siapa yang melakukan program *monitoring* ini?, Siapa yang terlibat dalam program *monitoring* ini?

- *Manpower: Who conduct the monitoring? Who is involved in the monitoring?*

♦ Dana

- *Fund?*

♦ Waktu: Kapan *monitoring* ini mulai dilakukan, seberapa sering dan kapan akan berakhir?

- *Time: When is monitoring executed? How often is it? When is it supposed to end?*

♦ Apa yang dilakukan terhadap hasil *monitoring* tersebut?

- *What do you do with the result of the monitoring?*

Lampiran-5. Kerangka acuan lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir 1 Maret 1999 di Bogor

**KERANGKA ACUAN
LOKAKARYA HASIL PENDOKUMENTASIAN
KEGIATAN PROYEK PESISIR
Bogor, 1 Maret 1999**

Proyek Pesisir PKSPL-IPB

**KERANGKA ACUAN
LOKAKARYA HASIL PENDOKUMENTASIAN
KEGIATAN PROYEK PESISIR**

Bogor, 1 Maret 1999

1. PENDAHULUAN

Proyek Pesisir (*Coastal Resource Management Project - CRMP*) memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir dan sekaligus meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas sumberdaya pesisir yang penting bagi masyarakat tersebut. Sejak dimulainya (1996) Proyek Pesisir telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, mulai pada tingkatan desa, kabupaten, propinsi, nasional hingga internasional. Dalam tahun pertama (April 1996 - Maret 1997), kegiatan Proyek Pesisir lebih bersifat sebagai persiapan, yang mencakup pengenalan proyek kepada berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan perencanaan proyek secara lebih rinci di tingkat propinsi. Dalam tahun kedua (April 1997 - Maret 1998), kegiatan Proyek Pesisir mulai terfokus di lapang. Secara khusus, Proyek Pesisir sedang mencoba untuk menerapkan 3 (tiga) *'best practices'* pengelolaan tingkat desa di Propinsi Sulawesi Utara. Ketiga macam *'best practices'* tersebut adalah penyusunan rencana pengelolaan pesisir tingkat desa (*village level management plan*), pembentukan kawasan perlindungan laut (*marine sanctuary*) dan pembuatan aturan-aturan setempat (*local ordinances*). Pada tahun kedua juga, Proyek Pesisir sudah melakukan persiapan kegiatan di dua propinsi lain, yaitu Lampung dan Kalimantan Timur. Secara umum, kegiatan di kedua propinsi tersebut masih dalam tahap permulaan dan pendekatan pengelolaan yang diterapkan akan berbeda dari yang dilakukan di Sulawesi Utara.

Dari pelaksanaan kegiatan yang hampir dua tahun ini, Proyek Pesisir bermaksud untuk berbagi pengalaman dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Mengingat Proyek Pesisir merupakan upaya untuk memperbaiki pengelolaan pesisir di Indonesia dan pendekatan yang diterapkannya dapat dikatakan 'baru' atau 'masih jarang', maka saran dan komentar terhadap pengalaman tersebut akan sangat bermanfaat untuk pelaksanaan Proyek Pesisir di masa selanjutnya.

Untuk itulah, Proyek Pesisir - PKSPL IPB akan bertindak sebagai fasilitator suatu lokakarya yang membahas hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Pesisir selama dua tahun ini. Bahan lokakarya adalah hasil pendokumentasian yang dilakukan oleh *Learning Team* Proyek Pesisir - PKSPL IPB berdasarkan kajian pustaka terhadap dokumen-dokumen Proyek Pesisir, kunjungan lapang dan wawancara. Pendokumentasian ini terfokus pada kegiatan awal (*early actions*), kegiatan *monitoring (monitoring activity)* Proyek Pesisir Sulawesi Utara dan Kelompok Kerja Propinsi (*Provincial Working Group*) Proyek Pesisir di tiga propinsi.

2. TUJUAN

Kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk:

- ♦ Menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh oleh Proyek Pesisir selama dua tahun terakhir, khususnya di Propinsi Sulawesi Utara, kepada sejumlah pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- ♦ Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Pesisir, dengan fokus kegiatan awal (*early actions*) dan kegiatan *monitoring (monitoring activity)* Proyek Pesisir Sulawesi Utara serta Kelompok Kerja Propinsi (*Provincial Working Group*) Proyek Pesisir di tiga propinsi, untuk mendapatkan masukan bagi pelaksanaan Proyek Pesisir di masa yang akan datang.

3. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Dari lokakarya ini, diharapkan akan diperoleh:

- ♦ Hasil evaluasi terhadap kegiatan Proyek Pesisir yang dilakukan oleh peserta lokakarya, khususnya tentang *early actions, monitoring activity, dan provincial working group.*
- ♦ Masukan untuk Workplan Tahun-3

4. RUANG LINGKUP

Lokakarya ini akan membahas 3 topik kegiatan Proyek Pesisir, yaitu kegiatan awal (*early actions*), kegiatan *monitoring* (*monitoring activity*) dan Kelompok Kerja Propinsi (*Provincial Working Group*) Proyek Pesisir. Kegiatan awal adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan Proyek Pesisir kepada masyarakat, mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat serta untuk mencoba strategi pelaksanaan suatu kegiatan proyek yang relatif besar. Di Sulawesi Utara, kegiatan awal ini mencakup pengambilan bintang laut berduri atau *Crown of Thorns* (CoT), pendidikan lingkungan hidup, pelatihan pengukuran garis pantai, pelatihan pengamatan terumbu karang, dan penanaman mangrove. Kegiatan *monitoring* adalah kegiatan yang ditujukan mencatat perkembangan maupun dampak proyek. Secara umum kegiatan *monitoring* di Sulawesi Utara, belum banyak dilakukan, namun dasar untuk melakukannya sudah dibuat, seperti *baseline study* dan pelatihan masyarakat untuk dikemudian hari dapat berpartisipasi secara aktif dalam *monitoring*. *Provincial Working Group* adalah kelompok kerja yang membantu kelancaran pelaksanaan proyek. Saat ini, kelompok kerja ini sudah ada di ketiga propinsi lahan proyek. Perbedaan-perbedaan di antaranya merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Ketiga topik ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna karena ada kaitan erat satu sama lainnya. Sebagai contoh, kegiatan pelatihan pengamatan terumbu karang adalah *early actions* yang mendukung kegiatan *monitoring* dampak proyek terhadap kondisi sumberdaya lingkungan pesisir. Sementara itu kegiatan Proyek Pesisir, termasuk *early actions*, ditentukan dengan memperhatikan pertimbangan *Provincial Working Group*.

Sebagai bahan lokakarya, direncanakan akan ada 8 (delapan) buah makalah yang mencakup ketiga topik tersebut, yaitu:

1. Proses dan metode pendokumentasian Proyek Pesisir oleh Tim Learning Proyek Pesisir - PKSPL IPB
2. *Early actions* proyek pesisir: kajian terhadap konsep *early actions* proyek pesisir
3. Pengambilan CoT: kegiatan aksi publisitas Proyek Pesisir untuk mendapatkan dukungan masyarakat
4. Pendidikan lingkungan hidup: program penyadaran masyarakat untuk peningkatan partisipasinya dalam Proyek Pesisir
5. Pelatihan pengukuran garis pantai dan *monitoring* terumbu karang: sebuah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memonitor kondisi lingkungan
6. Penanaman mangrove di desa Bentean dan Tumbak: kegiatan percobaan pendekatan pengelolaan pesisir
7. Kegiatan *monitoring* Proyek Pesisir Sulawesi Utara
8. *Provincial Working Group*: suatu upaya penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan

5. PELAKSANA

Lokakarya ini dilaksanakan oleh Proyek Pesisir - PKSPL-IPB, yang akan bertanggungjawab dalam hal persiapan pelaksanaan, pengaturan jadwal, pengiriman undangan, transportasi dan akomodasi, dukungan teknis serta administrasi.

6. MEKANISME PELAKSANAAN

Lokakarya akan dipandu oleh Koordinator Proyek Pesisir - PKSPL IPB, dan Tim Learning IPB akan bertindak sebagai fasilitator pembahasan Proyek Pesisir dengan menyajikan hasil pendokumentasian yang sudah diupayakan untuk tidak memuat penilaiannya. Penilaian terhadap pelaksanaan Proyek Pesisir akan dilakukan oleh para peserta lokakarya.

7. WAKTU DAN LOKASI

Lokakarya ini akan dilakukan selama 1 (satu) hari, pada tanggal 1 Maret 1999 di Hotel Pangrango Bogor.

8. PESERTA

Lokakarya ini diharapkan akan dihadiri oleh para staf Proyek Pesisir dan perwakilan-perwakilan CRC Universitas Rhode Island, PKSPL IPB, USAID, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, BAPPENAS, P30-LIPI, COREMAP, MREP, MARMEP, dan lembaga swadaya masyarakat (TNC, Jaring Pela, YABSHI, WWF, KEHATI dan CI). (Daftar undangan terlampir).

Lampiran-1. Daftar orang yang diundang dalam lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir

No	Nama	Instansi	No	Nama	Instansi
1	Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS	PKSPL-IPB	21	Ir. Endang Indriati	BAPPENAS
2	Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MSc	PKSPL-IPB	22	Dr. Kasim Moosa	LIPI-COREMAP
3	Ir. Darmawan, MA	PKSPL-IPB	23	Dr. Malikusworo Hutomo	COREMAP
4	Dr. Ir. Dietrich G. Bengen	PKSPL-IPB	24	Dr. Sugiarta Wirasantosa	COREMAP
5	Ian Dutton	Proyek Pesisir Jakarta	25	Dr. Yunita T. Winanto	Antropologi UI
6	Farah Sofa	Proyek Pesisir Jakarta	26	Prof. Dr. Jacob Rais	MREP
7	Graham Usher	Proyek Pesisir Jakarta	27	Rili Djohani	The Nature Conservancy
8	Dr. Budy Wiryawan	FPM Lampung	28	Gayatrie Lilley	World Wide Fund for Nature
9	Johnnes Tulungen	FPM Manado	29	Imran	Jaring Pela
10	Ramli Malik	FPM Kaltim	30	Dedy Supriadi	Yayasan Bina Sains & Hayati Indonesia
11	Christovel Rotinsulu	SEO PP Manado	31	Sari Suryadi	Conservancy Indonesia
12	Dr. Janny D Kusen	Proyek Pesisir Manado	32	Cliff Marlessy	Keanekaragaman Hayati Indonesia
13	M. Fedi A. Sondita	Learning Team PKSPL-IPB	33	Kathleen Shurcliff	Biodiversity Support Program-Kemala
14	Neviaty P. Zamani	Learning Team PKSPL-IPB	34	Purbasari Surjadi	Togean Program
15	Bambang Haryanto	Learning Team PKSPL-IPB	35	Yani Subekti Permana	Conservancy International
16	Amiruddin	Learning Team PKSPL-IPB	36	Dr. Ning Purnomohadi	BAPEDAL
17	Burhanuddin	Learning Team PKSPL-IPB	37	Sri Kholiyasih	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
18	Ir. Irwandi Idris, MS	Ditjen BANGDA	38	Pepen S. Abdullah	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
19	Ir. Sapta P. Ginting, MSc	Ditjen BANGDA	39	Wawan Hermawan	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
20	Titayanto Pieter	USAID	40	Siti Nurwati Khodijah	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
			41	Achmad Rizal	Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Lampiran 6. Daftar orang yang hadir dalam lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir

No	Nama	Instansi
1	Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS	PKSPL IPB
2	Dr Ir Dietriech G. Bengen	PKSPL IPB
3	Ian Dutton	Proyek Pesisir Jakarta
4	Farah Sofa	Proyek Pesisir Jakarta
5	Graham Usher	Proyek Pesisir Jakarta
6	Dr Budy Wiryawan	FPM Lampung
7	Johnnes Tulungen	FPM Manado
8	Ramli Malik	FPM Kaltim
9	Christovel Rotinsulu	SEO PP Manado
10	Dr Janny D Kusen	Proyek Pesisir Manado
11	M. Fedi A. Sondita	Learning Team PKSPL-IPB
12	Neviaty P. Zamani	Learning Team PKSPL-IPB
13	Bambang Haryanto	Learning Team PKSPL-IPB
14	Amiruddin	Learning Team PKSPL-IPB
15	Burhanuddin	Learning Team PKSPL-IPB
16	Ir. Irwandi Idris, MS	Ditjen BANGDA
17	Titayanto Pieter	USAID
18	Ir Endang Indriati	BAPPENAS
19	Prof. Dr Jacub Rais	Marine Resources Evaluation Poject
20	Nina Dwi Sasanti	Jaring Pela
21	Dedy Supriadi	Yayasan Bina Sains dan Hayati Indonesia
22	Sari Suryadi	Conservancy International
23	Kathleen Shurcliff	BSP-Kemala
24	Purbasari Surjadi	Togean Program-Conservancy International
25	Yani Subekti Permana	Conservacy Internasional
26	Pepen S. Abdullah	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
27	Sri Kholiyasih	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
28	Wawan Hermawan	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
29	Siti Nurwati Khodijah	Proyek Pesisir PKSPL-IPB
30	Achmad Rizal	Proyek Pesisir PKSPL-IPB

**Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
(PKSPL-IPB)**

Gedung Marine Center, Lantai IV
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga
Bogor 16680, PO. Box 286 - Bogor
Telp. (0251) 626380, 624815
Fax. (0251) 621086

e-mail:

awan-uri@indo.net.id
learningtm@bogor.indo.net.id